



Katalog: 4102002

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2015



UMUR PANJANG DAN
HIDUP SEHAT



PENGETAHUAN



STANDAR HIDUP
LAYAK



BADAN PUSAT STATISTIK

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2015



UMUR PANJANG DAN
HIDUP SEHAT



PENGETAHUAN



STANDAR HIDUP
LAYAK



<http://www.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015

- © 2016 : Badan Pusat Statistik
*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau meng-
gandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik*
- ISSN : 2086-2369
Nomor Publikasi : 07310.1601
Katalog : 4102002
Ukuran Buku : 17,6 cm × 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 127 halaman
Naskah : Subdirektorat Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Capaian pembangunan manusia pada 2014-2015 menunjukkan peningkatan sedikit lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan karena meningkatnya disparitas pencapaian pembangunan antar daerah.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Indonesia yang berjudul "Indeks Pembangunan Manusia 2015" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	viii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB 1 Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia	7
Konsep Dasar Pembangunan Manusia	7
Pengukuran Pembangunan Manusia	10
Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan Manusia yang Harus Didahulukan?	11
Pembangunan Manusia: Isu Lawas yang Selalu Hangat	12
BAB 2 Pencapaian Pembangunan Manusia	17
Indonesia di Jajaran ASEAN	17
Status Pembangunan Manusia Indonesia	20
Pembangunan Manusia di Provinsi	24
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	32
BAB 3 Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia	41
Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan	41
Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan	46
Tantangan Bidang Ekonomi	54
BAB 4 Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Wilayah	61
Kesenjangan Antar Provinsi	62
Kesenjangan Antar Kabupaten/kota di dalam Provinsi	67
BAB 5 Kesimpulan	79
Daftar Pustaka	81
Lampiran	87
Catatan Teknis	121

Daftar Tabel

Tabel 2.1	IPM Indonesia dan Singapura serta Komponen, 2014	20
Tabel 2.2	Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2015	28
Tabel 2.3	Provinsi yang Mengalami Perubahan Status dari 2014 ke 2015	29
Tabel 2.4	12 Kabupaten/Kota dengan Status Pembangunan Manusia “Sangat Tinggi”, 2015	34
Tabel 2.5	Perubahan Status di Kabupaten/Kota dari tahun 2014 ke 2015	35
Tabel 2.6	10 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan Tertinggi (2014-2015)	36
Tabel 3.1	Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah Antar Provinsi, 2011-2015 (Persen) ...	45
Tabel 3.2	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis, 2011-2015	51
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Menurut Kebiasaan Merokok dan Wilayah, 2015.....	54

<http://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP.....	10
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Negara-negara ASEAN, 2014.....	17
Gambar 2.2	Ilustrasi Capaian IPM dan Komponen Indonesia dan Singapura, 2014...	18
Gambar 2.3	IPM Indonesia dan Komponen, 2015	20
Gambar 2.4	Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, 2010-2015.....	21
Gambar 2.5	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Indonesia, 2010-2015 (Tahun).....	22
Gambar 2.6	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2010-2015 (Tahun).....	23
Gambar 2.7	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Indonesia, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun).....	24
Gambar 2.8	Provinsi dengan Pertumbuhan Tertinggi dan Terendah, 2014-2015	25
Gambar 2.9	Peta IPM Provinsi di Indonesia, 2015	27
Gambar 2.10	Peta Angka Harapan Hidup saat Lahir Provinsi, 2015 (Tahun).....	29
Gambar 2.11	Peta Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi, 2015 (Tahun)	30
Gambar 2.12	Peta Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi, 2015 (Tahun).....	31
Gambar 2.13	Peta Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Provinsi, 2015 (Ribu Rupiah/Tahun).....	32
Gambar 2.14	Peta IPM Kabupaten/Kota di Indonesia, 2015.....	33
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2015 (Persen)	42
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia, 2011-2015 (Persen).....	43
Gambar 3.3	APS 13-15 tahun Indonesia menurut Kuintil Pengeluaran, 2011-2015 (Persen)	44
Gambar 3.4	Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum).....	47
Gambar 3.5	Indikator Lingkungan, 2011-2015	49
Gambar 3.6	Persentase Desa Menurut Fasilitas Kesehatan, 2011 dan 2014.....	50
Gambar 3.7	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis menurut Kuintil Pengeluaran, 2011-2015	52
Gambar 3.8	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis menurut Provinsi, 2015	53
Gambar 3.9	Tren Kemiskinan di Indonesia, 2011-2015 (Persen)	55

Gambar 3.10	Tren Gini Rasio Indonesia Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2011-2015	55
Gambar 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia, 2011-2015 (Persen)...	56
Gambar 3.12	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 (Persen)	57
Gambar 4.1	Selisih IPM Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015	62
Gambar 4.2	Selisih AHH Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)	63
Gambar 4.3	Selisih EYS Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)	64
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2015 (Persen)	65
Gambar 4.5	Selisih MYS Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)	66
Gambar 4.6	Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun)	67
Gambar 4.7	Kesenjangan IPM antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015	68
Gambar 4.8	Selisih IPM Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga, 2010-2015	69
Gambar 4.9	Kesenjangan Angka Harapan Hidup saat Lahir antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015	70
Gambar 4.10	Selisih AHH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Brebes, 2010-2015 (Tahun)	71
Gambar 4.11	Kesenjangan Angka Harapan Lama Sekolah antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015	72
Gambar 4.12	Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015	73
Gambar 4.13	Selisih HLS dan RLS antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga, 2010-2015 (Tahun)	74
Gambar 4.14	Kesenjangan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan antar Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi, 2015	75
Gambar 4.15	Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun)	76

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015.....	87
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2015	88
Lampiran 3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2011-2015	102
Lampiran 4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015	103
Lampiran 5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN, 1990-2014	116
Lampiran 6	Kabupaten/Kota dengan Kategori Tinggi, 2015.....	117

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Namun sebenarnya, ide dasar dari pembangunan manusia cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report 1990*).

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia.

Aktualisasi konsep pembangunan manusia melahirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Indonesia mulai menghitung IPM pada tahun 1996. Sejak saat itu, IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun. Namun, sejak 2004 IPM dihitung setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sampai saat ini meliputi angka harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita yang mewakili dimensi standar hidup layak.

Konsep pembangunan manusia tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu yang eksklusif. Konsep pembangunan yang ada masih berkaitan dengan konsep pembangunan manusia. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.

Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2015, *Millenium Development Goals* (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. Agenda MDGs tidak akan berhenti di tahun 2015, namun berlanjut dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dirancang dengan menggunakan tiga pilar, dirincikan kembali ke 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Sejak tahun 1990, UNDP tidak pernah absen dalam mencatat perkembangan pembangunan manusia berbagai negara. Pada tahun 2014 UNDP mencatat IPM di Indonesia mencapai 68,38 dan masih menyandang predikat "Sedang" dalam status pembangunan manusia. Meskipun telah berstatus "Sedang", Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 188 negara di tahun 2014, naik tiga peringkat dari tahun 2009. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Untuk keterbandingan regional, Badan Pusat Statistik juga melakukan penghitungan IPM sejak tahun 1996. IPM Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai 69,55, meningkat sebesar 0,94 dari tahun sebelumnya. Tahun ini, angka harapan hidup saat lahir di Indonesia sudah mencapai 70,78 tahun atau harapan hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,78 tahun. Secara rata-rata, penduduk Indonesia usia 25 tahun keatas

sudah menempuh 7,84 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,55 tahun atau setara dengan SMA. Tidak kalah penting, standar hidup layak Indonesia yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai Rp 10.150.000 per kapita per tahun.

Capaian pembangunan manusia tertinggi pada level provinsi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,99, sedangkan capaian terendah adalah Provinsi Papua dengan IPM sebesar 57,25. Di saat Indonesia mendapatkan predikat pembangunan manusia pada kategori “Sedang”, capaian di tingkat regional provinsi cukup bervariasi. Terdapat delapan provinsi di Indonesia yang sudah mencapai kategori “Tinggi” untuk pembangunan manusia. Kedelapan provinsi tersebut meliputi Provinsi Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Selain itu, sebagian besar provinsi di Indonesia yang sudah sampai pada kategori “Sedang” dalam pembangunan manusia, dan hanya tinggal satu provinsi saja yang masih di level “Rendah”, yaitu Provinsi Papua.

Seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 514 yang menyebar dari Sabang hingga Merauke, juga mencatat perkembangan pembangunan manusia yang cukup beragam. Capaian tertinggi di level kabupaten/kota berada di Kota Yogyakarta dengan IPM sebesar 84,56 pada tahun 2015. Sementara capaian terendah berada di Kabupaten Nduga (Provinsi Papua) dengan IPM sebesar 25,47. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori “Sedang”. Namun, terdapat beberapa kabupaten/kota yang sudah berada pada kategori “sangat tinggi”.

Kabupaten yang sudah berada pada kategori pembangunan manusia “Sangat Tinggi” pada tahun 2015 tercatat sebanyak 12 kabupaten/kota. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7 kabupaten/kota saja. Kabupaten/Kota yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” adalah Kota Yogyakarta, Sleman (DI Yogyakarta), Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta), Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Denpasar (Bali), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Padang (Sumatera Barat), dan Kota Malang (Jawa Timur). Sebagian besar dari kabupaten/kota yang memiliki kategori “Sangat Tinggi” pada umum berada di Pulau Jawa. Selain kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia berkategori “Sangat Tinggi”, terdapat 132 Kabupaten/kota yang sudah mencapai kategori “tinggi” dan 329 kabupaten/kota sudah berada pada posisi “sedang”. Namun, masih ditemukan kabupaten/kota yang berada pada kategori “rendah” dalam pembangunan manusianya, yang tercatat sebanyak 41 kabupaten/kota.

Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM Indonesia tumbuh rata-rata 0,91 persen per tahun. Pada tahun 2015, IPM Indonesia bahkan tumbuh lebih cepat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,94 persen. Di tingkat regional, tiga provinsi mencatat perkembangan pembangunan manusia yang cukup mengagumkan pada tahun 2015. Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,37 persen. Disusul dengan Provinsi Jawa Timur (1,19 persen), Provinsi Sulawesi Barat (1,17 persen). Selain itu, pada level kabupaten/kota, sepuluh wilayah juga mencatat perkembangan pembangunan manusia yang cukup cepat. Kesepuluh kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Puncak, Pegunungan Bintang, Kayong Utara, Banjarnegara, Barito Selatan, Lampung Selatan, Manokwari Selatan, Pati, Batang, dan Pematang Jaya. Beberapa wilayah juga telah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia dari “Tinggi” menjadi “Sangat Tinggi”. Terdapat lima wilayah yang telah berhasil, yaitu Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Malang.

Kesenjangan pembangunan manusia masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah di tahun-tahun ke depan. Hingga tahun 2015, kesenjangan pembangunan manusia masih terjadi, baik nasional maupun regional. Di tingkat provinsi, kesenjangan IPM antar provinsi cenderung turun selama kurun waktu 2010 hingga 2014, tetapi sedikit meningkat pada tahun 2015. Pada dimensi kesehatan, kesenjangan cenderung turun. Pada dimensi pendidikan, kesenjangan harapan lama sekolah berpola seperti kesenjangan IPM, sedangkan kesenjangan rata-rata lama sekolah cenderung fluktuatif. Sementara itu, kesenjangan pada dimensi standar hidup layak semakin mengkhawatirkan karena semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tingkat kabupaten/kota, kesenjangan juga menjadi imbas dari pembangunan yang tidak merata. Provinsi Papua perlu mendapat perhatian secara khusus karena ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota sangat tinggi dan terjadi pada semua dimensi pembangunan. Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam menangani Provinsi Papua menjadi lebih kompleks. Hal ini karena selain capaian pembangunan manusia yang rendah, juga kesenjangan pembangunan yang begitu krusial.



BAB

1

**KONSEP DAN
PENGUKURAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia

Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia sejatinya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Kotak 1.1 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.

Sumber: HDR 1990 halaman 10

Beberapa ahli juga mengemukakan konsep pembangunan manusia yang menyiratkan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Amartya Sen (1989) misalnya, mendefinisikan pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan

bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Pembangunan manusia adalah cara dan tujuan akhir. Mahbub ul Haq (1995) juga mengemukakan hal serupa. Ia berpendapat bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Banyak sekali konsep yang dikemukakan mengenai pembangunan manusia, sama halnya dengan makna pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia memiliki makna yang luas mencakup kehidupan sosial manusia seperti kehidupan berpolitik. Kebebasan dan hak asasi manusia juga tercakup di dalamnya. Lebih spesifik lagi, kebebasan berpolitik adalah kemampuan untuk berkomunikasi tanpa rasa malu atau secara bebas. Pembangunan manusia juga merupakan pembangunan dari manusia dan oleh manusia (Neamtu Daniela & Ciobanu Oana, 2015).

Kotak 1.2 Kata Kunci Definisi Pembangunan Manusia

- Pembangunan manusia berarti perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat, serta perluasan kapabilitas untuk memenuhi aspirasi.
- Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.

Berdasarkan beberapa konsep pembangunan manusia yang ada, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia dalam *Human Development Report* 1996 sebagai proses dimana masyarakat dapat memperluas berbagai pilihan-pilihannya. Pendapatan merupakan salah satu faktor penentu pilihan, tetapi faktor yang lebih penting lainnya adalah kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik yang baik serta kebebasan dalam bertindak. UNDP juga menyampaikan dalam laporannya mengenai dimensi dalam pembangunan manusia, yaitu:

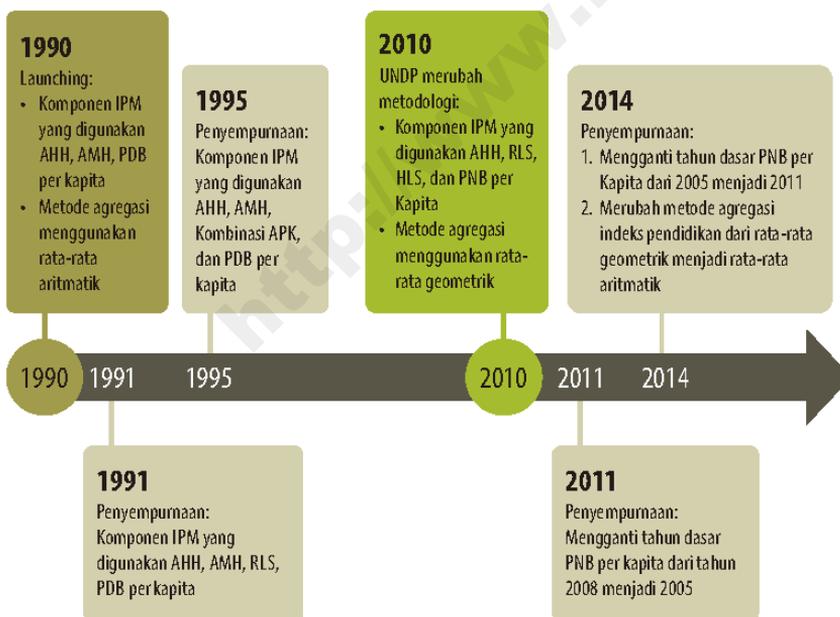
- Pemberdayaan yang dipengaruhi oleh kapabilitas, setiap orang bebas untuk melakukan sesuatu tetapi jika tidak memiliki kapabilitas maka tidak akan menikmati kebebasan tersebut.
- Dengan bekerja sama maka akan tercipta perluasan pilihan seseorang. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya fokus pada individual tetapi pada bagaimana kehidupan sosialnya.

- Kesetaraan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan.
- Keberlanjutan yang bermakna kesamaan peluang atau kesempatan antar generasi.
- Keamanan dari berbagai aspek tidak hanya aman dari bencana tetapi dari ancaman lainnya.

Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Gambar 1.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------|
| AHH | : Angka Harapan Hidup saat Lahir | APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| AMH | : Angka Melek Huruf | HLS | : Harapan Lama Sekolah |
| RLS | : Rata-rata Lama Sekolah | PNB | : Produk Nasional Bruto |
| PDB | : Produk Domestik Bruto | | |

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan Manusia yang Harus Didahulukan?

Lebih dari 25 tahun IPM digunakan UNDP sebagai pengukuran pembangunan manusia. Di Indonesia, IPM digunakan sebagai dasar penentuan dana transfer pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kabupaten/kota. IPM yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia selama ini sebetulnya tidak sempurna seutuhnya. Banyak pihak yang menganggap pengukuran pembangunan manusia dengan menggunakan IPM ini kurang tepat. Basis ideologi dalam IPM yang bersifat egalitarian (kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah) dan miskin terhadap pemikiran terkait teknologi merupakan salah satu kritik untuk IPM.

Jika dikaitkan kembali antara konsep pembangunan yang masih konvensional dengan pembangunan manusia, kedua konsep tersebut ternyata saling berkaitan satu sama lain. Konsep klasik pembangunan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah (*dual causation*) (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000), dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan pembangunan manusia namun disisi lain peningkatan pembangunan manusia memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Constantini V. dan M. Salcatore (2008) mengemukakan bahwa pertumbuhan pembangunan manusia yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun konsep-konsep menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki *dual causation* dengan pembangunan manusia, pada prakteknya banyak faktor yang mempengaruhi agar *dual causation* tersebut terjadi. Booser dkk (2003) menyatakan seberapa besar hubungan kedua bergantung kepada

berbagai faktor yaitu kondisi suatu negara, lingkungan, dan kebijakan. Sedangkan Tulika dkk (2014) menyatakan hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional bergantung kepada kondisi masyarakat secara makro maupun mikro yaitu distribusi pendapatan masyarakat secara makro dan mikro.

Selain faktor yang mempengaruhi agar *dual causation* terjadi, terdapat faktor penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ranis dkk (2000) menyampaikan bahwa faktor penguat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah struktur ekonomi, distribusi aset, kebijakan, *social capital*, investasi yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata, dan kebijakan ekonomi yang tepat. Selain itu, faktor penguat lainnya adalah budaya, kelompok sosial dan jaringan di dalam kelompok tersebut, sifat dari institusi dan pemerintahan, kebijakan, pendidikan dalam keluarga, dll (UNDP, 1996).

"Jika memang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dual causation, mana yang harus didahulukan?"

Pemikiran yang masih konvensional menyebutkan bahwa peningkatan pembangunan manusia akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi sudah meningkat (Neamtu Daniela dan Clobanu Oana, 2015). Boozer dkk (2003) mengemukakan pendapat yang hampir serupa. Pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi namun merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia berperan penting dalam alur pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia perlu dijadikan sebagai prioritas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan manusia untuk proses selanjutnya. Dengan demikian, pembangunan manusia harus ditingkatkan terlebih dahulu daripada pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut dibantah oleh Ranis dan Steward. Ranis dan Steward (2005) menyatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.

Pembangunan Manusia: Isu Lawas yang Selalu Hangat

Isu pembangunan kembali menghangat di tahun 2015. Pada tahun 2015, *Millenium Development Goals* (MDGs) memasuki batas tahun pencapaian. MDGs merupakan referensi penting pembangunan di Indonesia. Agenda MDGs tidak akan berhenti di tahun 2015, namun akan ada kelanjutannya dengan mengembangkan konsep dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals*

(SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Hal ini terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya (*depletion*) sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin (Bappenas).

Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator dalam pembentukan konsep pengembangan SDGs, yaitu:

1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*) yaitu pendidikan dan kesehatan.
2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*) yaitu ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, dirincikan kembali ke 17 tujuan yang harus dicapai. Dalam 17 tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Target 3A bertujuan mengakhiri kematian anak, kematian ibu, dan kematian akibat penyakit pada penduduk usia kurang dari 70 tahun. Jika dikaitkan dengan salah satu indikator pembentuk IPM, angka harapan hidup saat lahir secara tidak langsung akan menjadi salah satu indikator dari SDGs. Secara tidak langsung pula, angka harapan hidup saat lahir akan meningkat jika salah satu indikator SDGs yaitu angka kematian neonatal ditekan guna mencapai target tersebut.

Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

Sedangkan tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam tujuan kedelapan, terdapat target 8a yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) minimal 7 persen per tahun di negara-negara berkembang. Salah satu indikator dari target ini adalah meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dengan meningkatnya PNB per Kapita, secara tidak langsung akan menaikkan pengeluaran per kapita.

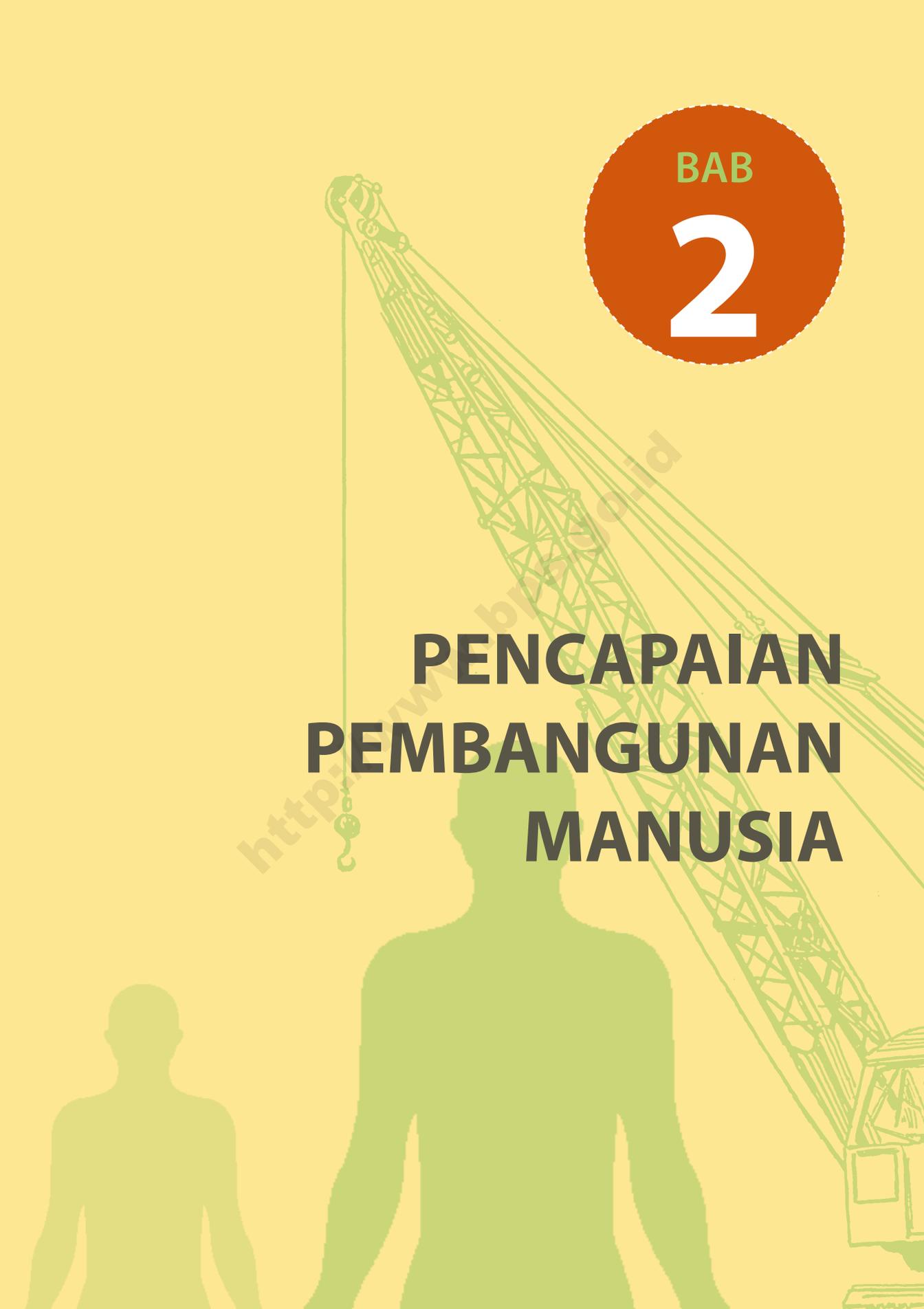
Melalui SDGs, tujuan dan target pembangunan manusia terus diupayakan peningkatannya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan pembangunan manusia dapat tercapai melalui pencapaian target SDGs.

<http://www.insid>



BAB

2



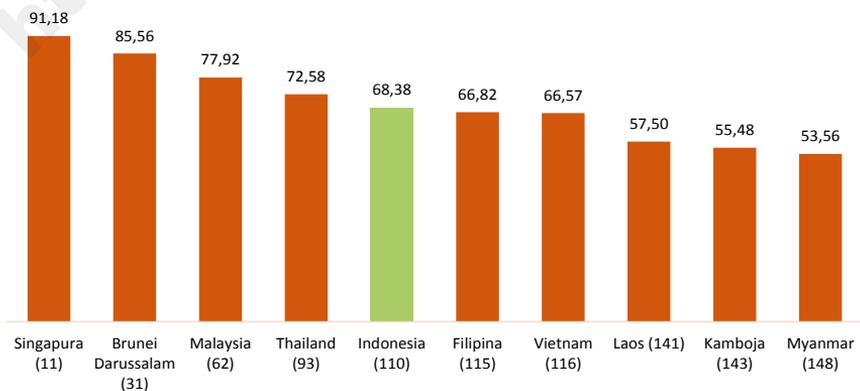
**PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA**

Pencapaian Pembangunan Manusia

Indonesia di Jajaran ASEAN

Sejak tahun 1990, UNDP tidak pernah absen dalam mencatat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai negara. Penghitungan ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan capaian pembangunan manusia antar negara di dunia. Pada tahun 2014 UNDP mencatat Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mencapai 68,38. IPM 2014 mengalami peningkatan capaian sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya. Indonesia pada tahun 2014 menyandang predikat “Sedang” dalam pembangunan manusia. Meskipun Indonesia masuk pada pembangunan manusia kategori “Sedang”, Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 188 negara di tahun 2014. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Gambar 2.1. Indeks Pembangunan Manusia Negara-negara ASEAN, 2014

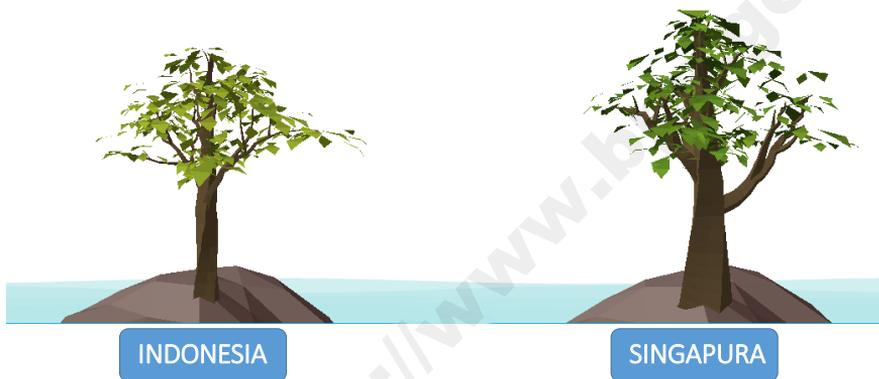


Sumber : UNDP, 2015

Dari empat negara yang menempati posisi di atas Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam sudah melesat jauh pada kategori "Sangat Tinggi". Sedangkan dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Thailand sudah berada pada kategori "tinggi". Indonesia masih berada pada kategori "sedang" bersama dengan Vietnam dan Filipina. Selain itu, terdapat tiga negara yang masih bertahan di kategori "Rendah", yaitu Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Pembangunan manusia di ASEAN juga tak luput dari kesenjangan. UNDP mencatat pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia di Singapura sudah mencapai 91,18. Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan capaian sebesar 22,80 poin. Hal ini disebabkan oleh seluruh komponen pembentuk IPM di Singapura yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia.

Gambar 2.2. Ilustrasi Capaian IPM dan Komponen Indonesia dan Singapura, 2014



Sumber : <http://report.hdr.undp.org/>

Angka harapan hidup antara Indonesia dan Singapura memiliki selisih sebesar 14,10 tahun. Jika di Indonesia bayi baru lahir memiliki harapan hidup hingga usia 68,90 tahun, di Singapura bayi baru lahir memiliki harapan hidup lebih panjang, mencapai 83,00 tahun. Di bidang pendidikan, Singapura memiliki level pendidikan yang berbeda dengan Indonesia. Penduduk usia 7 tahun di Singapura memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan Diploma III (15,40 tahun), sedangkan penduduk usia 7 tahun di Indonesia hanya memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan Diploma I saja (13,00 tahun). Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, selisih rata-rata lama sekolah antara Indonesia dengan Singapura yaitu 3 tahun. Singapura memiliki rata-rata lama sekolah selama 10,6 tahun, sedangkan Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,6 tahun. Tak hanya pada dimensi kesehatan dan pendidikan, Singapura juga meninggalkan Indonesia pada

dimensi standar layak hidup. PNB per Kapita Singapura sudah mencapai 76.628 (2011 PPP \$), delapan kali lipat dari PNB per Kapita Indonesia yang hanya sebesar 9.788 (2011 PPP \$). Ilustrasi capaian IPM dan komponennya baik untuk Indonesia maupun Singapura pada tahun 2014 bisa dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana pembangunan manusia di Indonesia dan Singapura pada tahun 2014. Ketinggian pohon menunjukkan capaian IPM. Semakin tinggi pohon maka semakin tinggi capaian IPMnya. Lebarnya batang pohon menunjukkan capaian indeks Produk Nasional Bruto (PNB). Semakin lebar batang pohon, maka semakin tinggi indeks PNB per kapitanya. Jumlah daun menunjukkan indeks pendidikan. Semakin banyak daun maka semakin tinggi indeks pendidikannya. Warna daun menunjukkan indeks kesehatan. Semakin hijau warna daunnya, maka semakin tinggi indeks kesehatan di suatu wilayah.

Gambar 2.2 menunjukkan Indonesia memiliki batang yang lebih pendek jika dibandingkan Singapura. Hal ini mengilustrasikan capaian IPM Singapura jauh lebih baik jika dibandingkan dengan IPM Indonesia. Selain itu, batang pohon Indonesia jauh lebih ramping dibandingkan Singapura. Hal ini mengindikasikan bahwa PNB per kapita di Indonesia masih jauh di bawah Singapura. Sementara itu jumlah daun menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara pendidikan di Indonesia dengan Singapura. Daun yang hijau mengindikasikan tingginya indeks kesehatan di suatu daerah. Warna daun pada dua ilustrasi di atas terlihat kontras berbeda atau bisa disimpulkan indeks kesehatan di Singapura lebih baik dibandingkan Indonesia.

Singapura membuktikan dirinya sebagai negara maju. Bukan tanpa usaha, tapi dengan upaya yang gigih. Di awal berdirinya Singapura menjadi negara, Singapura mengalami banyak sekali masalah, tiga juta orang menganggur, lebih dari dua pertiga penduduknya tinggal di pinggir kota dan lingkungannya kumuh, sanitasi yang buruk, kurangnya infrastruktur, dan juga kurangnya air bersih (<http://geography.about.com/>). Dengan kesulitan yang dihadapi di awal berdirinya, Singapura menyadari bahwa pendidikan merupakan sentral dari pembangunan baik ekonomi maupun negara (www.oecd.org), maka pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan untuk membangun pendidikan dengan seleksi sumber daya manusia pilihan, pendidikan terhadap guru, kompensasi secara finansial, apresiasi terhadap kinerja guru serta memberikan jenjang karir yang jelas bagi para guru, semisal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Singapura berhasil bangkit dari keterpurukannya dan membuktikan bahwa membangun pendidikan akan serta merta ikut membangun ekonomi dan negara.

Tabel 2.1. IPM Indonesia dan Singapura serta Komponen, 2014

Komponen	Indonesia	Singapura
(1)	(2)	(3)
AHH (tahun)	68,90	83,00
HLS (tahun)	13,00	15,40
RLS (tahun)	7,60	10,60
PNB per Kapita (2011 PPP US\$)	9.788	76.628
IPM	68,38	91,18

Sumber : UNDP

Status Pembangunan Manusia Indonesia

Dalam rangka membandingkan capaian pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia BPS menghitung IPM Provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melihat keterbandingannya secara rata-rata nasional, dihitung pula angka IPM Indonesia. Metode penghitungan IPM di Indonesia mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP dengan penyesuaian pada beberapa indikator sesuai ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota (lihat catatan teknis). Oleh karena itu angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP. IPM yang dihitung oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia di tingkat global sedangkan IPM Indonesia yang dihitung BPS digunakan sebagai *benchmark* posisi IPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 2.3. IPM Indonesia dan Komponen, 2015



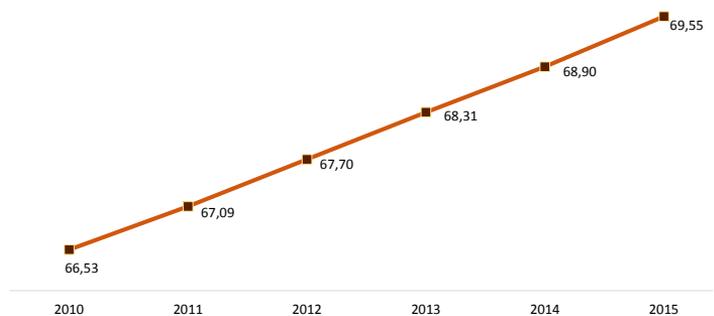
Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Indonesia tahun 2015 sebesar 69,55. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Saat ini, angka harapan hidup saat lahir di Indonesia sudah mencapai 70,78 tahun dengan kata lain harapan hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,78 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 7,84 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VII, hampir menyelesaikan kelas VII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,55 tahun atau setara dengan Kelas XII atau tamat SMA. Tidak kalah penting dari dua dimensi diatas, standar hidup layak Indonesia yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai Rp 10.150.000 per kapita per tahun.

“IPM Indonesia Tetap Tumbuh meskipun Tak Berubah Status”

BPS sudah melakukan penghitungan IPM Indonesia sampai tahun 2015. Tercatat pembangunan manusia di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, capaian IPM di Indonesia sudah mencapai 69,55. Angka ini meningkat 0,65 poin dari tahun 2014 dimana capaian pada tahun 2014 sebesar 68,90. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Indonesia. Jika dilihat dari trennya, IPM yang merupakan salah satu alat ukur pembangunan manusia mengalami kenaikan. Dalam lima tahun saja, terjadi kenaikan IPM hingga 3,02 poin.

Gambar 2.4. Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, 2010-2015

Tahun	Pertumbuhan
(1)	(2)
2010-2011	0,84
2011-2012	0,91
2012-2013	0,90
2013-2014	0,86
2014-2015	0,94



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Indonesia cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, Pada periode 2014-2015, pembangunan manusia meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode ini, IPM Indonesia berhasil tumbuh sebesar 0,94 persen.

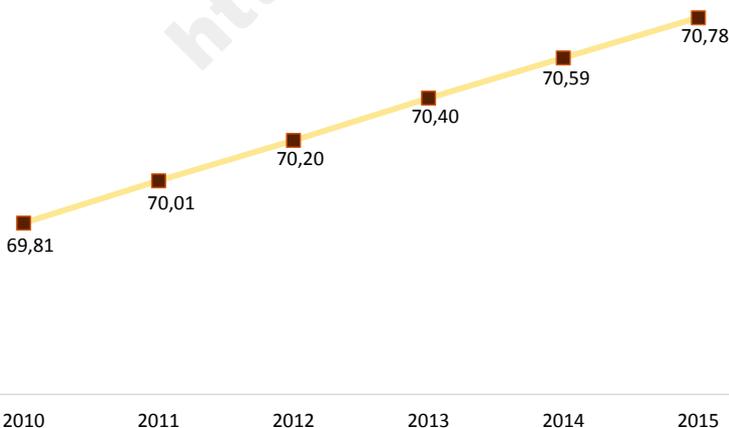
Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Meskipun IPM terus meningkat dari tahun ke tahun, status pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2015 masih berstatus sedang. Melihat capaian pada tahun 2015 dan perkembangannya dari tahun ke tahun, peluang Indonesia untuk masuk ke dalam kategori tinggi sangat besar.

"Stabilnya Dimensi Kesehatan Indonesia"

Gambar 2.5. Angka Harapan Hidup saat Lahir Indonesia, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, Indonesia mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2010-2015 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

“Indikator Pendidikan yang Terus Tumbuh”

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 2.6. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Indonesia meningkat dari tahun 2010 hingga 2015. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 2,23 persen per tahun selama tahun 2010-2015. Sedangkan rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 1,00 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

“Standar Hidup Layak yang Makin Membaik”

Standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran per kapita Indonesia per tahun meningkat sebesar 1,51 persen. Jika pada tahun 2010 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 9,4 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2015 sudah mencapai 10,15 juta rupiah per tahun. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antar daerah (pengeluaran perkapita disesuaikan).

Gambar 2.7. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Indonesia, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pembangunan Manusia di Provinsi

BPS melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi sejak tahun 1996. Pada tahun 2015, indeks pembangunan manusia tertinggi pada level provinsi di Indonesia dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian IPM sebesar 78,99. Sedangkan capaian terendah ditempati adalah Provinsi Papua dengan IPM sebesar 57,25. Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi provinsi dengan IPM tertinggi sejak indeks pembangunan manusia dihitung. Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, bisnis, wisata, dll. Hal ini mendukung Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian pembangunan

manusia. Secara sarana prasarana, Provinsi DKI Jakarta memiliki kelengkapan tersebut. Akses untuk mendapatkan pendidikan maupun kesehatan pun sangat mudah. Selain itu, sebagai provinsi dengan banyak pusat kegiatan, secara tidak langsung menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai kantung sumber daya manusia dengan pendidikan tinggi. Di sisi lain, Provinsi Papua juga menempati posisi terakhir dalam pencapaian pembangunan manusia dalam kurun waktu 2010-2015. Berkebalikan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua mengalami banyak kesulitan, seperti tidak ada sarana prasana pendidikan dan kesehatan yang lengkap dan juga akses untuk mencapai pendidikan dan kesehatan yang sulit.

Kecepatan pembangunan manusia yang diukur dengan pertumbuhan IPM menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014-2015 Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM sebesar 1,37 persen. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur (1,19 persen), Provinsi Sulawesi Barat (1,16 persen), Provinsi Kep. Bangka Belitung (1,14 persen), dan Provinsi Kalimantan Tengah (1,12 persen). Dimensi kesehatan dan standar hidup layak menjadi penyumbang terbesar kecepatan pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada dimensi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir tahun 2015 meningkat sebesar 0,49 dari tahun 2014. Sedangkan pada dimensi standar hidup layak, provinsi ini mengalami peningkatan pengeluaran per kapita pada periode 2014-2015 sebesar Rp 254.000,-.

Gambar 2.8. Provinsi dengan Pertumbuhan Tertinggi dan Terendah, 2014-2015



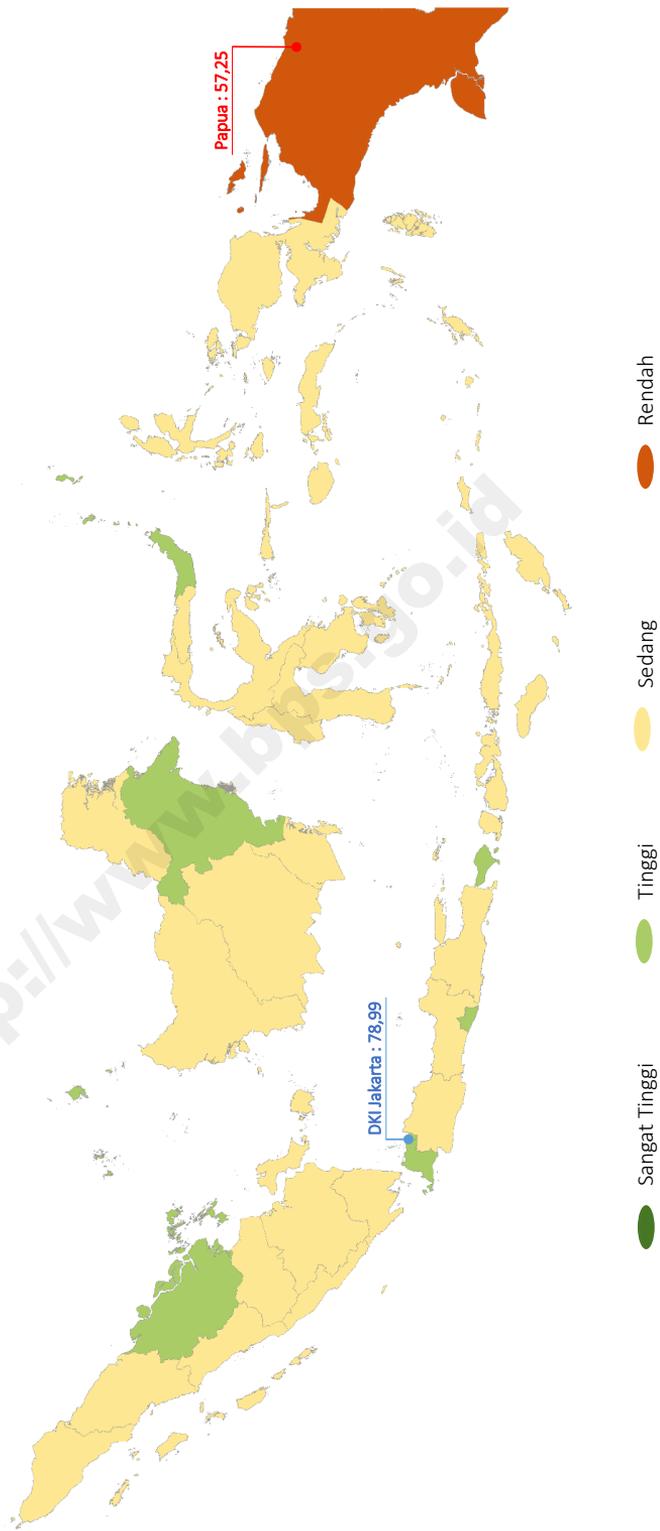
Sumber : Badan Pusat Statistik

Disisi lain, terdapat provinsi yang mengalami perlambatan dalam pembangunan manusia jika dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Kalimantan Utara mengalami perlambatan dalam pembangunan manusia di periode 2014-2015 dimana pertumbuhannya hanya sekitar 0,17 persen. Pertumbuhan pada periode 2013-2014 mencapai 0,96 persen. Hal ini disebabkan oleh seluruh komponen dari IPM mengalami perlambatan. Pertumbuhan pada dimensi kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, AHH meningkat sebesar 0,14 persen namun pada tahun 2015 peningkatan AHH hanya sebesar 0,06 persen. Dimensi pendidikan juga mengalami hal yang sama. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2015 tidak begitu signifikan. Kenaikan pada indikator RLS dan HLS masing-masing sebesar 0,12 persen dan 0,16 persen saja.

"Status Pembangunan Manusia di Provinsi Membaik"

Jika dilihat secara spasial (Gambar 2.9), Indonesia secara garis besar terbagi menjadi lima pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Gugusan Pulau Jawa Bali Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Gugusan Kepulauan Maluku dan Papua. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang sudah mencapai kategori "Tinggi" yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sedangkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera masih berada kategori "Sedang". Pada tahun 2015, gugusan Pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara memiliki empat provinsi yang pembangunan manusianya sudah berada pada kategori "Tinggi", yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali, sedangkan provinsi lainnya masih berada pada kategori "Sedang". Pulau Kalimantan memiliki satu provinsi dengan kategori tinggi, yaitu Kalimantan Timur sedangkan di Sulawesi hanya Provinsi Sulawesi Utara saja yang masuk dalam kategori ini. Namun sayang sekali, provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua belum ada yang masuk kedalam kategori "Tinggi".

Gambar 2.9. Peta IPM Provinsi di Indonesia, 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.2. Status Pembangunan Manusia di Provinsi, 2015

Rendah (1)	Sedang (2)	Tinggi (3)
Papua	Aceh	Riau
	Sumatera Utara	Kepulauan Riau
	Sumatera Barat	DKI Jakarta
	Jambi	DI Yogyakarta
	Sumatera Selatan	Banten
	Bengkulu	Bali
	Lampung	Kalimantan Timur
	Kep. Bangka Belitung	Sulawesi Utara
	Jawa Barat	
	Jawa Tengah	
	Jawa Timur	
	Nusa Tenggara Barat	
	Nusa Tenggara Timur	
	Kalimantan Barat	
	Kalimantan Tengah	
	Kalimantan Selatan	
	Kalimantan Utara	
	Sulawesi Tengah	
	Sulawesi Selatan	
	Sulawesi Tenggara	
	Gorontalo	
	Sulawesi Barat	
	Maluku	
	Maluku Utara	
	Papua Barat	

Sumber : Badan Pusat Statistik

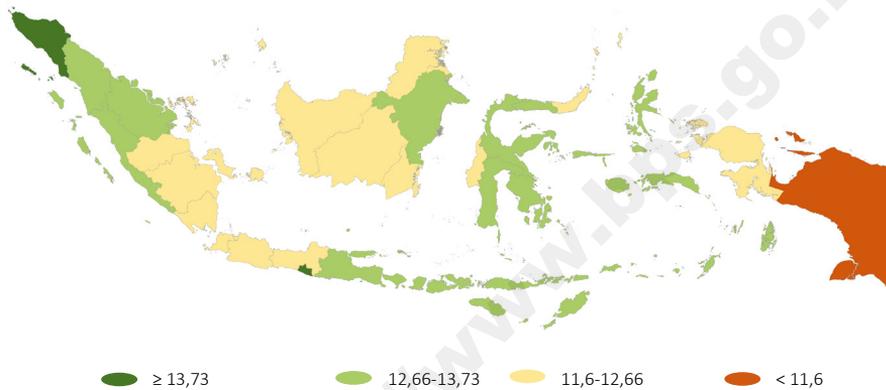
Pada tahun 2015 terdapat 8 Provinsi yang telah mencapai kategori "Tinggi" dalam pembangunan manusia yakni Provinsi Riau, Kep. Riau, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, 25 provinsi di Indonesia beradapada kategori "Sedang" dan terdapat satu provinsi yang masih di level "Rendah", yaitu Provinsi Papua.

Berbicara mengenai status pembangunan manusia, perubahan status pembangunan manusia merupakan hal yang dinantikan. Pada tahun 2015 ini, perubahan status terjadi di dua provinsi, yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Utara. Kedua provinsi ini akhirnya masuk dalam kategori "Tinggi" dalam pembangunan manusia setelah lima tahun berturut-turut dengan status "Sedang". Provinsi Banten akhirnya berhasil

2015 yaitu sebesar 0,27 persen. Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan kecepatan lebih dari tiga kali lipat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 0,25 persen. Berbanding terbalik dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan. Pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan angka harapan hidup saat lahir hingga 0,14 persen, namun pada tahun 2015 peningkatannya hanya sebesar 0,04 persen.

Pada level provinsi, kondisi pendidikan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan nasional. Seluruh provinsi mengalami kenaikan capaian baik angka harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah. Pertumbuhan di level provinsi untuk angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pun tidak jauh berbeda kondisinya dengan level nasional.

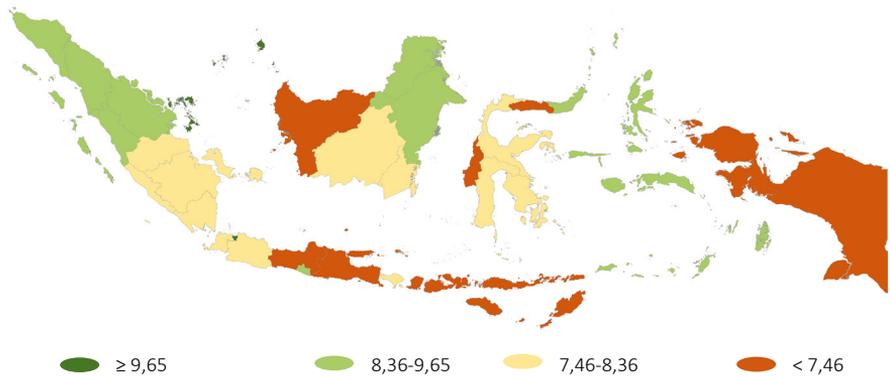
Gambar 2.11. Peta Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi, 2015 (tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka harapan lama sekolah tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian sebesar 15,03 tahun, sedangkan Provinsi Papua memiliki capaian angka harapan lama sekolah terendah dengan capaian sebesar 9,95 tahun. Pertumbuhan angka harapan lama sekolah tahun 2014-2015 di level provinsi cukup beragam. Sebagian besar provinsi mengalami perlambatan dalam capaian angka harapan lama sekolah. Hanya 12 provinsi saja yang mengalami percepatan dalam capaian angka harapan lama sekolah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Dari 12 provinsi tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh paling cepat dibandingkan 11 provinsi lainnya dengan pertumbuhan sebesar 3,76 persen.

Gambar 2.12. Peta Rata-rata Lama Sekolah Provinsi, 2015

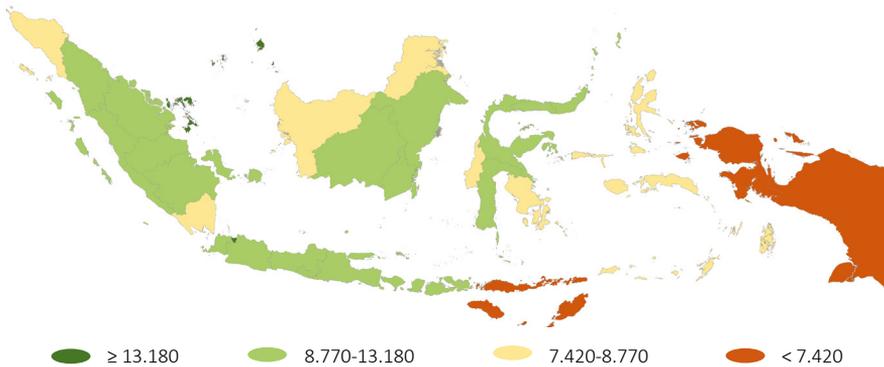


Sumber : Badan Pusat Statistik

Indikator kedua yaitu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 10,70 tahun. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator output pendidikan. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat kegiatan lainnya sehingga Provinsi DKI Jakarta menjadi kantung penduduk dengan pendidikan tinggi. Inilah yang menyebabkan rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta menjadi yang tertinggi. Sementara itu, provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Papua sebesar 5,99 tahun. Namun demikian, rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tumbuh paling cepat dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini cukup wajar karena mengingat lebih mudah meningkatkan capaian pada daerah-daerah yang masih rendah dibandingkan daerah-daerah dengan capaian tinggi. Provinsi Papua tumbuh sebesar 3,99 persen, jauh melesat jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional.

Fenomena yang terjadi pada angka harapan lama sekolah tidak terjadi pada rata-rata lama sekolah. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah di sebagian provinsi mengalami percepatan, sebagian lainnya mengalami perlambatan. Salah satu provinsi yang mengalami percepatan dalam pencapaian rata-rata lama sekolah adalah Provinsi Papua. Pada tahun 2015 kecepatan rata-rata lama sekolah Provinsi Papua meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 0,35 persen. Provinsi Kep. Riau menjadi provinsi dengan pertumbuhan terlambat pada tahun 2015, yaitu sebesar 0,10 persen saja.

**Gambar 2.13. Peta Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Provinsi, 2015
(Ribu Rupiah/Tahun)**



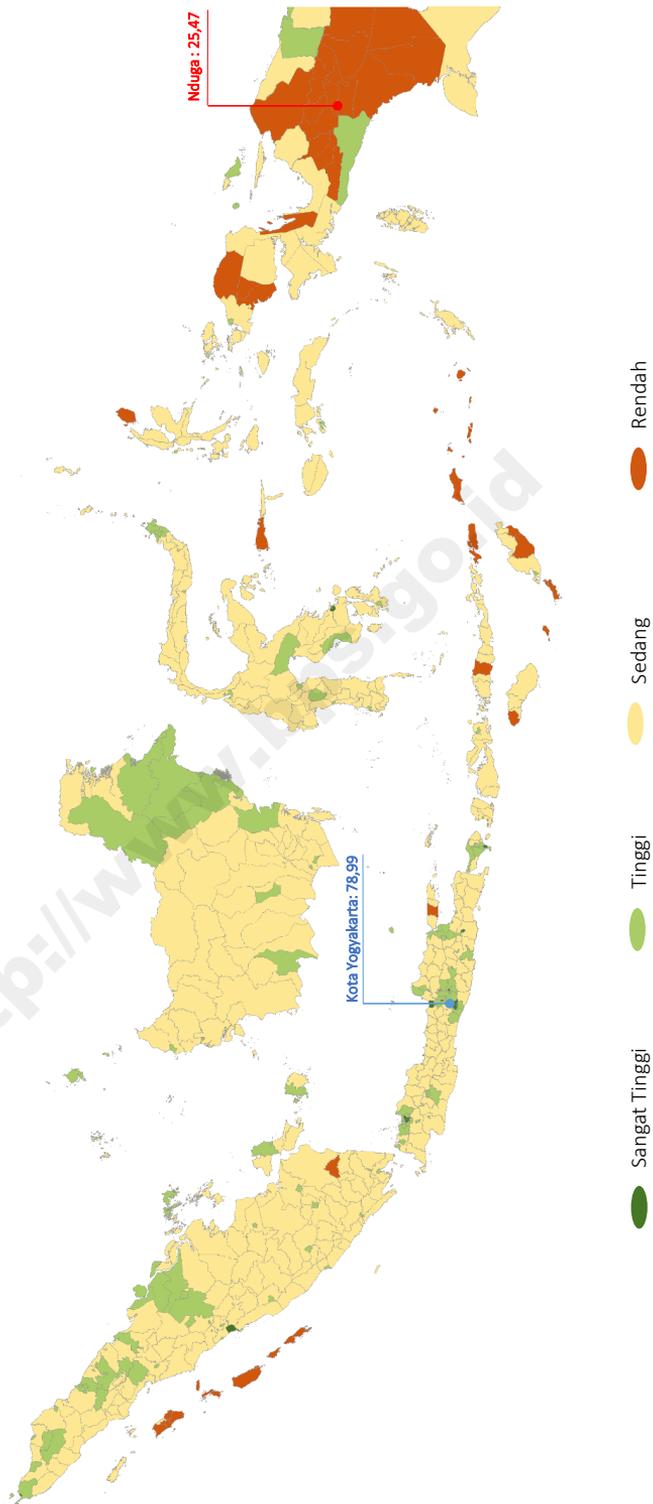
Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi yaitu sebesar Rp 17.075.000 per tahun. Kembali lagi, Provinsi Papua menempati posisi terendah dengan capaian sebesar Rp 6.469.000 per tahun. Berbeda dengan ketiga indikator lainnya, pengeluaran per kapita disesuaikan di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan pertumbuhan tercepat pada periode 2014-2015 yang tumbuh sebesar 3,71 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan pengeluaran perkapita Provinsi Aceh mengalami peningkatan paling cepat di antara 33 provinsi lainnya. Pertumbuhan pengeluaran per kapita di provinsi ini sebesar 0,10 persen pada tahun 2014, sedangkan pada 2015 menjadi 2,84 persen, atau meningkat 27 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Seperti halnya capaian di Provinsi, capaian IPM di kabupaten/kota sangat beragam. Sebagian besar (64,01 persen) kabupaten/kota di Indonesia sudah berada pada kategori "Sedang", 25,68 persen pada kategori "Tinggi", 7,98 persen pada kategori "Rendah", dan 2,33 persen pada kategori "Sangat Tinggi". Capaian tertinggi di level kabupaten/kota ditempati oleh Kota Yogyakarta dengan IPM sebesar 84,56 pada tahun 2015. Sementara capaian terendah ditempati oleh Kabupaten Nduga di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 25,47 (Gambar 2.14).

Gambar 2.14. Peta IPM Kabupaten/Kota di Indonesia, 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.4. 12 Kabupaten/Kota dengan Status Pembangunan Manusia “Sangat Tinggi”, 2015

Provinsi	IPM
(1)	(2)
Kota Yogyakarta	84,56
Kota Jakarta Selatan	83,37
Kota Banda Aceh	83,25
Kota Denpasar	82,24
Kota Kendari	81,43
Sleman	81,20
Kota Salatiga	80,96
Kota Jakarta Timur	80,73
Kota Padang	80,36
Kota Semarang	80,23
Kota Surakarta	80,14
Kota Malang	80,05

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari status pembangunan manusianya, terdapat 12 kabupaten/kota yang sudah berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Selain itu, dari kedua belas kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori “Sangat Tinggi”, hanya terdapat satu kabupaten saja yaitu Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta) sedangkan sisanya berstatus Kota. Meskipun berstatus kabupaten, Sleman memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan input pendidikan yang lebih baik dari Kota Malang yang memang merupakan kota pendidikan. Hal ini terlihat dari angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sleman (15,77 tahun) lebih besar dari Kota Malang (15,23 tahun).

Selain kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia berkategori “Sangat Tinggi”, terdapat 132 Kabupaten/kota yang sudah mencapai kategori “tinggi” (Lihat Lampiran 6) dan 329 kabupaten/kota sudah berada pada posisi “sedang”. Namun masih ada kabupaten/kota yang masih berada pada kategori “rendah” dalam pembangunan manusianya yaitu sebanyak 41 kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota ini berada di luar Pulau Jawa. Secara spasial, Pulau Jawa masih menjawarai dalam pembangunan manusia di Indonesia. Sebagian besar kabupaten/kota yang sudah mencapai pembangunan manusia berkategori “sangat tinggi” berada di Pulau Jawa. Di sisi lain, sebagian besar kabupaten/kota yang masuk pada kategori “Rendah” berasal dari provinsi paling timur Indonesia.

Sebagaimana halnya di tingkat provinsi, sebagian kabupaten/kota juga mengalami perubahan status. Terdapat sebelas kabupaten yang berhasil meninggalkan status “Rendah” di tahun 2015 dan berubah status menjadi “Sedang”. Seperti terlihat dalam Tabel 2.5. kabupaten tersebut menyebar di seluruh wilayah. Hal ini menjadi sinyal positif adanya pemerataan pembangunan manusia antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur dan antara kabupaten yang telah lama berdiri dengan kabupaten pemekaran. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Pesisir Barat merupakan kabupaten baru atau kabupaten hasil pemekaran. Sebagai catatan, hal ini merupakan sebuah prestasi karena dalam jangka waktu tiga tahun saja, ketiga kabupaten ini berhasil menaikkan status pembangunan manusianya menjadi “Sedang”.

Selain itu, terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang kini sudah berstatus “Tinggi”, dimana pada tahun sebelumnya masih berstatus “Sedang”. Salah satu Kabupaten/kota yang mengalami perubahan status tersebut adalah Kabupaten Bandung di Jawa Barat yang memiliki pertumbuhan pembangunan manusia tercepat. Kabupaten Bandung berhasil menyalip dua belas kabupaten lainnya dengan pertumbuhan sebesar 1,43 persen pada tahun 2015.

Tabel 2.5. Perubahan Status di Kabupaten/Kota dari tahun 2014 ke 2015

Rendah-Sedang	Sedang-Tinggi	Tinggi-Sangat Tinggi
(1)	(2)	(3)
Tanjung Jabung Timur	Pidie Jaya	Kota Padang
Penukal Abab Lematang Ilir	Bangka	Kota Surakarta
Pesisir Barat	Belitung	Kota Salatiga
Belu	Bandung	Kota Semarang
Manggarai Barat	Jepara	Kota Malang
Sumba Tengah	Tulungagung	
Kayong Utara	Tangerang	
Maluku Tenggara Barat	Buleleng	
Kepulauan Aru	Kota Singkawang	
Seram Bagian Timur	Pasir	
Supiori	Enrekang	
	Luwu Timur	
	Jayapura	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perubahan status yang paling menggembirakan terjadi pada lima wilayah yang berhasil hijrah dari status pembangunan “Tinggi” ke “Sangat Tinggi”. Kelima kabupaten/kota ini yaitu Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Malang. Sayangnya, semua wilayah tersebut berstatus kota dan tidak ada satupun kabupaten yang mendapatkan prestasi yang sama. Kelima kota yang berhasil hijrah ini memang memiliki keunggulan masing-masing. Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Malang merupakan kota pendidikan dengan capaian pendidikan yang tinggi. Sedangkan Kota Semarang merupakan pusat ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tak kalah uniknya, Kota Padang pun merupakan sentra perekonomian dan juga merupakan pusat pendidikan dan kesehatan serta kota seni dan budaya.

Dalam menganalisis IPM, hal yang menarik untuk diangkat adalah kecepatan pertumbuhannya. Pada beberapa kasus, wilayah yang memiliki IPM rendah justru terkadang menunjukkan prestasi yang baik. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa kabupaten yang tertera pada Tabel 2.4 yang memiliki predikat sebagai 10 (sepuluh) “top movers” di tahun 2015. Dari sepuluh besar kabupaten/kota dengan pertumbuhan IPM tertinggi tidak semuanya berada di Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak menutup kemungkinan konvergensi wilayah dapat terwujud dengan adanya perbaikan pembangunan manusia di Wilayah Timur yang dapat mengejar ketertinggalannya.

Tabel 2.6. 10 Kabupaten/Kota dengan Pertumbuhan Tertinggi (2014-2015)

Kabupaten/Kota (1)	Pertumbuhan (%) (2)
Puncak	3,59
Pegunungan Bintang	3,12
Kayong Utara	2,69
Banjarnegara	2,50
Barito Selatan	2,50
Lampung Selatan	2,31
Manokwari Selatan	2,30
Pati	2,28
Batang	2,17
Pemalang	2,17

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan tertinggi di level kabupaten/kota tahun 2015 yaitu Kabupaten Puncak di Provinsi Papua dengan pertumbuhan sebesar 3,59 persen, dimana capaian IPM Kabupaten Puncak pada tahun 2015 yaitu sebesar 39,41. Capaian IPM di Kabupaten Puncak masih tergolong kedalam kategori rendah. Sebaliknya, Kota Manado mengalami perlambatan dalam pembangunan manusia dengan pertumbuhan IPM hanya 0,07 persen di tahun 2015. Hal ini wajar terjadi karena capaian pembangunan manusia di wilayah ini sudah masuk kedalam kategori tinggi (77,32). Fenomena ini menjelaskan bahwa semakin tinggi capaian pembangunan manusia maka kecepatan pembangunan manusianya cenderung semakin melambat, tetapi jika semakin rendah capaian pembangunan manusia suatu wilayah, kecepatan pembangunan manusianya cenderung semakin cepat.

“Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Meningkat di Semua Komponen”

Angka harapan hidup saat lahir tahun 2015 di kabupaten/kota cukup beragam. Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah memiliki angka harapan hidup saat lahir paling tinggi yaitu sebesar 77,46 sementara Kabupaten Nduga di Papua menempati posisi terbawah dengan angka harapan hidup saat lahir sebesar 53,60. Pertumbuhan angka harapan hidup di kedua kabupaten tersebut relatif tidak mengalami perubahan. Kondisi ini umum terjadi pada semua wilayah mengingat keterkaitan multi-faktor yang dapat mempengaruhi harapan hidup saat lahir seseorang, sehingga perubahan yang signifikan dapat terjadi hanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Adapun pertumbuhan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni yang berada di Papua Barat dengan pertumbuhan hanya sebesar 1,20 persen.

Berbeda dengan dimensi kesehatan, capaian dimensi pendidikan menunjukkan keberagaman pada level kabupaten/kota. Rentang capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2015 antara 2,71 tahun hingga 17,01 tahun. Salah satu kabupaten/kota dari provinsi paling ujung barat Indonesia yaitu Kota Banda Aceh memiliki capaian tertinggi dalam angka harapan lama sekolah dengan capaian sebesar 17,01 tahun. Sedangkan capaian terendah berada di Kabupaten Nduga dengan angka harapan lama sekolah hanya sebesar 2,71 tahun. Kedua wilayah tersebut cenderung memiliki pertumbuhan yang relatif tidak signifikan tidak setinggi pertumbuhan harapan lama sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengalami lompatan yang cukup berarti dengan pertumbuhan sebesar 9,97 persen.

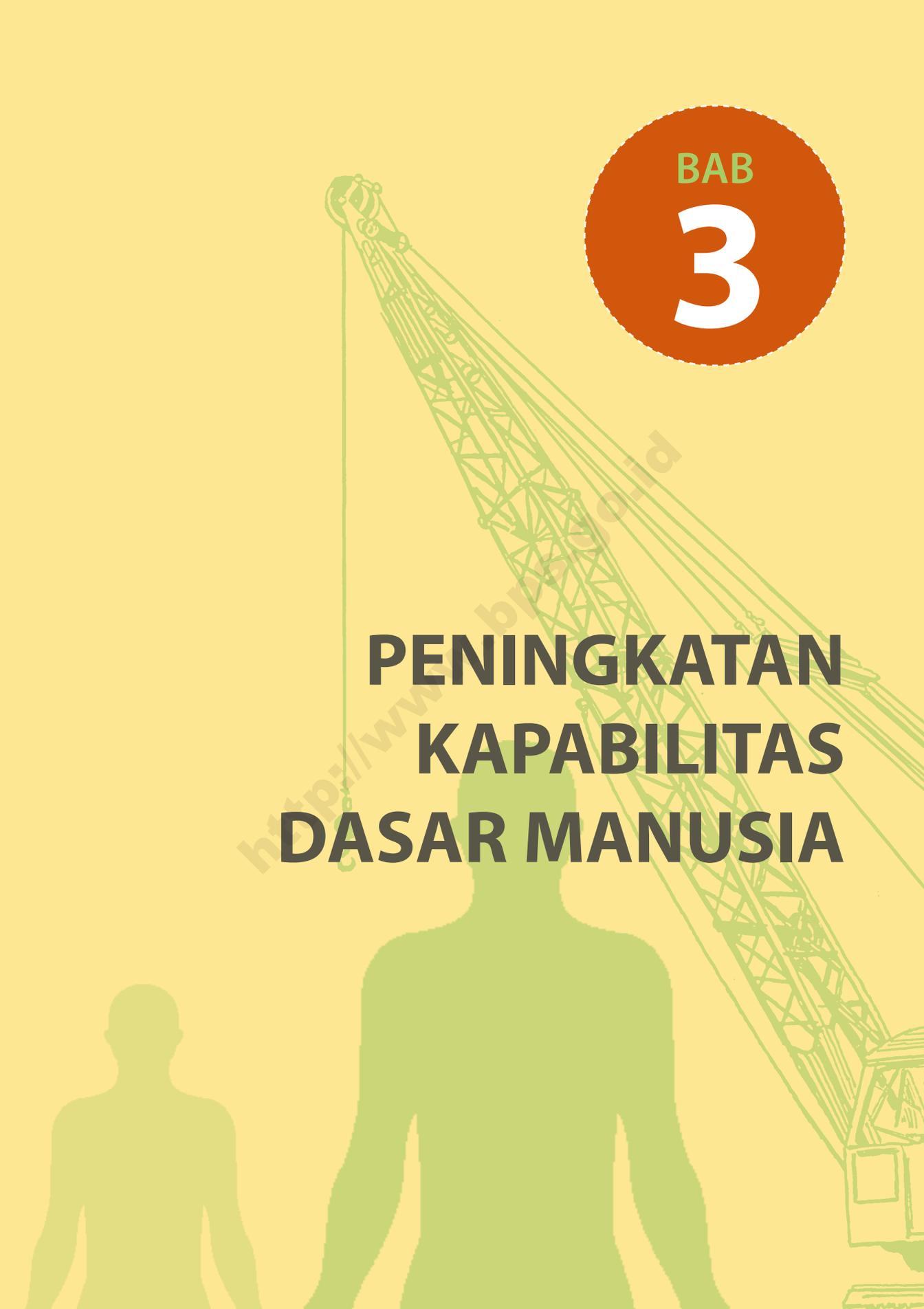
Pada indikator pendidikan lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah, Kota Banda Aceh kembali menempati posisi tertinggi dengan capaian 12,38 tahun. Artinya, di kota ini rata-rata penduduk yang berumur 25 tahun ke atas telah mampu menyelesaikan pendidikan menengah atas. Sangat kontras dengan penduduk di kategori yang sama di Kabupaten Nduga Papua yang belum mampu menyelesaikan pendidikan formalnya karena hanya mampu mengenyam pendidikan dalam 0,64 tahun saja. Dari sisi pertumbuhan, meskipun Kabupaten Puncak memiliki rata-rata lama sekolah penduduknya sebesar 1,61 tahun, indikator pendidikan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 12,56 persen dan menjadi kabupaten dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah tertinggi di tahun 2015.

Sementara itu, dimensi pembangunan manusia dari sisi ekonomi yang diwakili pengeluaran per kapita yang disesuaikan menempatkan Kota Jakarta Selatan di posisi tertinggi untuk level kabupaten/kota dengan capaian sebesar Rp 22.425.000 per tahun. Sangat jauh sekali dengan kondisi di Kabupaten Nduga yang rata-rata penduduknya hanya memiliki pengeluaran Rp 3.625.000 per tahun. Kondisi di Daratan Papua memang sangat memprihatinkan karena dari berbagai dimensi pembangunan masih tertinggal jauh. Namun, optimisme perubahan ke arah yang lebih baik selalu ada. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan tertinggi di Indonesia justru diraih Kota Manokwari Selatan (Papua Barat). Pertumbuhan pengeluaran per kapita di wilayah ini mencapai 10,34 persen pada tahun 2015.



BAB

3



**PENINGKATAN
KAPABILITAS
DASAR MANUSIA**

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Hal ini dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Pembangunan manusia yang masih terus berlangsung hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Selain itu, masih terdapat persoalan dasar yang harus diselesaikan pada masa mendatang.

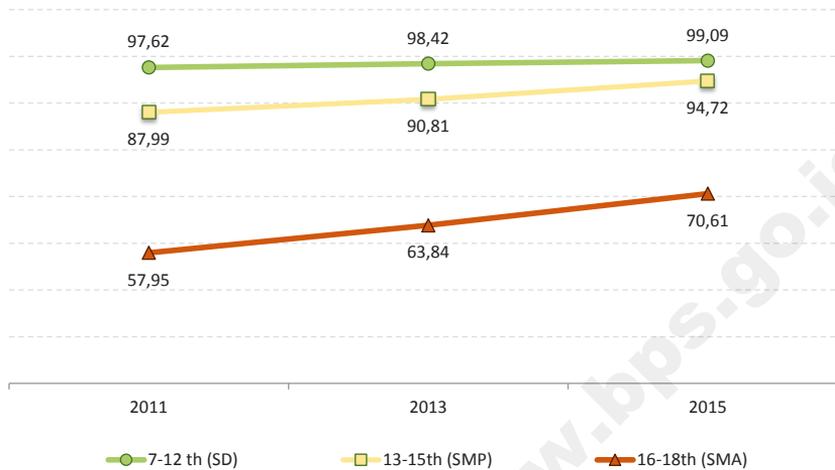
Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan, misalnya dengan memperluas cakupan pendidikan formal. Hingga saat ini, berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu program untuk memberantas buta aksara, menekan

angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS, serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dasar manusia Indonesia.

“Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Cukup Tinggi”

Gambar 3.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2015 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

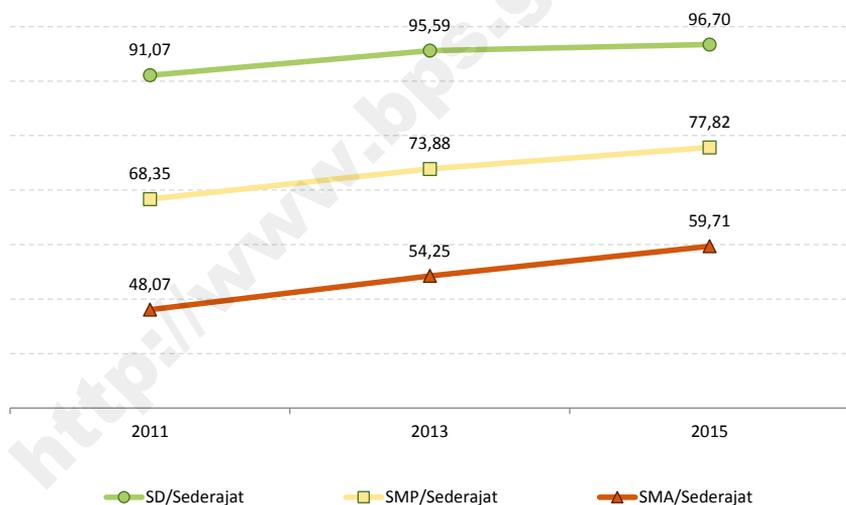
Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Secara umum, APS Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Hingga tahun 2015, APS pada jenjang usia 7-12 tahun mencatat hasil yang cukup tinggi.

Pada tahun 2015, APS pada jenjang usia 7-12 tahun telah mencapai 99,09 persen. Sementara itu, APS pada jenjang usia 13-15 tahun juga di atas 90 persen. Sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun masih 70 persen. Dengan melihat capaian APS pada saat ini, peningkatan APS pada jenjang usia 13-15 tahun masih perlu ditingkatkan karena undang-undang telah mengamankan agar warga negara dapat mengenyam pendidikan dasar selama 9 tahun.

“Kelompok Usia SMP/Sederajat yang Tidak Bersekolah Masih Tinggi”

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Misalnya, APS pada jenjang usia 7-12 mengabaikan informasi anak berusia 12 tahun yang bersekolah pada kelas VII. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jejang pendidikan, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) lebih relevan. Secara umum, APM Indonesia untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2015. Hingga tahun 2015, capaian APM SD telah mencapai 96,70 persen. Sementara itu, APM SMP hanya sebesar 77,82 persen yang memberikan gambaran bahwa lebih dari seperlima anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP.

Gambar 3.2. Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia, 2011-2015 (Persen)



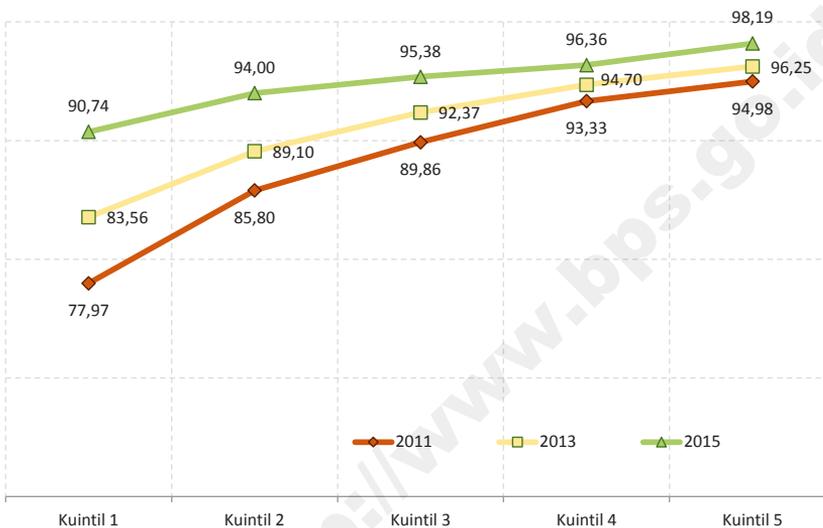
Sumber : Badan Pusat Statistik

Perkembangan APM SD terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga 2015. Pada periode 2013 hingga 2015, perkembangan APM SD tidak secepat apabila dibandingkan dengan periode 2011-2013. Hal ini dapat dimaklumi karena APM SD hampir mencapai 100 persen. Sementara itu, perkembangan APM SMP cukup signifikan selama periode 2011 hingga 2015. Selama periode tersebut, APM SMP meningkat sekitar 10 persen. Meskipun demikian, capaian APM SMP pada tahun 2015 masih menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP belum dirasakan oleh seluruh anak usia 13-15 tahun. Oleh karena itu, perlu program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dirasakan oleh semua masyarakat.

“Pendidikan Formal Belum Dirasakan oleh Semua Kalangan”

Bergulirnya berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pemerataan pendidikan masyarakat. Namun pada kenyataannya, belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk miskin. Keterbatasan akses pendidikan bagi penduduk miskin menyebabkan tingkat partisipasi sekolah pada kelompok ini masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan berbagai terobosan program pendidikan agar masyarakat kalangan bawah dapat menikmati pendidikan dasar secara utuh.

Gambar 3.3. APS 13-15 tahun Indonesia menurut Kuintil Pengeluaran 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

Penduduk yang dikelompokkan menurut pengeluaran dapat memberikan gambaran mengenai akses terhadap pendidikan pada kelompok penduduk miskin. Apabila dilihat distribusinya, masih terdapat kesenjangan capaian APS antarkelompok pengeluaran. Kelompok penduduk dengan 20 persen pengeluaran tertinggi cenderung memiliki APS 13-15 lebih tinggi dibanding kelompok penduduk dengan 20 persen pengeluaran terendah. Meskipun demikian, selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2015, partisipasi sekolah pada penduduk golongan bawah semakin meningkat. Pada tahun 2015, APS 13-15 pada kelompok penduduk dengan 20 persen pengeluaran terendah telah mencapai 90,74 persen. Apabila program-program pemerintah terus menyentuh penduduk golongan ini, partisipasi pendidikan dapat meningkat pada masa yang akan datang.

Tabel 3.1. Kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah Antar Provinsi, 2011-2015

Kelompok Umur	Tahun	Maksimum	Minimum	10 Provinsi dengan APS Terendah
7-12 tahun	2011	DIY (99,43)	Papua (72,63)	Papua, Papua Barat, Sulbar, NTT, Kalbar, Gorontalo, Sulteng, Maluku Utara, Sulsel, Kep. Bangka Belitung
	2013	DIY (99,96)	Papua (75,23)	Papua, Sulbar, Papua Barat, Kalbar, NTT, Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara, Sultra, Kep. Babel
	2015	DIY (99,9)	Papua (81,04)	Papua, Papua Barat, Sulbar, Sulteng, NTT, Kalbar, Kaltara, Gorontalo, Riau, Sulsel
13-15 tahun	2011	DIY (97,66)	Papua (70,42)	Papua, Sulbar, Kalsel, Gorontalo, Kalbar, Kep. Babel, Sulsel, Sulteng, Kalteng, Jawa Barat
	2013	DIY (96,79)	Papua (72,64)	Papua, Sulbar, Kep. Babel, Kalbar, Kalteng, Gorontalo, Kalsel, Sulteng, Sultra, Jawa Barat
	2015	DIY (99,68)	Papua (78,14)	Papua, Sulbar, Gorontalo, Sulteng, Kep. Babel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Kalteng, Jawa Barat
16-18 tahun	2011	DIY (75,6)	Papua (49,69)	Papua, Kep. Babel, Kalbar, Jawa Barat, Kalsel, Jawa Tengah, Kalteng, Jawa Timur, Lampung, Sumsel
	2013	DIY (81,41)	Papua (53,19)	Papua, Kep. Babel, Kalbar, Kalteng, Sulbar, Jawa Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, Kalsel, Sumsel
	2015	DIY (86,78)	Papua (61,96)	Papua, Jawa Barat, Kalteng, Kep. Babel, Banten, Kalbar, Sulbar, Kalsel, Jawa Tengah, Sumsel

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan capaian APS juga terjadi pada level provinsi. Selama periode 2011-2015, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan capaian APS tertinggi dan terendah pada semua kelompok umur. Selama periode tersebut, kesenjangan capaian APS antara Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Papua semakin kecil, baik pada kelompok 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun 16-18 tahun.

Sesuai dengan amanah undang-undang, wajib belajar 9 tahun ditempuh pada jenjang usia 7 tahun hingga 15 tahun. Pada jenjang usia 7-12 tahun, perkembangan APS di Provinsi Papua semakin baik. Hingga tahun 2015, APS 7-12 di Provinsi Papua telah mencapai 81,04 persen, meningkat 8,41 persen dibanding tahun 2011. Sementara itu, APS 7-12 di Provinsi DI Yogyakarta relatif stagnan mendekati 100 persen. Pada jenjang usia 13-15 tahun, peningkatan APS di Provinsi Papua cukup menggembirakan tetapi hingga tahun 2015 capaian APS masih di bawah 80 persen. Sementara di Provinsi DI Yogyakarta sudah mendekati 100 persen.

Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Salah satu komponen dalam penentuan kualitas hidup manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang (Sumber: Renstra Kemenkes 2015-2019). Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang produktif secara sosial ekonomis. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Hal ini seperti tercantum dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025.

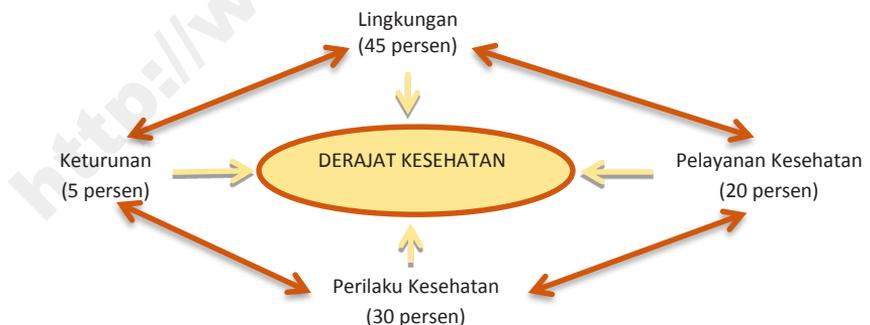
Berdasarkan Teori Henrik L. Blum (Notoadmodjo, 2007), derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat menunjukkan tingkat kematian yang dilihat dari sisi harapan hidupnya. Pada tahun 2015 capaian AHH Indonesia sebesar 70,78 tahun atau meningkat hanya 0,19 poin dibandingkan tahun 2014. Sementara jika dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya, AHH tahun 2015 meningkat sebesar 0,97 poin (AHH tahun 2010 sebesar 69,81 tahun).

Sementara itu morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Artinya semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menunjukkan masyarakat rentan terhadap berbagai

macam penyakit yang timbul akibat lemahnya daya resistensinya. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada usia harapan hidup dan tingkat mortalitas. Berdasarkan data Susenas tahun 2015, angka morbiditas penduduk di Indonesia adalah 16,15 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar sebesar 14,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Indonesia sedikit menurun dalam satu tahun terakhir. Adapun keluhan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi.

Berdasarkan teori Henrik L. Blum, tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sedangkan perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan kependudukan/keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan manusia (Kasnodihardjo dkk, 1997). Berikut ilustrasi mengenai konsep Henrik L. Blum mengenai hubungan antara derajat kesehatan dengan keempat faktor determinannya.

Gambar 3.4. Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)



Sumber : Kementerian Kesehatan RI

"Kondisi Lingkungan Belum Sepenuhnya Sehat"

Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Lingkungan memberikan peran yang paling penting dan berpengaruh positif terhadap terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik. Lingkungan juga merupakan faktor yang berpengaruh

dalam penularan dan munculnya suatu penyakit. Oleh sebab itu harus diupayakan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dari masa ke masa. Disamping itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan.

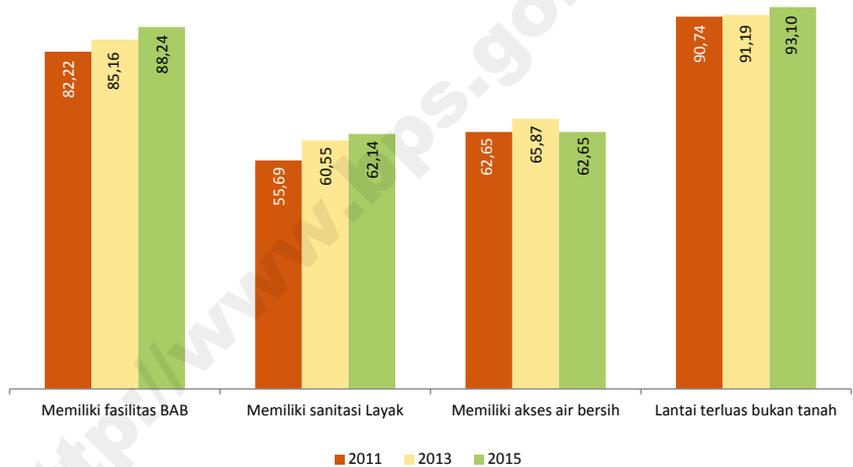
Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah kepemilikan tempat buang air besar, kondisi sanitasi, dan akses terhadap air bersih, dan jenis lantai terluas. Berdasarkan data Susenas tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 88,26 persen rumah tangga Indonesia yang sudah memiliki tempat buang air besar. Dengan kata lain masih ada 11,77 persen rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki tempat buang air besar. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana terdapat 14,84 persen yang rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar.

Indikator lain adalah akses sanitasi layak yang merupakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan (dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik). Faktor sanitasi sangat penting karena masyarakat membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka fasilitas tersebut akan rentan dalam menularkan dan menumbuhkan penyakit. Pada tahun 2015 penduduk Indonesia yang sudah menikmati sanitasi layak hanya sebesar 62,14 persen. Artinya masih ada sekitar 37,86 persen penduduk Indonesia yang belum menggunakan fasilitas buang air dengan sanitasi layak. Namun demikian, penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi layak sudah mengalami peningkatan sebesar 2,63 persen dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 60,55 persen.

Sementara itu akses terhadap air bersih merupakan salah satu indikator yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dengan adanya pembangunan sarana air bersih di suatu wilayah/daerah, beberapa infeksi oleh mikrobakteria, misalnya kolera, desentri, thypus dan lainnya dapat dikurangi (Said, 1999). Namun demikian, suplai air bersih tersebut harus memenuhi standar kesehatan agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pada tahun 2015 masih terdapat 37,35 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum bersih. Artinya masih ada sekitar sepertiga rumah tangga di Indonesia yang rentan terhadap infeksi penyakit akibat mikrobakteria. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai penggunaan air bersih oleh masyarakat, sekaligus juga memberikan fasilitas air bersih yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Selain beberapa indikator lingkungan diatas, jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Lantai yang baik harus selalu kering (Achmadi, 2008). Syarat yang paling penting adalah tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah, karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Namun demikian, pada tahun 2015 masih terdapat 6,90 persen rumah tangga di Indonesia yang jenis lantai terluasnya adalah tanah, karena yang menggunakan lantai bukan tanah tercatat sebesar 93,10 persen. Hal ini juga terkait dengan tingkat kemiskinan penduduk. Oleh sebab itu peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang harus dilakukan karena juga berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Gambar 3.5. Indikator Lingkungan, 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

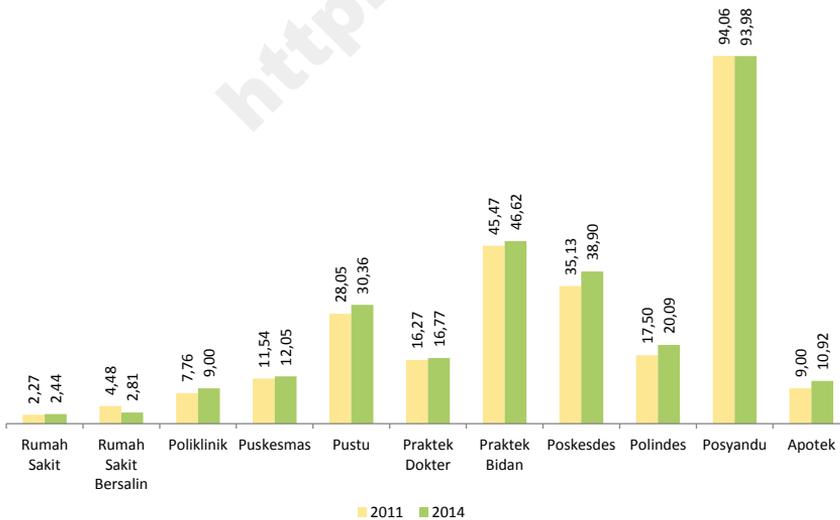
Dengan perkembangan berbagai indikator lingkungan diatas, maka secara umum kondisi lingkungan penduduk Indonesia belum sepenuhnya aman terhadap penularan penyakit. Khususnya untuk indikator sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih, capaian angka indikatornya masih jauh dari angka ideal. Oleh sebab itu upaya memperbaiki lingkungan menjadi lebih sehat menjadi suatu hal yang menjadi prioritas untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Tanpa lingkungan yang sehat, berbagai penyakit akan cepat muncul dan menular sehingga akan menambah angka morbiditas yang pada akhirnya akan mengurangi angka harapan hidup.

“Fasilitas Kesehatan Terus Meningkat”

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah pelayanan kesehatan. Indikator yang dapat mengukur pelayanan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Pemerintah sendiri telah menjamin penyediaan fasilitas kesehatan dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh sebab itu faktor kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus terus diupayakan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat. Akses terhadap fasilitas kesehatan ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas fasilitas kesehatan (Ridwan dan Saftarina, 2015).

Berdasarkan data Potensi Desa rata-rata jumlah fasilitas kesehatan meningkat selama periode 2011-2014, yang terlihat dari persentase desa yang memiliki fasilitas kesehatan namun masih belum menjangkau di semua desa di Indonesia (Gambar 3.6). Dibandingkan dengan fasilitas kesehatan lainnya, ketersediaan posyandu lebih merata hampir semua desa di Indonesia, namun persentase desa yang terdapat posyandu sedikit menurun yaitu dari 94,06 persen menjadi 93,98 persen. Selain Posyandu, praktek bidan juga cukup tinggi dibanding lainnya meskipun persentasenya masih dibawah 50 persen. Nampaknya pelayanan untuk balita dan ibu hamil lebih diupayakan merata hampir disemua desa.

Gambar 3.6. Persentase Desa Menurut Fasilitas Kesehatan, 2011 dan 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik

“Praktek Persalinan yang Aman Belum Merata”

Salah satu indikator dalam upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan bayi adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Hal ini diupayakan dalam rangka kesehatan reproduksi agar persalinan yang telah dilakukan oleh tenaga medis lebih aman dibandingkan oleh selain tenaga medis. Praktek persalinan yang aman menjadi salah satu faktor penentu keselamatan ibu dan bayi hingga pada akhirnya akan menurunkan resiko kematian keduanya.

Pemerintah Indonesia telah berupaya menurunkan angka kematian bayi, salah satunya melalui peningkatan pelayanan persalinan. Indikasinya terlihat dari persentase persalinan terakhir yang ditolong oleh tenaga medis memperlihatkan tren peningkatan dari tahun 2011 hingga 2015. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 91,51 kelahiran bayi telah dibantu oleh tenaga medis, meningkat 7,27 persen dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 85,31 persen (Tabel 3.3). Namun demikian masih terdapat 8,49 persen ibu melahirkan yang belum ditolong oleh tenaga medis dalam proses kelahirannya.

Tabel 3.2. Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis, 2011-2015

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Nasional
2011	90.88	71.93	81.25
2013	92.78	78.10	85.31
2015	96,78	85,25	91,51

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pola yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Akan tetapi masih terlihat adanya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dimana persentase persalinan yang aman di pedesaan masih lebih rendah dibanding perkotaan. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan tenaga medis yang masih kurang khususnya di wilayah pedesaan.

Selain persoalan ketersediaan fasilitas pelayanan, persoalan ekonomi juga menjadi kendala dalam memperoleh persalinan yang aman. Jika dilihat menurut tingkat ekonomi rumah tangga berdasar kelompok pengeluaran, terlihat bahwa masih terjadi kesenjangan persalinan aman untuk setiap kelompok pengeluaran. Pada kelompok penduduk miskin persentase persalinan aman paling rendah, sebaliknya pada penduduk yang pengeluarannya tinggi persentasenya semakin besar. Sisi positifnya

adalah kesenjangan tersebut semakin mengecil selama periode 2011-2015 (Gambar 3.7). Pada tahun 2011 kesenjangan persalinan yang aman antara penduduk pada kelompok termiskin dan terkaya sebesar 28,60 persen. Disparitas tersebut terus menurun hingga pada tahun 2015 menjadi 14,49 persen. Dalam jangka waktu empat tahun (2011-2015) pemerintah telah berhasil meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil agar mendapatkan persalinan yang aman.

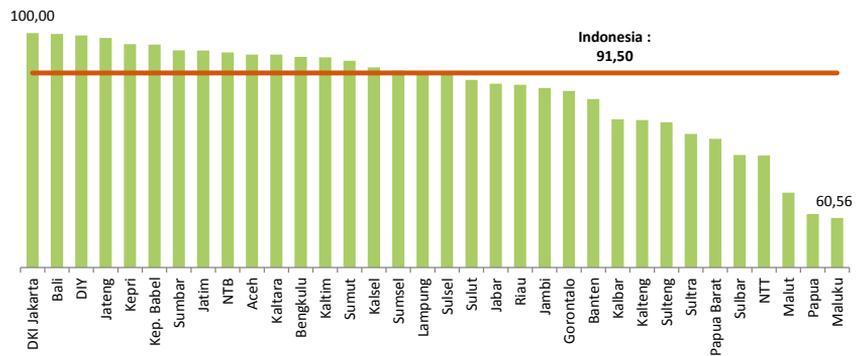
Gambar 3.7. Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis menurut Kuintil Pengeluaran, 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain disparitas antar kelompok pengeluaran, disparitas persalinan aman juga terjadi antar provinsi. Wilayah-wilayah yang berada di Indonesia Timur sebagian besar melakukan persalinan dengan tenaga medis dibawah angka nasional (Gambar 3.9). Hanya provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan yang angkanya diatas angka nasional. Sementara itu lima provinsi dengan angka persalinan aman yang tertinggi berturut-turut adalah DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Kepulauan Riau. Sementara provinsi dengan angka persalinan aman yang rendah adalah Maluku, Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Kesenjangan antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah sebesar 39,44 persen.

Gambar 3.8. Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis Menurut Provinsi, 2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

“Kesadaran terhadap Perilaku Sehat Masih Kurang”

Perilaku sehat sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dalam teori Blum, perilaku sehat menyumbang 30 persen dalam mengukur derajat kesehatan manusia. Salah satu contoh perilaku sehat adalah tidak merokok. Di Indonesia, menghindari merokok oleh sebagian penduduknya sepertinya sangat sulit dilakukan, khususnya penduduk laki-laki. Bahaya rokok bagi kesehatan sangat besar karena mengandung nikotin. Menurut Sue Armstrong (1991), nikotin merupakan bahan kimia yang tidak berwarna dan merupakan salah satu racun paling keras. Dalam jumlah besar, nikotin sangat berbahaya, yaitu antara 20 mg sampai 50 mg nikotin dapat menyebabkan terhentinya pernapasan. Selain nikotin, rokok juga mengandung karbon monoksida dan tar yang berbahaya bagi kesehatan (Mandagi, 1996). Tidak hanya kandungan zatnya, asap rokok juga berbahaya karena mengandung polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu seseorang yang merokok tidak hanya membahayakan dirinya namun juga orang-orang sekitarnya yang umum disebut perokok pasif.

Berdasarkan data Susenas 2015, penduduk Indonesia yang merokok sebesar 23,79 persen, dan sebagian besar merokok setiap hari. Angka merokok ini akan lebih besar di desa dibandingkan di kota. Nampaknya pola hidup sehat di kota sedikit lebih baik dibandingkan di desa (Tabel 3.3). Meskipun hanya kurang dari seperempat penduduk di Indonesia yang merokok, namun dampaknya tidak hanya pada penduduk yang merokok tetapi juga kepada penduduk disekitarnya.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Menurut Kebiasaan Merokok dan Wilayah, 2015

Wilayah	Merokok Setiap Hari	Merokok Tidak Setiap Hari	Tidak Merokok	Tidak Tahu	Total
Desa	22,72	2,33	74,26	0,69	100,00
Kota	20,31	2,26	76,98	0,45	100,00
Total	21,50	2,29	75,63	0,57	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dikhawatirkan dampak dari perilaku kebiasaan merokok penduduk Indonesia ini akan menular ke anak-anak. Menurut Jeanne (1996) biasanya orang mulai merokok karena orang lain merokok. Hal ini akan berdampak sangat cepat menyerang anak-anak, karena mencontoh orang disekelilingnya yaitu orang tua, saudara dan teman-temannya. Oleh sebab itu anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dari kebiasaan merokok ini agar mereka terhindar dari berbagai penyakit di kemudian hari. Salah satunya adalah regulasi yang ketat terhadap penggunaan rokok, sehingga penggunaan rokok agar lebih terawasi dan diminimalkan.

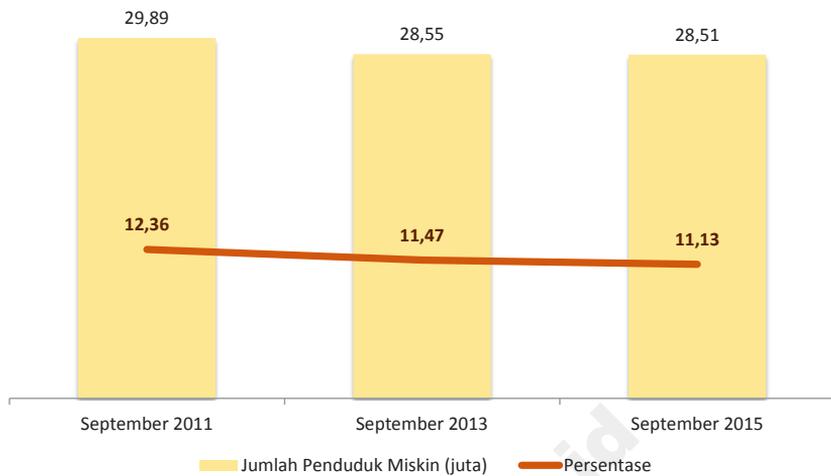
Tantangan di Bidang Ekonomi

"Kemiskinan Sulit Berkurang"

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Sayangnya menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Selama periode 2011 hingga 2015, sesungguhnya Indonesia telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari jumlah maupun persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang cenderung berkurang. Namun demikian, pergerakan kedua indikator tersebut dinilai cukup lamban, terlebih lagi jika melihat perbandingan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan yang masih terlihat sangat kontras. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 14,09 persen penduduk miskin di perdesaan dan hanya sekitar 8,22 persen yang berada di perkotaan.

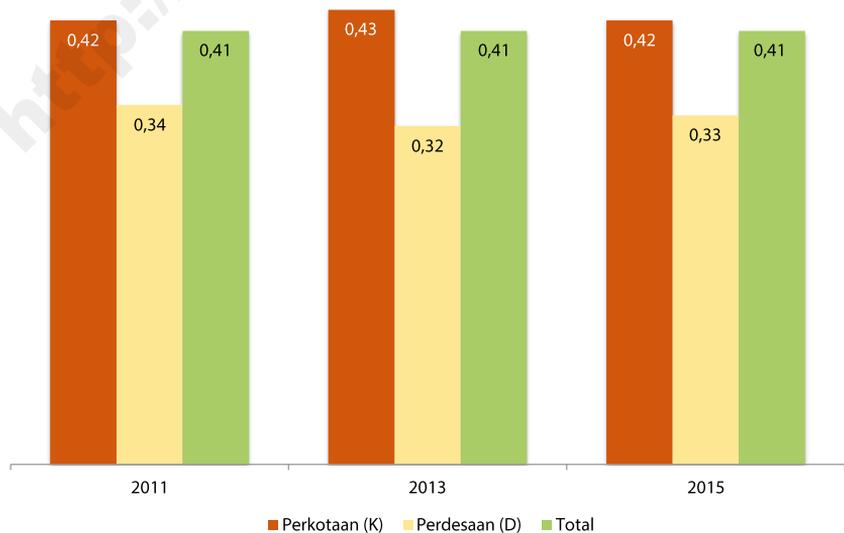
Gambar 3.9. Tren Kemiskinan di Indonesia, 2011-2015 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain karakteristik tersebut, lambatnya penurunan kemiskinan juga didukung dengan kondisi stagnan dalam ketimpangan pengeluaran penduduk yang dicerminkan oleh Gini Rasio. Perkembangan Gini Rasio Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 cukup memprihatinkan. Tren Gini Rasio cenderung tetap dengan ketimpangan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding wilayah perdesaan.

Gambar 3.10. Tren Gini Rasio Indonesia Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2011-2015



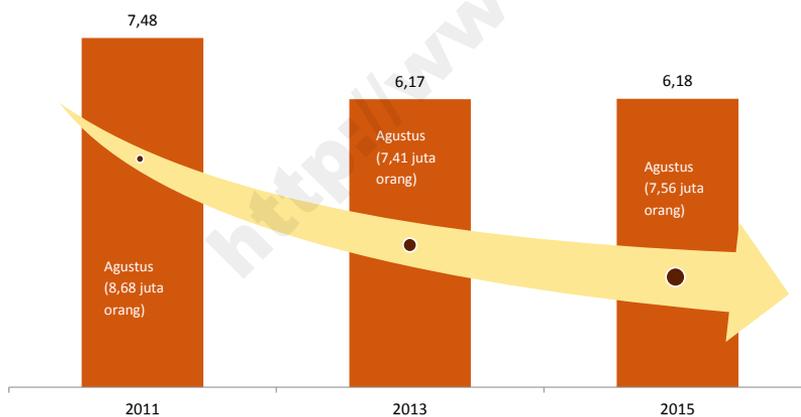
Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu menurut paradigma yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1989) dalam UNDP (1996), pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan salah satunya bergantung pada faktor ekonomi yang didalamnya terkandung makna adanya kesetaraan atau pemerataan (UNDP, 1996).

“Pengangguran Sedikit Meningkat”

Penurunan kemiskinan yang lambat pada tahun 2015 dibarengi dengan peningkatan pengangguran. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,18 persen sedikit lebih tinggi dari tahun 2013 yang mencapai 6,17. Kondisi ini cukup memprihatinkan mengingat kemiskinan dan pengangguran saling berkaitan satu sama lain. Pengangguran mengurangi pendapatan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sebaliknya, kemiskinan akan menjerat seseorang dalam lingkaran setan sehingga membatasi kapabilitas seseorang untuk menciptakan output yang bernilai ekonomi akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Gambar 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia, 2011-2015 (Persen)

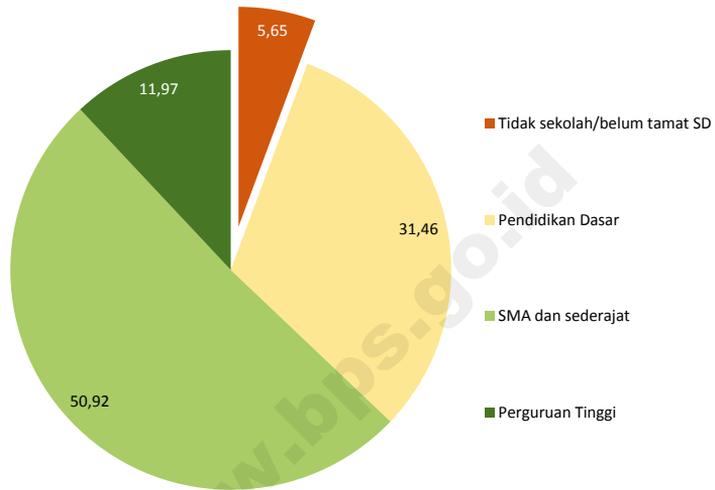


Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari 7,56 juta orang penganggur pada Agustus 2015, mayoritas penganggur berpendidikan di SMA atau sederajat. Hanya sedikit saja penganggur yang belum pernah sekolah atau belum tamat SD. Sementara penganggur yang pernah mengenyam bangku kuliah justru hampir 12 persen. Dengan melihat fenomena ini maka terlihat adanya *mismatch* atau ketidaksesuaian

antara profil lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan perusahaan. Sistem pendidikan perguruan tinggi dan pilihan jurusan seharusnya menyesuaikan kebutuhan, terlebih lagi tantangan dalam perekonomian global akan memperberat daya saing tenaga kerja dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Gambar 3.12. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015 (Persen)

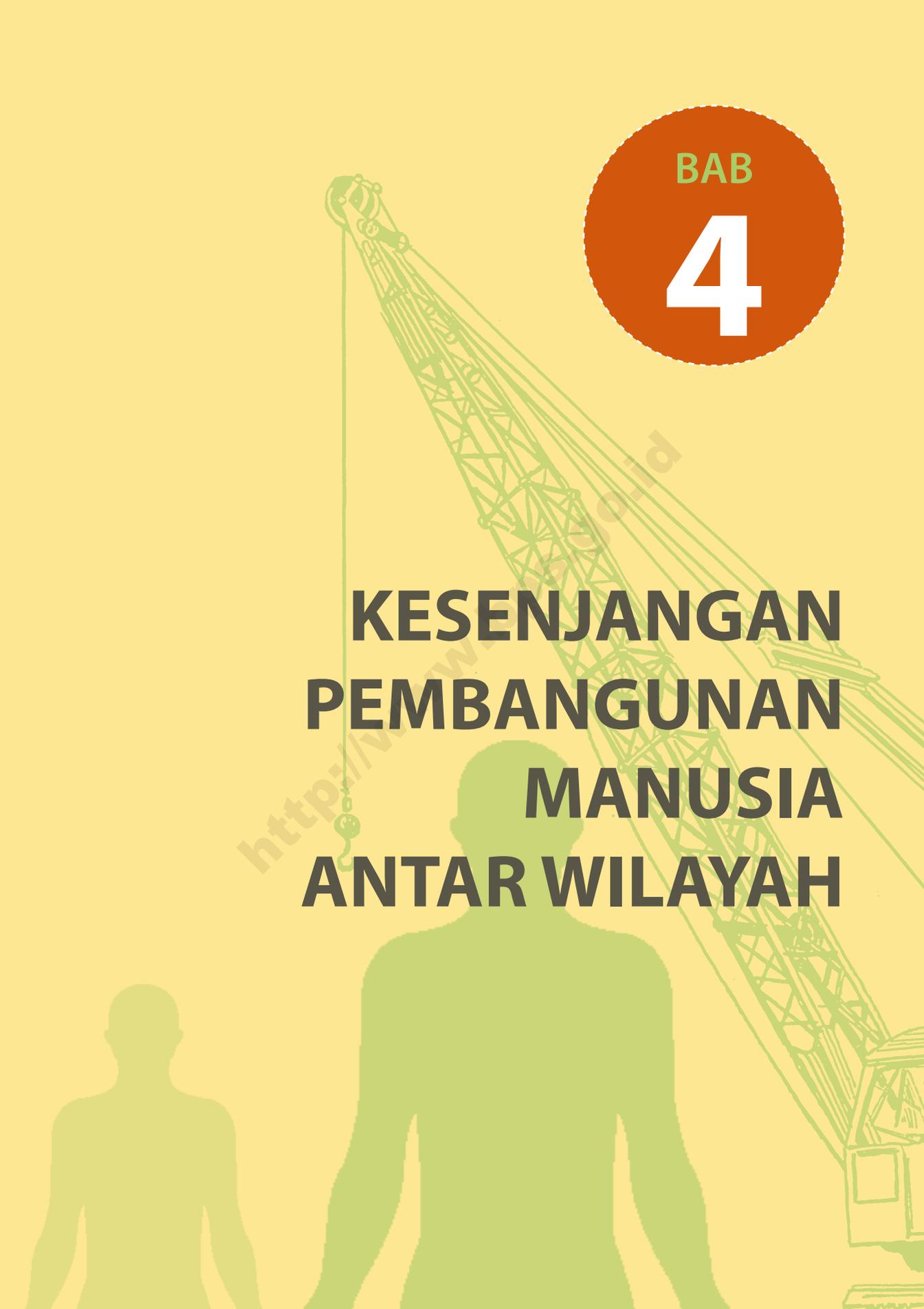


Sumber : Badan Pusat Statistik



BAB

4



**KESENJANGAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA
ANTAR WILAYAH**

Kesenjangan Pembangunan Manusia Antar Wilayah

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang menyebar dari 60 04' 30" Lintang Utara hingga 110 00' 36" Lintang Selatan dan 940 58' 21" hingga 1410 01' 10" Bujur Timur (Statistik Indonesia 2016). Seluruh pulau tersebut membentuk 514 kabupaten/kota dan bergabung menjadi 34 provinsi dengan ciri khas yang berbeda. Setiap daerah melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan entitas masing-masing. Pembangunan terus bergulir dari waktu ke waktu dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi. Namun, kemajuan pembangunan manusia yang berbeda telah melahirkan kesenjangan pembangunan. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya mengalami berbagai kesulitan dan akan membuat daerah atau kawasan tersebut semakin tertinggal dari daerah atau kawasan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi kesenjangan pembangunan termasuk pembangunan manusia, dimana pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

Kesenjangan pembangunan manusia antarprovinsi dan kabupaten/kota sangat menarik untuk dibahas. Dari sisi regional, masih terdapat provinsi dengan status pembangunan manusia "rendah", yaitu Provinsi Papua. Sementara pada level kabupaten/kota, masih terdapat kabupaten/kota yang bertatus "Rendah".

Kesenjangan Antar Provinsi

"Kesenjangan IPM antar Provinsi Sedikit Meningkat pada Tahun 2015"

Kecepatan pembangunan manusia setiap wilayah berbeda-beda sehingga muncul kesenjangan pembangunan manusia. Sampai dengan tahun 2015, kesenjangan pembangunan manusia antarprovinsi terlihat dari capaian Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua. Selama 2010 hingga 2014, perbedaan IPM kedua provinsi cenderung turun. Hal ini berarti kesenjangan antara provinsi cenderung mengecil. Namun, pada tahun 2015 kesenjangan IPM antara provinsi tertinggi dan terendah sedikit sedikit meningkat.

Gambar 4.1. Selisih IPM Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah, 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2015, IPM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 78,99. Provinsi dengan PDRB per kapita mencapai 136,4 juta (ADHK 2010) di tahun 2014 ini merupakan provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Sementara itu, IPM Provinsi Papua hanya 57,25 dan merupakan yang terendah di Indonesia dengan PDRB per kapita hanya 38,9 juta (ADHK 2010) di tahun 2014. Capaian IPM kedua provinsi berjarak 21,74 dengan perbedaan PDRB per kapita mencapai 3,5 kali lipat.

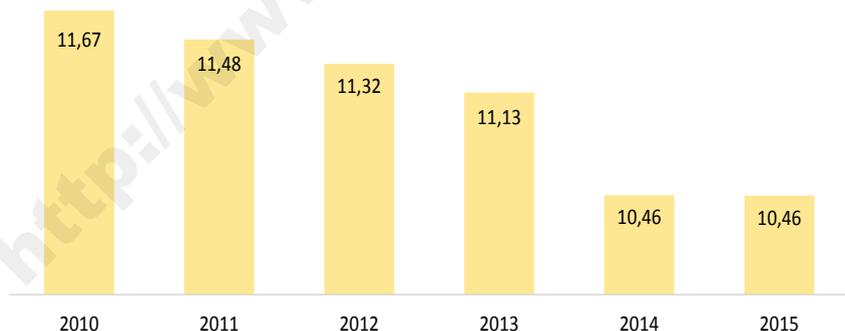
Peningkatan selisih IPM di tahun terakhir disebabkan oleh peningkatan IPM Provinsi DKI Jakarta lebih cepat dibandingkan peningkatan IPM Provinsi Papua. Pada tahun 2015, IPM Provinsi DKI Jakarta meningkat sebesar 0,60 poin. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95 persen pada tahun 2015 ini berhasil meningkatkan level IPM dari 78,39 menjadi 78,99. Sementara itu, IPM Provinsi Papua meningkat hanya 0,50 poin, yaitu dari 56,75 menjadi 57,25.

Kesenjangan pembangunan manusia di tingkat provinsi yang terjadi pada tahun 2015 setidaknya masih memberikan peluang untuk menuju arah perbaikan. Hal ini disebabkan karena level pembangunan manusia di Provinsi Papua masih tergolong rendah. Pada umumnya, daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang rendah berpeluang untuk meningkat lebih cepat dibanding daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang sudah tinggi. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila strategi pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia.

“Kesenjangan Kesehatan Antar Provinsi Semakin Kecil”

Kesehatan merupakan salah satu bagian vital dari kehidupan manusia. Kesehatan masyarakat Indonesia saat ini semakin membaik. Selain membaiknya tingkat kesehatan masyarakat, kesenjangan tingkat kesehatan antarprovinsi juga membaik. Hal ini terlihat dari tren selisih AHH selama 2010-2015 antara Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Sulawesi Barat yang cenderung menurun.

Gambar 4.2. Selisih AHH Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Harapan hidup saat lahir di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2015 telah mencapai 74,68 tahun. Provinsi dengan penduduk mencapai 3,68 juta jiwa pada tahun 2015 (proyeksi penduduk 2010-2035) merupakan provinsi dengan harapan hidup tertinggi di Indonesia. Sementara itu, provinsi dengan harapan hidup saat lahir paling rendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang hanya berpenduduk 1,82 juta jiwa pada tahun 2015 (proyeksi penduduk 2010-2035) ini memiliki angka harapan hidup saat lahir sebesar 64,22.

Perkembangan selisih angka harapan hidup yang selalu menurun dalam kurun waktu 2010-2015 menunjukkan bahwa kesenjangan sudah semakin berkurang, dimana provinsi dengan capaian terendah sudah bisa mengejar ketertinggalannya. Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, angka harapan hidup saat lahir di Provinsi Sulawesi Barat tumbuh 0,55 persen per tahun. Pertumbuhan ini cukup berbeda signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan di Provinsi DI Yogyakarta yang hanya berkisar 0,14 persen per tahun dalam kurun waktu tersebut.

Penyebab ketertinggalan Provinsi Sulawesi Barat di bidang kesehatan sebagian besar dikarenakan kurangnya fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, maupun posyandu. Selain itu, sanitasi dan ketersediaan air bersih juga menjadi penyumbang. Sanitasi yang kurang baik dan ketersediaan air bersih yang kurang menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat berada di posisi terakhir di bidang kesehatan.

"Kesenjangan Harapan Lama Sekolah Meningkat pada Tahun 2015"

Kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Gambar 4.3. Selisih EYS Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan angka harapan lama sekolah usia tujuh tahun ke atas cenderung menurun pada periode 2010-2014, namun meningkat kembali pada tahun 2015. Kesenjangan harapan lama sekolah terjadi akibat perbedaan capaian yang cukup signifikan antara Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Papua. Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, kesenjangan antara kedua provinsi terus menjadi sorotan dalam melihat pemerataan pendidikan di Indonesia.

Pada tahun 2015, harapan lama sekolah usia 7 tahun ke atas di Provinsi DI Yogyakarta telah mencapai 15,03 tahun. Sementara itu, harapan lama sekolah di Provinsi Papua hanya sebesar 9,95 tahun. Jika dilihat dari pertumbuhan harapan lama sekolah usia 7 tahun dari tahun 2014 ke 2015, terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Harapan lama sekolah usia 7 tahun ke atas di Provinsi DI Yogyakarta tumbuh sebesar 1,21 persen. Hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa terjadi banyak perbaikan di bidang pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta yang menyebabkan pertumbuhan harapan lama sekolah cukup tinggi. Di sisi lain, kondisi di Provinsi Papua relatif stagnan. Pertumbuhan harapan lama sekolah relatif kecil (0,10 persen) dan peningkatan capaiannya hanya sebesar 0,01 tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perbaikan di bidang pendidikan harus lebih ditingkatkan, baik sarana prasarana, akses, hingga kualitas pendidikannya sendiri.

Gambar 4.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2015 (Persen)



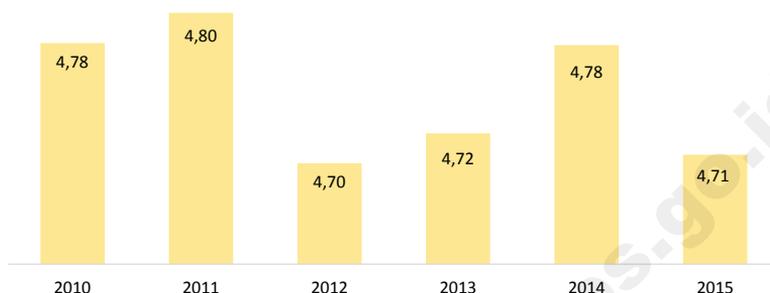
Sumber : Badan Pusat Statistik

Indikator angka partisipasi sekolah juga menunjukkan kesenjangan cukup tinggi antara Provinsi DI Yogyakarta dengan Provinsi Papua. Hal tersebut terjadi pada semua kelompok umur. Hampir seluruh anak usia 7 hingga 12 tahun di Provinsi DI Yogyakarta sedang mengenyam pendidikan. Sementara itu, sekitar seperlima anak di Provinsi Papua pada usia tersebut tidak bersekolah. Pada usia 13 hingga 15 tahun, hampir 22 persen anak di Provinsi Papua tidak bersekolah.

“Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah Masih Sama”

Indikator pendidikan kedua yang tercakup dalam pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kesenjangan rata-rata lama sekolah dari tahun 2010-2015 cenderung berada pada kisaran 4,7 tahun. Pada tahun 2015, Indonesia dapat memperkecil kesenjangan rata-rata lama sekolah pada level provinsi, dari 4,78 tahun menjadi 4,71 tahun.

Gambar 4.5. Selisih MYS Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

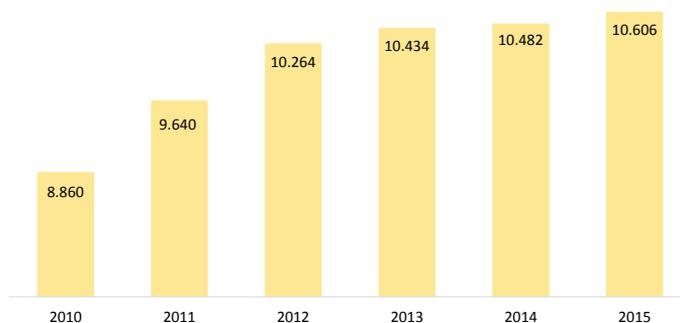
Pada tahun 2015, Provinsi DKI Jakarta bertengger di posisi teratas dalam capaian rata-rata lama sekolah sebesar 10,70 tahun, sedangkan Provinsi Papua menempati posisi terbawah dengan capaian 5,99 tahun saja. Meskipun capaian provinsi Papua paling rendah, Provinsi Papua tumbuh paling cepat pada tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 3,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta hanya tumbuh sekitar 1,52 persen.

Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, kesenjangan rata-rata lama sekolah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua hanya berkisar 4,7 tahun hingga 4,8 tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa belum ada perubahan yang signifikan dalam capaian pendidikan di Papua.

“Kesenjangan Standar Hidup Layak Semakin Memprihatinkan”

Dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Kesenjangan pada dimensi ini semakin lama semakin meningkat selama kurun waktu 2010 hingga 2015. Kesenjangan pada tahun 2015 meningkat tajam jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Gambar 4.6. Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2015, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas dalam capaian pengeluaran per kapita yang disesuaikan yaitu sebesar Rp 17.075.000. Sementara itu, Provinsi Papua menempati posisi terbawah dengan capaian sebesar Rp 6.469.000 atau hampir tiga kali lipat dibanding Provinsi DKI Jakarta. Jika dilihat dari pertumbuhannya, Provinsi Papua tumbuh lebih lambat dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Papua hanya tumbuh 0,83 persen pada tahun 2015, sementara DKI Jakarta tumbuh mencapai 1,05 persen.

Kesenjangan Antar Kabupaten/kota di dalam Provinsi

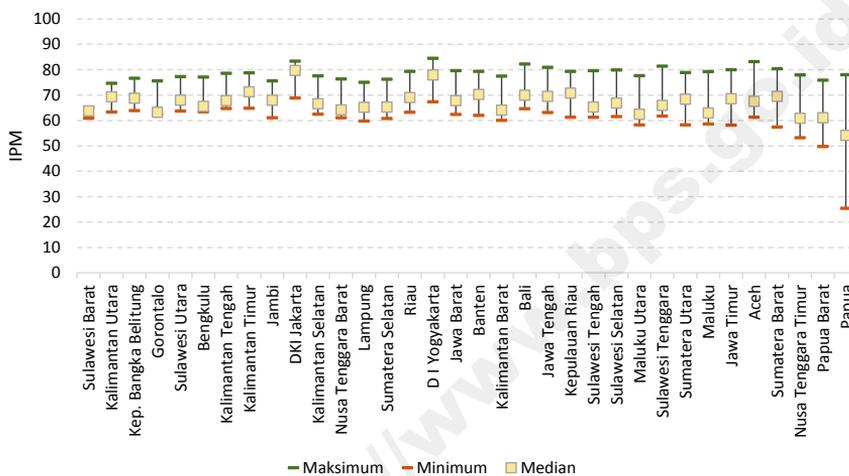
Kesenjangan pembangunan manusia dalam perspektif provinsi memberikan gambaran tentang kinerja secara umum pembangunan nasional. Sementara itu, dalam perspektif kabupaten/kota, kesenjangan menjadi petunjuk penting tentang kinerja yang telah diupayakan pemerintah dalam distribusi pembangunan pada tingkat provinsi. Bagi pemerintah pusat, analisis kesenjangan di kabupaten/kota yang terjadi di tingkat provinsi akan membantu dalam memberikan fokus perhatian terhadap kemajuan pembangunan manusia. Pada tataran umum, penting untuk melihat kesenjangan pembangunan manusia melalui indeks pembangunan manusia. Sementara pada tingkat lanjut, kesenjangan pada setiap dimensi pembentuk pembangunan manusia juga akan memberikan fokus yang lebih detail.

“Kesenjangan Pembangunan Manusia di Papua Perlu Mendapat Prioritas”

Kesenjangan pembangunan manusia pada tahun 2015 yang terjadi pada level nasional, juga terjadi pada level provinsi. Secara umum, kesenjangan pembangunan manusia terjadi di seluruh provinsi. Kesenjangan paling rendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan kesenjangan paling tinggi terjadi di Provinsi Papua.

Kesenjangan pembangunan manusia di Provinsi Papua terjadi antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga. Capaian IPM Kota Jayapura pada tahun 2015 telah mencapai 78,05 sedangkan capaian IPM Kabupaten Nduga hanya 25,47. Selisih IPM antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga sebesar 52,58. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat, selisih IPM antara kabupaten/kota dengan capaian tertinggi dengan terendah hanya sebesar 4,22 poin. Kesenjangan di Provinsi Sulawesi Barat tidak terlalu tinggi, dimana capaian IPM tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 65,09 (Kabupaten Mamuju) sedangkan capaian IPM terendah sebesar 60,87 (Kabupaten Polewali Mamasa).

Gambar 4.7. Kesenjangan IPM antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015

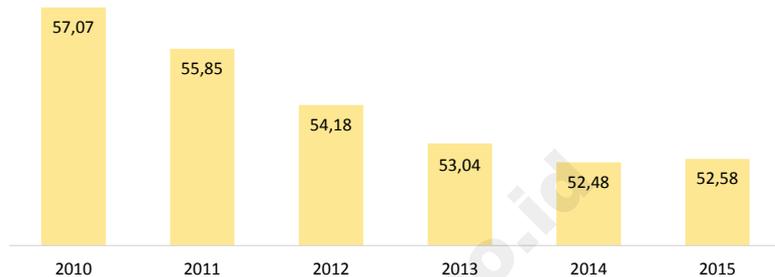


Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan pembangunan manusia antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga memang sangat tinggi. Pada dimensi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir di Kota Jayapura pada tahun 2015 telah mencapai 69,97 tahun sedangkan di Kabupaten Nduga hanya 53,60 tahun. Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah di Kota Jayapura mencapai 14,16 tahun atau hampir menyamai capaian Kota Semarang (14,33 tahun). Sedangkan harapan lama sekolah di Kabupaten Nduga hanya 2,17 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kota Jayapura juga cukup tinggi, yaitu mencapai 11,11 tahun atau hampir setara dengan capaian Kota Yogyakarta (11,41 tahun). Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nduga terpaut cukup jauh, yaitu hanya 0,64 tahun. Sementara pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita Kota Jayapura telah mencapai 14,25 juta per tahun sedangkan Kabupaten Nduga hanya 3,63 juta per tahun atau sekitar empat kali lipat dari Kota Jayapura.

Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, kesenjangan pembangunan manusia antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga semakin mengecil. Namun, capaian pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kesenjangan antara keduanya sedikit melebar kembali. Oleh karena itu, perlu upaya serius dan berkelanjutan agar kesenjangan antara kedua kabupaten/kota semakin mengecil dari waktu ke waktu.

Gambar 4.8. Selisih IPM Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga, 2010-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik

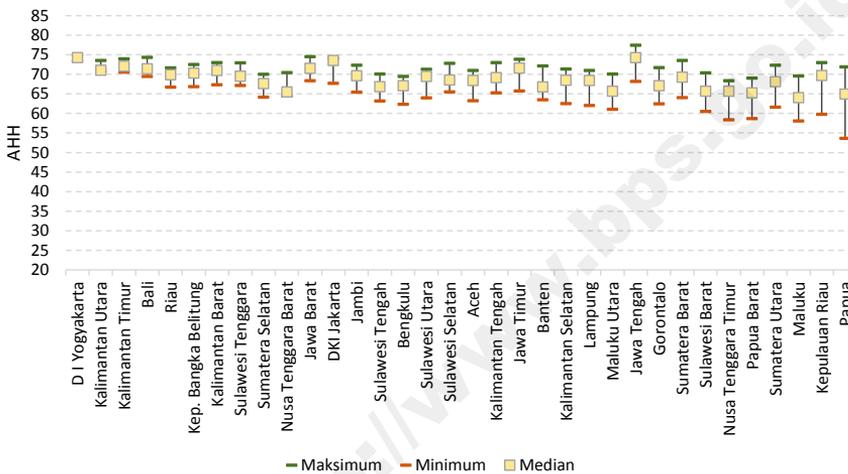
Level pencapaian pembangunan manusia yang sudah cukup tinggi juga tidak menjamin bahwa pembangunan terjadi secara merata. Dua provinsi dengan capaian IPM tertinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta juga mengalami hal serupa. Namun, kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta ternyata lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta. Capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta berkisar antara 67,41 hingga 84,56. Sementara itu, capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta relatif lebih rapat, yaitu dari 68,84 hingga 83,37.

"Jawa Tengah Masih Menyisakan Persoalan Pemerataan Kesehatan"

Provinsi dengan kesenjangan kesehatan tertinggi adalah Provinsi Papua sedangkan kesenjangan terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta. Kesenjangan angka harapan hidup di level kabupaten/kota cukup menarik. Pasalnya, meskipun Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan terbawah dalam capaian angka harapan hidup, kesenjangan di dalam provinsi tersebut tidak terlalu tinggi. Menariknya, meskipun capaian angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta, kesenjangan di Provinsi Jawa Tengah relatif cukup tinggi.

Jawa Tengah merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia dan pusat budaya. Beribukota di Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki salah satu pelabuhan terbesar yaitu Tanjung Mas. Aktivitas ekonomi yang cukup tinggi di provinsi berpenduduk sekitar 33,77 juta jiwa pada tahun 2015 (proyeksi penduduk 2010-2035) ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42 persen pada tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pembangunan manusia pada tahun 2015 berjalan cukup baik di provinsi yang menjadi salah satu sentra batik internasional. Indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah mencapai 69,49, dengan rata-rata harapan hidup saat lahir mencapai 73,96 tahun, tertinggi kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta.

Gambar 4.9. Kesenjangan Angka Harapan Hidup saat Lahir antar Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi, 2015

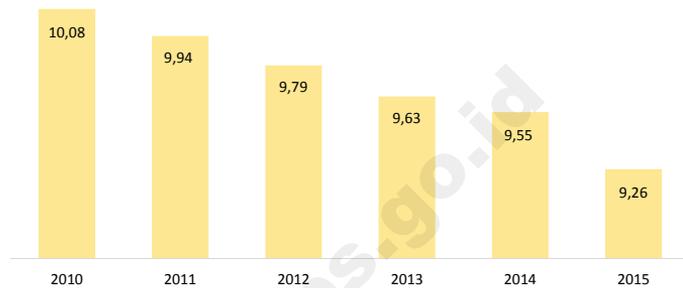


Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan harapan hidup saat lahir di Provinsi Jawa Tengah terjadi antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Brebes. Angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Sukoharjo mencapai 77,46 tahun sedangkan di Kabupaten Brebes hanya 68,20 tahun. Meskipun Kabupaten Brebes menjadi sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia, persentase desa yang memiliki kemudahan akses terhadap rumah sakit masih di bawah 90 persen (Podes 2014). Sementara kabupaten/kota lain di Jawa Tengah secara rata-rata sudah di atas 90 persen. Upaya yang telah dilakukan pemerintah setempat nampaknya berdampak positif terhadap kesenjangan yang terjadi. Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, kesenjangan harapan hidup saat lahir antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Brebes semakin mengecil.

Sementara itu, kesenjangan harapan hidup yang terjadi di Provinsi Papua terjadi akibat perbedaan capaian yang cukup jauh antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Nduga. Pada tahun 2015, harapan hidup saat lahir di Kabupaten Mimika mencapai 71,89 tahun sedangkan di Kabupaten Nduga hanya 53,60 tahun. Data Podes tahun 2014 memberikan gambaran bahwa persetase desa yang memiliki kemudahan terhadap fasilitas kesehatan paling tinggi hanya poliklinik, itupun hanya 36 persen. Sementara fasilitas kesehatan lain masih di bawah 10 persen.

Gambar 4.10. Selisih AHH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Brebes, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

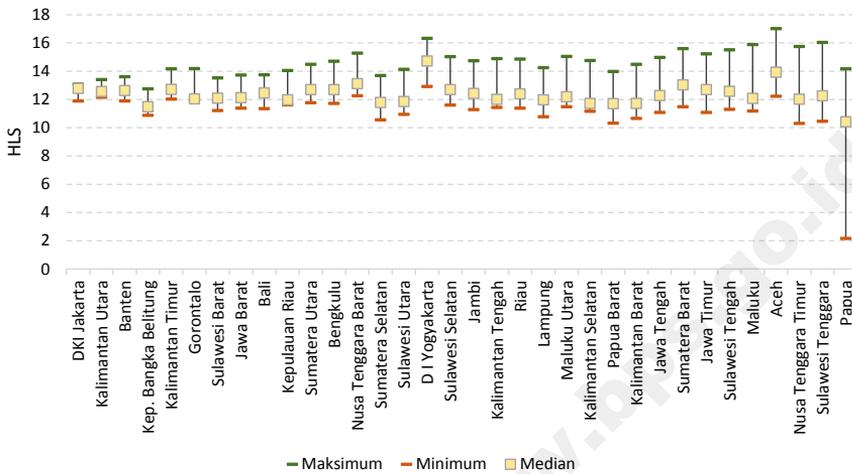
“Kesenjangan Pendidikan di Papua Masih Memprihatinkan”

Pada dimensi pendidikan, dua indikator digunakan sekaligus untuk memotret pembangunan manusia, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2015, Provinsi Papua masih menjadi sorotan utama karena kesenjangan pendidikan yang terjadi begitu lebar, baik dalam capaian harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah. Seperti fenomena kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, capaian provinsi yang tinggi tidak menjamin bahwa pembangunan akan berhasil secara merata. Provinsi Aceh misalnya, meskipun harapan lama sekolah di provinsi berjudul “Serambi Mekah” telah mencapai 13,73 tahun, kesenjangan antara kabupaten/kota relatif cukup tinggi. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara, meskipun rata-rata lama sekolah telah mencapai 9,03 tahun, kesenjangan antara kabupaten/kota juga relatif cukup tinggi.

Provinsi Papua mengalami kesenjangan harapan lama sekolah paling tinggi. Hal ini terjadi akibat perbedaan capaian Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga yang cukup tinggi. Harapan lama sekolah Kota Jayapura telah mencapai 14,16 tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka harapan lama sekolah di level nasional yang hanya mencapai 12,55

tahun. Sementara itu, Kabupaten Nduga menjadi kabupaten dengan capaian terendah di Provinsi Papua dengan harapan lama sekolah hanya sebesar 2,17 tahun, yang berarti penduduk usia tujuh tahun hanya memiliki harapan sekolah selama 2 tahun saja dan tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Gambar 4.11. Kesenjangan Angka Harapan Lama Sekolah antar Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi, 2015



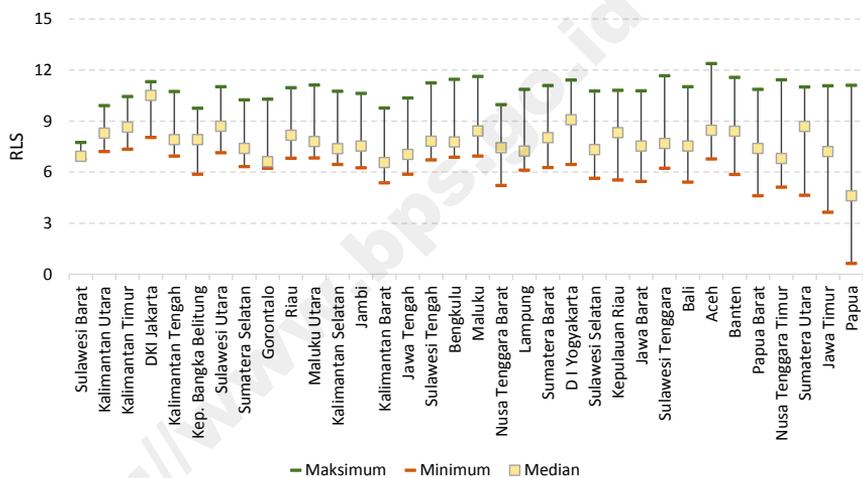
Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan yang terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah juga kembali menempatkan Provinsi Papua pada sebagai provinsi paling senjang. Kesenjangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di provinsi ini cukup tinggi. Rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Papua ditempati oleh Kota Jayapura dengan capaian sebesar 11,11 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Nduga dengan capaian yang hanya 0,64 tahun. Capaian Kabupaten Nduga mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata hanya mengenyam bangku pendidikan yang tidak sampai setahun, atau tidak menyelesaikan kelas 1 SD. Kondisi ini merupakan kasus yang cukup ekstrem dan cukup mengkhawatirkan dimana rata-rata lama sekolah tidak mencapai satu tahun.

Kondisi spasial di Provinsi Papua secara langsung menyiratkan bahwa masalah akses menjadi persoalan utama yang menyebabkan kesenjangan di Provinsi Papua cukup tinggi. Akses antarkabupaten/kota di Provinsi Papua sendiri cukup sulit, tidak semudah akses antar kabupaten/kota

di Pulau Jawa. Beberapa kabupaten/kota hanya bisa diakses dengan menggunakan pesawat perintis. Apabila menilik lebih jauh tentang Kabupaten Nduga, kondisi fasilitas pendidikan di kabupaten ini cukup memprihatinkan. Data Podes tahun 2014 memberikan deskripsi perlunya upaya yang besar agar dapat mencapai fasilitas pendidikan. Hampir seperempat dari jumlah desa yang ada di Provinsi Papua harus mengakses lebih dari 10 km untuk mencapai sekolah dasar (SD). Lebih dari separuh dari jumlah desa di provinsi ini harus mengakses lebih dari 10 km untuk mencapai sekolah menengah pertama (SMP). Sementara itu, hampir seluruh desa di Provinsi Papua harus mengakses lebih dari 10 km untuk mencapai sekolah menengah atas (SMA).

Gambar 4.12. Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015



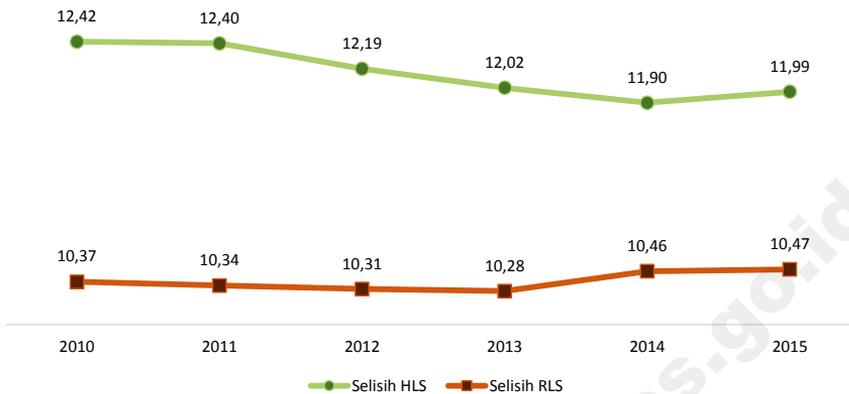
Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2010 hingga 2015, kesenjangan harapan lama sekolah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga cenderung menurun. Meskipun demikian, pada tahun 2015 kesenjangan harapan lama sekolah antara kedua wilayah sedikit meningkat. Selama kurun waktu 2010 hingga 2013, kesenjangan rata-rata lama sekolah cenderung menurun. Namun, dua tahun terakhir terjadi fenomena yang cenderung meningkat.

Kemajuan pencapaian pendidikan di suatu provinsi juga menyimpan kesenjangan yang perlu mendapat perhatian lebih. Provinsi Aceh telah berhasil mencapai tingkat pendidikan yang cukup baik, dengan harapan lama sekolah sebesar 13,73 tahun pada tahun 2015. Artinya, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga

diploma I. Sayangnya, rentang pencapaian harapan lama sekolah di provinsi ini relatif jauh, berkisar antara 12,23 tahun hingga 17,01 tahun. Kesenjangan pendidikan ini merupakan kesenjangan harapan lama sekolah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Banda Aceh.

Gambar 4.13. Selisih HLS dan RLS antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga, 2010-2015 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

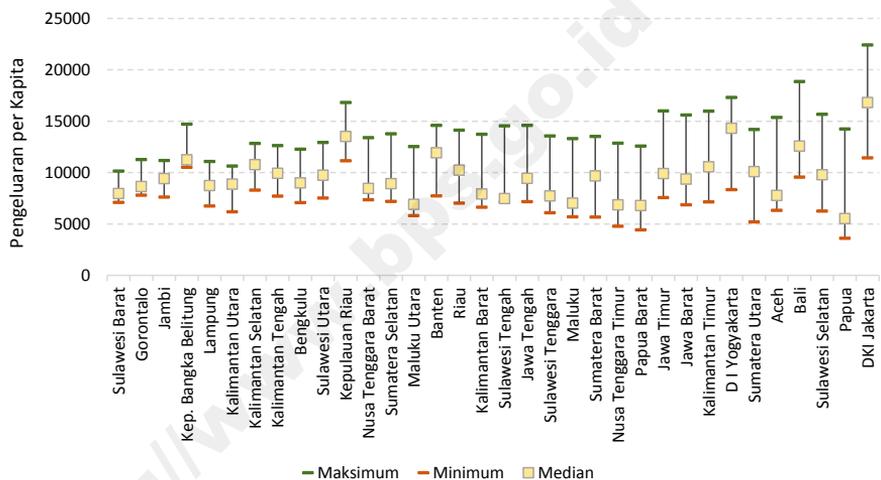
Sementara di Provinsi Sumatera Utara, hal serupa terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah. Meskipun pencapaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,03 tahun pada tahun 2015, kesenjangan antara kabupaten/kota relatif tinggi, yaitu berkisar antara 4,64 tahun hingga 11,00 tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Medan sedangkan terendah berada di Kabupaten Nias Selatan.

“Kesenjangan Pengeluaran per Kapita: Papua Masih Menjadi Prioritas, DKI Jakarta Harus Berbenah”

Dimensi terakhir dari pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2015, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengeluaran per kapita tertinggi di Indonesia. Ironisnya di saat yang sama, kesenjangan pengeluaran per kapita antarkabupaten/kota di ibukota negara ini merupakan yang paling tinggi di Indonesia. Disusul selanjutnya adalah Provinsi Papua, sementara kesenjangan terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan pembangunan manusia di Provinsi Papua memang cukup kompleks, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Level pencapaian yang masih rendah dan belum optimalnya pemerataan pembangunan menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah. Kesenjangan yang terjadi di Provinsi Papua mengharuskan adanya strategi pembangunan yang menyeluruh dan holistik yang menyentuh semua lini, termasuk ekonomi. Kesenjangan pada dimensi ekonomi terjadi antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga. Di tahun 2015, perbedaan pengeluaran per kapita antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga mencapai empat kali lipat.

Gambar 4.14. Kesenjangan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015

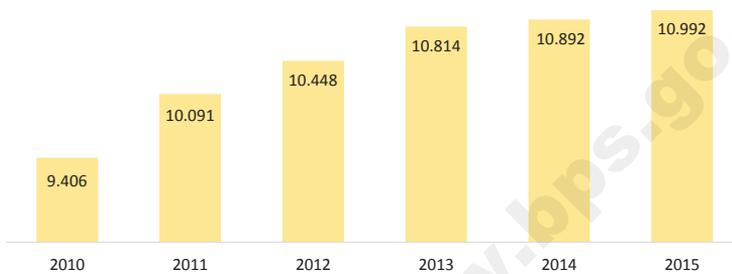


Sumber : Badan Pusat Statistik

Senada dengan kesenjangan pengeluaran per kapita yang terjadi di Provinsi Papua, Provinsi DKI Jakarta juga perlu berbenah dalam hal redistribusi pembangunan. Dari sisi level pencapaian pengeluaran per kapita, Provinsi DKI Jakarta memang paling tinggi diantara provinsi lain. Namun sayang, terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada tahun 2015, pengeluaran per kapita di Kota Jakarta Selatan telah mencapai 22,4 juta per tahun, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu hanya 11,4 juta per tahun.

Selama kurun waktu 2010 hingga 2015, kesenjangan pengeluaran per kapita antara Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu semakin melebar. Apabila terus dibiarkan, jurang kesenjangan akan semakin menganga. Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 11,06 persen (September 2013). Sementara itu, kontribusi kabupaten ini terhadap ekonomi Provinsi DKI Jakarta masih di bawah satu persen. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Seribu harus terus ditingkatkan.

Gambar 4.15. Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Jakarta Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

<http://www.bps.go.id>

BAB

5

KESIMPULAN

<http://www.bpk.go.id>



Kesimpulan

Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik tren 2010-2015 maupun spasialnya didapat beberapa kesimpulan diantaranya:

- Tren pembangunan manusia di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan juga terjadi di tahun 2015. Capaian IPM Indonesia pada tahun 2015 adalah 69,55 dengan pertumbuhan sebesar 0,93 persen dari tahun 2014.
- Peningkatan terjadi pada seluruh komponen IPM yaitu:
 1. Komponen kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup menjadi 70,78 tahun di tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70,59 tahun (tumbuh 0,27 persen).
 2. Komponen pendidikan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi 12,55 tahun (tumbuh 1,29 persen), dan rata-rata lama sekolah menjadi 7,84 tahun (tumbuh 1,42 persen) dibanding tahun 2014.
 3. Komponen ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran perkapita per tahun menjadi 10,150 juta pada tahun 2015 (tumbuh 2,49 persen) dibanding tahun 2014.
- Capaian IPM pada tahun 2015 tertinggi di level provinsi diraih oleh DKI Jakarta dengan IPM sebesar 78,99 dan capaian terendah IPM berada di Provinsi Papua dengan capaian 57,25.
- Indikator angka harapan hidup tertinggi dicapai provinsi Yogyakarta (74,68 tahun), dan terendah Sulawesi barat (64,22 tahun). Indikator angka harapan lama sekolah tertinggi juga dicapai Yogyakarta (15,03 tahun) dan terendah Papua (9,95 tahun).

- Indikator rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai provinsi DKI Jakarta (10,70 tahun) dan terendah Papua (5,99 tahun).
- Indikator pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi dicapai DKI Jakarta (17,075 juta) dan terendah Papua (6,469 juta).
- IPM tahun 2015 tertinggi pada level kabupaten/kota dicapai oleh Kota Yogyakarta dengan capaian sebesar 84,56 sedangkan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Nduga dengan capaian sebesar 25,47.
- Pertumbuhan capaian IPM tahun 2015 tertinggi pada level provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pertumbuhan sebesar 1,37 persen sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki pertumbuhan paling lambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,17 persen.
- Pada tahun 2015 kabupaten Puncak tumbuh paling cepat se-Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 3,57 persen, sedangkan Kota Manado tumbuh paling lambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,06 persen.

<http://www.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Achmadi, U.F., 2008. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. UI Press, Jakarta.
- Armstrong, Sue. 1991. Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan. Arcan, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010. Jakarta: CV. Rioma.
- _____. 2012. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta: CV. Rioma
- _____. 2013. Indeks Pembangunan Manusia 2012. Jakarta: CV. Rioma
- _____. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: CV. Rioma
- _____. Statistik Indonesia 2015. Jakarta: BPS.
- _____. 2014. Kajian Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs). Jakarta: BPS
- Istiqomah, Umi. 2003. Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok. Setiaji, Jakarta.
- Kasnodihardjo. 1997. Gambaran Perilaku Penduduk Mengenai Kesehatan Lingkungan di Daerah Pedesaan Subang Jawa Barat. Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Cermin Dunia Kedokteran No. 119, 1997
- Mandagi, Jeanne. 1996. Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya. Bina Darma Pemuda Printing, Jakarta.
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan, Ivani, Fitria Saftarina. 2015. Pelayanan Fasilitas Kesehatan: Faktor Kepuasan dan Loyalitas Pasien. Abstrak Majority Volume 4 Nomor 9 Desember 2015.
- Said, Nusa Idaman. 1999. Kesehatan Masyarakat Dan Teknologi Peningkatan Kualitas Air. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Cetakan Pertama, Jakarta
- UNDP, BPS, dan Bappenas. 2001. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan Pembangunan Manusia.
- _____. 2004. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004: Ekonomi dari Demokrasi.
- United Nations Development Programme. 1990. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 1996. Human Development Report. New York: UNDP.
- _____. 2015. Human Development Report. New York: UNDP.

<http://geography.about.com/od/economic-geography/a/Singapore-Economic-Development.htm> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

<https://www.oecd.org/countries/singapore/46581101.pdf> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.

<http://www.bps.go.id>

Tim Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015

Pengarah
Sentot Bangun Widoyono

Editor
Harmawanti Marhaeni
Yoyo Karyono

Penulis
Nur Putri Cahyo Utami
Adi Nugroho
Ema Tusianti
Dyah Retno Prihatinningsih

Pengolah Data
Adi Nugroho
Nur Putri Cahyo Utami

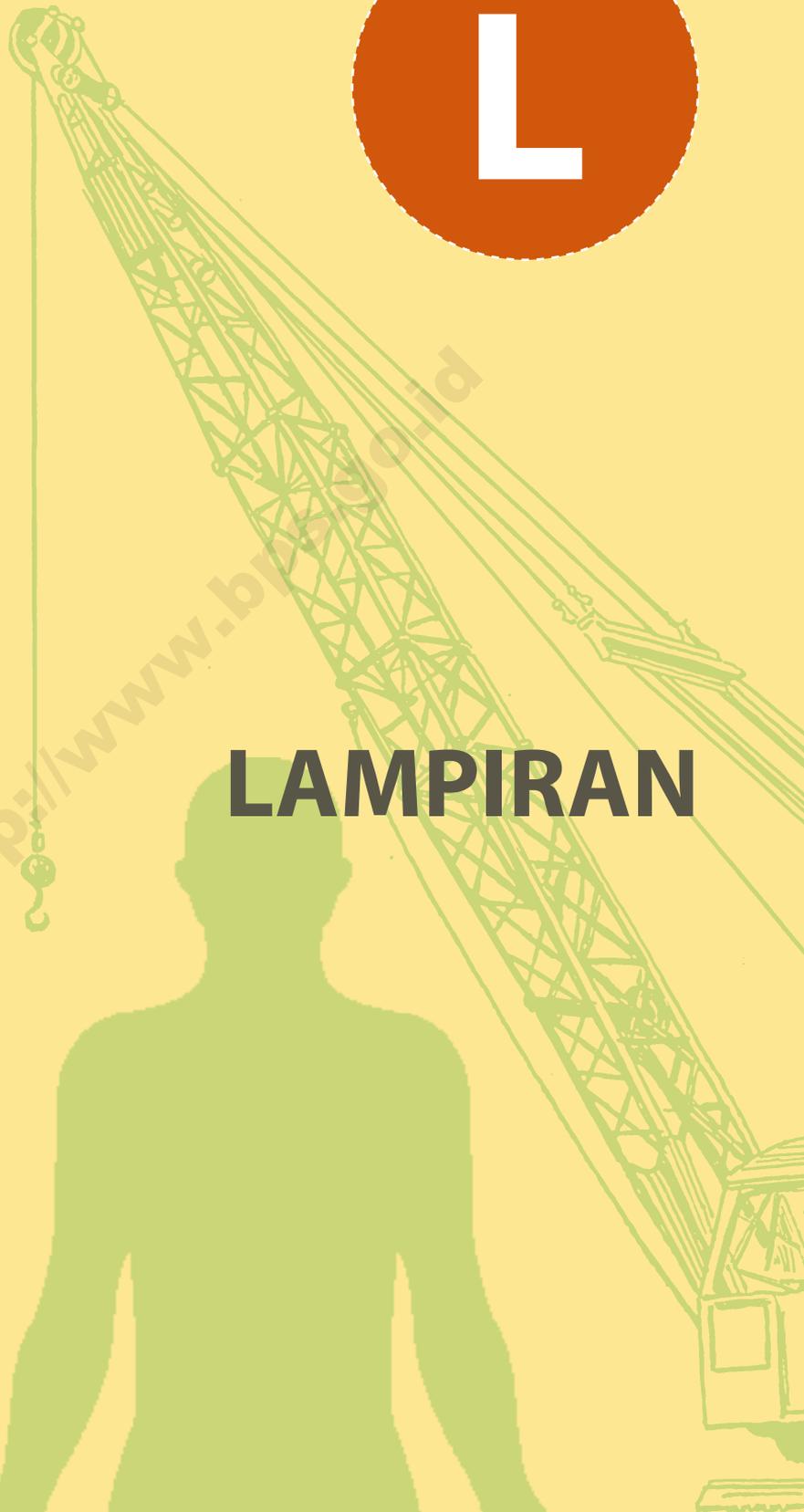
Desain Cover
Fera Kurniawati
Adi Nugroho
Taufan Tirtoyasa

Desain Layout
Nur Putri Cahyo Utami



<http://www.bpk.go.id>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015

Provinsi	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
ACEH	69,50	13,73	8,77	8.533	69,45	0,93
SUMATERA UTARA	68,29	12,82	9,03	9.563	69,51	0,93
SUMATERA BARAT	68,66	13,60	8,42	9.804	69,98	0,90
RIAU	70,93	12,74	8,49	10.364	70,84	0,72
JAMBI	70,56	12,57	7,96	9.446	68,89	0,95
SUMATERA SELATAN	69,14	12,02	7,77	9.474	67,46	1,07
BENGKULU	68,50	13,18	8,29	9.123	68,59	0,78
LAMPUNG	69,90	12,25	7,56	8.729	66,95	0,79
KEP. BANGKA BELITUNG	69,88	11,60	7,46	11.781	69,05	1,13
KEPULAUAN RIAU	69,41	12,60	9,65	13.177	73,75	0,47
DKI JAKARTA	72,43	12,59	10,70	17.075	78,99	0,77
JAWA BARAT	72,41	12,15	7,86	9.778	69,50	1,01
JAWA TENGAH	73,96	12,38	7,03	9.930	69,49	1,04
D I YOGYAKARTA	74,68	15,03	9,00	12.684	77,59	1,02
JAWA TIMUR	70,68	12,66	7,14	10.383	68,95	1,19
BANTEN	69,43	12,35	8,27	11.261	70,27	0,55
BALI	71,35	12,97	8,26	13.078	73,27	1,09
NUSA TENGGARA BARAT	65,38	13,04	6,71	9.241	65,19	1,36
NUSA TENGGARA TIMUR	65,96	12,84	6,93	7.003	62,67	0,66
KALIMANTAN BARAT	69,87	12,25	6,93	8.279	65,59	1,08
KALIMANTAN TENGAH	69,54	12,22	8,03	9.809	68,53	1,13
KALIMANTAN SELATAN	67,80	12,21	7,76	10.891	68,38	1,11
KALIMANTAN TIMUR	73,65	13,18	9,15	11.229	74,17	0,48
KALIMANTAN UTARA	72,16	12,54	8,36	8.354	68,76	0,18
SULAWESI UTARA	70,99	12,43	8,88	9.729	70,39	0,62
SULAWESI TENGAH	67,26	12,72	7,97	8.768	66,76	0,49
SULAWESI SELATAN	69,80	12,99	7,64	9.992	69,15	0,96
SULAWESI TENGGARA	70,44	13,07	8,18	8.697	68,75	1,00
GORONTALO	67,12	12,70	7,05	9.035	65,86	1,05
SULAWESI BARAT	64,22	12,22	6,94	8.260	62,96	1,17
MALUKU	65,31	13,56	9,16	8.026	67,05	0,48
MALUKU UTARA	67,44	13,10	8,37	7.423	65,91	1,11
PAPUA BARAT	65,19	12,06	7,01	7.064	61,73	0,75
PAPUA	65,09	9,95	5,99	6.469	57,25	0,88
INDONESIA	70,78	12,55	7,84	10.150	69,55	0,93

*) Pengeluaran per Kapita konstan 2012 dan disesuaikan dengan PPP.

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
ACEH	69,50	13,73	8,77	8.533	69,45	0,93
Simeulue	64,66	12,83	8,90	6.328	63,16	1,57
Aceh Singkil	66,97	14,26	7,50	7.602	66,05	1,21
Aceh Selatan	63,61	13,24	7,79	7.224	63,28	1,48
Aceh Tenggara	67,40	13,62	9,32	7.001	66,77	1,32
Aceh Timur	68,20	12,23	7,40	7.623	64,55	1,53
Aceh Tengah	68,44	14,21	9,65	9.473	71,51	0,78
Aceh Barat	67,49	14,55	8,47	8.135	68,41	1,64
Aceh Besar	69,47	14,47	9,91	8.775	71,70	0,90
Pidie	66,46	13,61	8,74	9.233	68,68	1,20
Bireuen	70,64	14,41	9,14	7.622	69,77	1,55
Aceh Utara	68,48	14,10	8,07	7.327	66,85	1,40
Aceh Barat Daya	64,20	13,20	7,90	7.303	63,77	1,09
Gayo Lues	64,77	13,13	7,06	7.780	63,67	0,52
Aceh Tamiang	68,99	13,54	7,95	7.750	67,03	1,43
Nagan Raya	68,59	14,04	8,22	7.141	66,73	1,76
Aceh Jaya	66,63	13,93	7,89	8.749	67,53	0,34
Bener Meriah	68,79	13,04	9,42	9.760	70,62	0,88
Pidie Jaya	69,49	14,14	8,45	9.398	70,49	0,86
Kota Banda Aceh	70,89	17,01	12,38	15.362	83,25	1,25
Kota Sabang	69,93	12,98	10,37	10.041	72,51	1,42
Kota Langsa	68,94	15,16	10,49	10.605	74,74	1,27
Kota Lhokseumawe	70,96	15,14	10,41	10.093	75,11	0,90
Kota Subulussalam	63,27	13,73	6,78	6.504	61,32	1,53
SUMATERA UTARA	68,29	12,82	9,03	9.563	69,51	0,93
Nias	68,97	11,77	4,76	6.234	58,85	1,50
Mandailing Natal	61,58	12,77	7,63	9.096	63,99	0,89
Tapanuli Selatan	63,74	13,06	8,27	10.623	67,63	0,61
Tapanuli Tengah	66,59	12,40	8,02	9.555	67,06	1,36
Tapanuli Utara	67,55	13,19	9,31	11.079	71,32	0,87
Toba Samosir	69,14	13,18	10,08	11.535	73,40	0,83
Labuhan Batu	69,36	12,57	8,75	10.356	70,23	0,25
Asahan	67,37	12,49	8,32	10.067	68,40	1,32
Simalungun	70,34	12,69	8,80	10.728	71,24	0,49
Dairi	67,78	12,80	8,69	9.708	69,00	1,60
Karo	70,62	12,22	9,50	11.800	72,69	1,18

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Deli Serdang	71,00	12,52	9,48	11.359	72,79	1,12
Langkat	67,63	12,70	7,92	10.364	68,53	0,78
Nias Selatan	67,66	11,96	4,64	6.454	58,74	1,66
Humbang Hasundutan	68,10	13,15	8,90	6.889	66,03	0,68
Pakpak Barat	64,85	13,80	8,45	7.496	65,53	0,73
Samosir	70,26	13,41	8,84	7.698	68,43	0,93
Serdang Bedegai	67,47	12,31	8,08	10.110	68,01	0,34
Batu Bara	65,80	11,96	7,74	9.692	66,02	0,79
Padang Lawas Utara	66,50	11,87	8,91	9.363	67,35	1,29
Padang Lawas	66,31	12,91	8,40	7.955	65,99	0,75
Labuhan Batu Selatan	68,09	12,73	8,68	10.319	69,67	1,58
Labuhan Batu Utara	68,70	12,12	8,31	11.201	69,69	0,77
Nias Utara	68,59	12,40	6,06	5.627	59,88	1,18
Nias Barat	67,94	12,33	5,74	5.207	58,25	1,25
Kota Sibolga	67,70	13,10	9,85	10.765	71,64	0,89
Kota Tanjung Balai	61,90	12,40	9,12	10.326	66,74	1,04
Kota Pematang Siantar	72,29	13,99	10,73	11.388	76,34	0,67
Kota Tebing Tinggi	70,14	12,23	10,06	11.393	72,81	0,94
Kota Medan	72,28	13,97	11,00	14.191	78,87	0,78
Kota Binjai	71,59	13,56	10,28	10.098	73,81	1,73
Kota Padang Sidempuan	68,32	14,48	10,47	9.668	72,80	1,28
Kota Gunung Sitoli	70,29	13,65	8,18	6.742	66,41	0,76
SUMATERA BARAT	68,66	13,60	8,42	9.804	69,98	0,90
Kepulauan Mentawai	64,05	11,48	6,27	5.684	57,41	1,20
Pesisir Selatan	69,96	13,04	8,11	8.412	68,07	0,47
Solok	67,35	12,88	7,57	9.334	67,12	1,03
Sawah Lunto/Sijunjung	65,22	11,94	7,33	9.796	65,30	0,54
Tanah Datar	68,75	13,35	7,93	10.103	69,49	1,43
Padang Pariaman	67,64	13,54	6,89	10.260	68,04	0,71
Agam	71,30	13,59	8,17	8.859	69,84	0,76
Limapuluh Koto	69,23	12,76	7,91	8.774	67,65	1,30
Pasaman	66,26	12,70	7,63	7.340	64,01	1,07
Solok Selatan	66,64	12,37	7,98	9.653	67,09	1,20
Dharmas Raya	70,16	12,36	8,03	10.713	69,84	0,82
Pasaman Barat	67,03	12,30	7,83	8.109	65,26	1,09
Kota Padang	73,19	15,60	10,97	13.522	80,36	0,67
Kota Solok	72,74	14,27	10,77	11.350	76,83	0,83
Kota Sawah Lunto	69,27	12,69	9,66	8.931	69,87	0,38
Kota Padang Panjang	72,45	15,01	11,09	9.670	75,98	1,24
Kota Bukit Tinggi	73,52	14,92	10,79	12.330	78,72	0,89

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Kota Payakumbuh	72,93	14,21	10,29	12.622	77,42	1,22
Kota Pariaman	69,59	14,49	9,96	11.814	74,98	0,43
RIAU	70,93	12,74	8,49	10.364	70,84	0,72
Kuantan Sengingi	67,86	12,64	8,18	9.770	68,32	1,26
Indragiri Hulu	69,74	11,92	7,82	9.776	68,00	1,32
Indragiri Hilir	66,84	11,38	6,82	9.787	64,80	1,57
Pelalawan	70,23	11,56	8,17	11.422	69,82	1,66
Siak	70,54	12,26	9,20	11.604	72,17	1,01
Kampar	70,00	12,86	8,84	10.710	71,28	0,79
Rokan Hulu	69,03	12,39	7,84	8.942	67,29	0,41
Bengkalis	70,58	12,39	8,82	10.965	71,29	0,63
Rokan Hilir	69,47	11,75	7,62	9.176	66,81	0,90
Kepulauan Meranti	66,72	12,41	7,45	7.030	63,25	0,54
Kota Pekanbaru	71,65	14,86	10,97	14.126	79,32	1,15
Kota Dumai	70,25	12,46	9,57	11.058	72,20	0,47
JAMBI	70,56	12,57	7,96	9.446	68,89	0,95
Kerinci	69,30	13,77	7,78	9.076	68,89	1,36
Merangin	70,92	11,83	7,08	9.456	67,15	1,43
Sarolangun	68,77	11,93	7,24	11.169	68,10	0,64
Batanghari	69,95	12,69	7,44	9.407	68,05	0,54
Muara Jambi	70,81	12,43	8,01	7.630	66,66	1,45
Tanjung Jabung Timur	65,43	11,28	6,26	7.810	61,12	2,07
Tanjung Jabung Barat	67,66	11,90	7,37	8.478	65,03	1,54
Tebo	69,66	11,97	7,53	9.434	67,29	0,99
Bungo	67,08	12,54	7,87	10.676	68,34	0,59
Kota Jambi	72,31	13,80	10,63	10.891	75,58	0,97
Kota Sungai Penuh	71,61	14,74	9,17	9.502	73,03	0,76
SUMATERA SELATAN	69,14	12,02	7,77	9.474	67,46	1,07
Ogan Komering Ulu	67,63	12,54	8,17	8.923	67,18	1,47
Ogan Komering Ilir	68,01	11,34	6,45	9.723	64,73	1,35
Muara Enim (Liot)	68,00	11,49	7,40	9.397	65,82	1,22
Lahat	64,87	12,29	8,09	8.700	65,25	1,13
Musi Rawas	67,18	11,63	6,69	8.876	64,11	1,45
Musi Banyuasin	68,09	11,79	7,54	8.850	65,76	1,28
Banyuasin	68,31	11,32	6,88	8.539	64,15	1,48
Ogan Komering Ulu Selatan	66,08	11,22	7,46	7.581	62,57	1,01
Ogan Komering Ulu Timur	68,19	11,79	7,05	10.862	67,17	0,63
Ogan Ilir	64,58	12,24	7,35	9.809	65,35	1,34
Empat Lawang	64,18	11,85	7,29	8.727	63,55	0,60
Penukal Abab Lematang Ilir	67,65	10,56	6,53	7.197	60,83	1,57

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Musi Rawas Utara	64,89	11,22	6,33	9.051	62,32	1,60
Kota Palembang	70,00	13,70	10,25	13.785	76,29	0,35
Kota Prabumulih	69,59	12,86	9,62	12.046	73,19	1,37
Kota Pagar Alam	65,70	12,80	8,63	7.600	65,37	0,94
Kota Lubuk Linggau	68,59	13,28	9,47	12.331	73,17	0,46
BENGKULU	68,50	13,18	8,29	9.123	68,59	0,78
Bengkulu Selatan	67,16	13,45	8,76	8.951	68,57	0,42
Rejang Lebong	67,52	13,11	7,90	9.050	67,51	1,45
Bengkulu Utara	67,38	12,81	7,81	9.444	67,46	0,29
Kaur	65,76	12,85	7,78	7.599	64,47	1,14
Seluma	66,70	12,59	7,38	7.077	63,41	0,74
Mukomuko	65,83	12,48	7,42	9.296	65,77	0,70
Lebong	62,31	11,72	7,77	10.363	64,72	1,27
Kepahiang	66,95	12,31	7,51	8.605	65,45	0,35
Bengkulu Tengah	67,61	12,54	6,88	8.163	64,68	0,89
Kota Bengkulu	69,46	14,71	11,45	12.277	77,16	0,88
LAMPUNG	69,90	12,25	7,56	8.729	66,95	0,79
Lampung Barat	66,42	11,74	7,27	8.801	64,54	1,57
Tanggamus	67,42	11,92	6,86	7.961	63,66	1,58
Lampung Selatan	68,32	11,65	7,24	8.746	65,22	2,31
Lampung Timur	69,73	12,40	7,20	9.194	67,10	1,02
Lampung Tengah	69,01	12,20	7,14	10.298	67,61	0,81
Lampung Utara	68,12	12,41	7,70	7.729	65,20	0,49
Way Kanan	68,41	11,98	7,32	8.313	65,18	1,34
Tulang Bawang	69,14	11,15	7,11	9.893	66,08	0,38
Pesawaran	67,83	12,08	7,23	6.744	62,70	1,62
Pringsewu	68,61	12,75	7,83	9.020	67,55	1,45
Mesuji	67,15	10,78	6,12	6.836	59,79	1,83
Tulang Bawang Barat	69,08	11,49	6,82	7.332	63,01	0,89
Pesisir Barat	62,04	11,53	7,47	7.251	60,55	1,32
Kota Bandar Lampung	70,65	13,35	10,87	11.090	74,81	0,64
Kota Metro	70,98	14,26	10,55	10.707	75,10	0,16
KEP. BANGKA BELITUNG	69,88	11,60	7,46	11.781	69,05	1,13
Bangka	70,48	12,36	7,94	10.904	70,03	0,36
Belitung	70,32	11,32	8,09	12.443	70,29	1,05
Bangka Barat	69,47	11,48	6,68	11.243	67,23	1,21
Bangka Tengah	70,28	11,72	6,70	12.210	68,66	0,84
Bangka Selatan	66,86	10,88	5,88	10.824	63,89	0,54
Belitung Timur	71,23	11,28	7,91	10.523	68,83	1,08
Kota Pangkal Pinang	72,51	12,76	9,75	14.707	76,61	0,43

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
KEPULAUAN RIAU	69,41	12,60	9,65	13.177	73,75	0,47
Karimun	69,71	11,87	7,74	11.248	69,21	0,70
Bintan	69,92	11,98	8,32	13.529	71,92	0,37
Natuna	63,64	13,85	8,45	13.612	70,87	1,15
Lingga	59,77	11,78	5,54	11.158	61,28	0,88
Kepulauan Anambas	66,33	11,63	6,62	11.251	65,86	1,14
Kota Batam	73,00	12,65	10,81	16.826	79,34	0,26
Kota Tanjung Pinang	71,65	14,05	9,95	14.446	77,57	0,37
DKI JAKARTA	72,43	12,59	10,70	17.075	78,99	0,77
Kep. Seribu	67,72	11,90	8,04	11.433	68,84	0,53
Kota Jakarta Selatan	73,81	13,09	11,23	22.425	83,37	0,51
Kota Jakarta Timur	74,10	13,08	11,32	16.455	80,73	0,40
Kota Jakarta Pusat	73,70	12,96	10,88	16.143	79,69	0,83
Kota Jakarta Barat	73,32	12,60	10,15	19.006	79,72	0,44
Kota Jakarta Utara	72,91	12,42	10,05	17.205	78,30	1,31
JAWA BARAT	72,41	12,15	7,86	9.778	69,50	1,01
Bogor	70,59	11,83	7,75	9.368	67,77	0,61
Sukabumi	70,03	12,13	6,51	7.849	64,44	0,58
Cianjur	69,28	11,83	6,54	6.877	62,42	0,54
Bandung	73,07	12,13	8,41	9.375	70,05	1,43
Garut	70,69	11,65	6,84	6.875	63,21	1,57
Tasikmalaya	68,36	12,44	6,88	6.934	63,17	0,60
Ciamis	70,74	13,59	7,45	8.296	68,02	0,56
Kuningan	72,64	12,03	7,20	8.516	67,19	0,84
Cirebon	71,38	11,79	6,32	9.261	66,07	0,83
Majalengka	69,06	11,74	6,80	8.477	64,75	1,05
Sumedang	71,91	12,90	7,66	9.279	69,29	0,77
Indramayu	70,59	12,09	5,46	8.769	64,36	1,26
Subang	71,52	11,46	6,45	9.831	66,52	1,10
Purwakarta	70,26	11,44	7,35	10.550	67,84	0,77
Karawang	71,55	11,69	6,81	10.217	67,66	0,87
Bekasi	73,18	11,93	8,66	10.323	71,19	0,96
Bandung Barat	71,76	11,39	7,53	7.522	65,23	1,49
Pangandaran	70,24	11,99	7,06	8.265	65,62	0,51
Kota Bogor	72,88	12,36	10,20	10.576	73,65	0,75
Kota Sukabumi	71,86	13,24	9,08	9.729	71,84	0,91
Kota Bandung	73,82	13,63	10,52	15.609	79,67	0,88
Kota Cirebon	71,79	12,94	9,76	10.732	73,34	0,55
Kota Bekasi	74,48	13,36	10,71	15.116	79,63	1,00
Kota Depok	73,98	13,54	10,71	14.424	79,11	0,68

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Kota Cimahi	73,58	13,73	10,78	11.012	76,42	0,47
Kota Tasikmalaya	71,26	13,37	8,56	8.785	69,99	1,37
Kota Banjar	70,26	12,95	8,06	9.476	69,31	1,42
JAWA TENGAH	73,96	12,38	7,03	9.930	69,49	1,04
Cilacap	73,00	12,28	6,58	9.351	67,77	0,78
Banyumas	73,12	12,57	7,31	10.104	69,89	0,93
Purbalingga	72,81	11,78	6,85	8.938	67,03	1,21
Banjarnegara	73,59	11,39	6,17	7.930	64,73	2,50
Kebumen	72,77	12,49	7,04	8.008	66,87	1,84
Purworejo	74,03	13,04	7,65	9.305	70,37	0,35
Wonosobo	71,02	11,43	6,11	9.736	65,70	0,76
Magelang	73,27	12,14	7,19	8.182	67,13	1,18
Boyolali	75,63	12,13	7,10	11.806	71,74	1,98
Klaten	76,55	12,84	8,16	11.178	73,81	0,84
Sukoharjo	77,46	13,42	8,50	10.416	74,53	1,04
Wonogiri	75,86	12,42	6,39	8.417	67,76	1,49
Karanganyar	77,11	13,27	8,48	10.486	74,26	0,50
Sragen	75,41	12,21	6,86	11.434	71,10	0,82
Grobogan	74,27	12,25	6,33	9.457	68,05	0,41
Blora	73,85	11,91	6,04	8.699	66,22	0,57
Rembang	74,22	12,02	6,92	9.122	68,18	1,16
Pati	75,63	11,79	6,71	9.380	68,51	2,28
Kudus	76,41	13,14	7,84	10.203	72,72	1,00
Jepara	75,65	12,27	7,31	9.504	70,02	0,58
Demak	75,21	12,43	7,45	9.118	69,75	1,15
Semarang	75,52	12,82	7,33	10.778	71,89	0,32
Temanggung	75,35	11,89	6,52	8.369	67,07	1,66
Kendal	74,15	12,41	6,64	10.419	69,57	1,62
Batang	74,42	11,09	6,41	8.244	65,46	2,17
Pekalongan	73,35	12,00	6,55	9.208	67,40	0,63
Pemalang	72,77	11,86	6,04	7.177	63,70	2,17
Tegal	70,90	12,00	6,30	8.367	65,04	1,47
Brebes	68,20	11,34	5,88	8.898	63,18	1,02
Kota Magelang	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39	0,79
Kota Surakarta	77,00	14,14	10,36	13.604	80,14	1,01
Kota Salatiga	76,83	14,97	9,81	14.600	80,96	1,22
Kota Semarang	77,20	14,33	10,20	13.589	80,23	1,26
Kota Pekalongan	74,11	12,59	8,28	11.253	72,69	1,62
Kota Tegal	74,12	12,46	8,27	11.748	72,96	1,06

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
DI YOGYAKARTA	74,68	15,03	9,00	12.684	77,59	1,02
Kulon Progo	75,00	13,55	8,40	8.688	71,52	1,19
Bantul	73,44	14,72	9,08	14.320	77,99	1,14
Gunung Kidul	73,69	12,92	6,46	8.336	67,41	0,56
Sleman	74,57	15,77	10,30	14.562	81,20	0,59
Kota Yogyakarta	74,25	16,32	11,41	17.317	84,56	0,93
JAWA TIMUR	70,68	12,66	7,14	10.383	68,95	1,19
Pacitan	71,05	11,94	6,88	7.686	64,92	1,75
Ponorogo	72,08	13,29	6,96	8.654	68,16	1,12
Trenggalek	72,91	12,08	7,18	8.445	67,25	1,65
Tulungagung	73,28	12,73	7,72	9.534	70,07	0,83
Blitar	72,80	11,98	7,24	9.272	68,13	1,87
Kediri	72,14	12,15	7,41	9.883	68,91	0,69
Malang	71,98	11,98	6,73	8.845	66,63	1,58
Lumajang	69,27	11,61	6,04	7.921	63,02	1,11
Jember	68,20	12,01	5,76	8.255	63,04	0,63
Banyuwangi	70,03	12,20	6,88	10.692	68,08	1,15
Bondowoso	65,73	12,86	5,53	9.519	63,95	0,81
Situbondo	68,28	12,98	5,67	8.677	64,53	0,97
Probolinggo	66,15	12,04	5,66	9.976	63,83	1,25
Pasuruan	69,83	11,80	6,50	8.707	65,04	1,08
Sidoarjo	73,63	13,89	10,10	12.879	77,43	0,84
Mojokerto	71,96	12,18	7,75	11.559	70,85	0,90
Jombang	71,67	12,68	7,59	9.963	69,59	0,75
Nganjuk	70,97	12,68	7,33	10.995	69,90	0,45
Madiun	70,36	13,10	6,99	10.710	69,39	1,15
Magetan	72,01	13,60	7,65	10.594	71,39	1,56
Ngawi	71,53	12,31	6,53	10.584	68,32	0,79
Bojonegoro	70,51	12,09	6,64	8.993	66,17	1,37
Tuban	70,55	12,07	6,20	8.940	65,52	1,45
Lamongan	71,67	13,43	7,28	9.821	69,84	0,60
Gresik	72,30	13,19	8,93	11.548	73,57	1,00
Bangkalan	69,72	11,55	5,08	7.667	61,49	1,27
Sampang	67,58	11,09	3,65	7.827	58,18	2,12
Pamekasan	66,86	13,34	5,73	7.679	63,10	0,70
Sumenep	70,42	12,41	4,89	7.577	62,38	1,55
Kota Kediri	73,62	14,30	9,88	10.733	75,67	1,41
Kota Blitar	73,00	13,53	9,87	12.258	76,00	0,98
Kota Malang	72,60	15,23	10,13	15.420	80,05	1,39
Kota Probolinggo	69,72	13,32	8,46	10.558	71,01	0,73

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Kota Pasuruan	70,84	13,56	9,07	11.963	73,78	0,75
Kota Mojokerto	72,69	13,33	9,92	12.060	75,54	0,67
Kota Madiun	72,41	14,06	11,08	14.723	79,48	0,85
Kota Surabaya	73,85	13,52	10,24	15.991	79,47	0,76
Kota Batu	72,16	13,16	8,44	11.274	72,62	1,02
BANTEN	69,43	12,35	8,27	11.261	70,27	0,55
Pandeglang	63,51	13,39	6,60	7.730	62,72	1,07
Lebak	66,28	11,90	5,86	8.111	62,03	0,64
Tangerang	69,28	11,89	8,22	11.727	70,05	0,69
Serang	63,59	12,36	6,90	10.004	64,61	1,00
Kota Tangerang	71,29	12,90	10,20	13.766	76,08	0,28
Kota Cilegon	66,15	13,10	9,67	12.127	71,81	0,35
Kota Serang	67,33	12,36	8,59	12.289	70,51	0,35
Kota Tangerang Selatan	72,12	13,61	11,57	14.588	79,38	0,26
BALI	71,35	12,97	8,26	13.078	73,27	1,09
Jembrana	71,43	11,88	7,54	11.168	69,66	1,44
Tabanan	72,74	12,47	8,07	13.665	73,54	1,19
Badung	74,31	13,45	9,44	16.409	78,86	1,12
Gianyar	72,84	13,35	8,49	13.578	75,03	0,99
Klungkung	70,11	12,85	6,98	10.711	68,98	1,00
Bangli	69,54	11,36	6,41	10.649	66,24	0,75
Karangasem	69,48	12,11	5,42	9.556	64,68	1,05
Buleleng	70,81	12,37	6,77	12.587	70,03	1,26
Kota Denpasar	73,91	13,75	11,02	18.849	82,24	0,72
NUSA TENGGARA BARAT	65,38	13,04	6,71	9.241	65,19	1,36
Lombok Barat	65,10	12,66	5,69	10.588	64,62	1,73
Lombok Tengah	64,75	12,81	5,54	8.846	62,74	1,39
Lombok Timur	64,44	13,12	6,15	8.100	62,83	1,22
Sumbawa	66,02	12,27	7,52	7.743	63,91	1,64
Dompu	65,36	13,27	7,83	7.479	64,56	1,61
Bima	64,86	13,11	7,36	7.371	63,48	1,39
Sumbawa Barat	66,35	13,57	7,68	10.234	68,38	1,77
Lombok Utara	65,59	12,34	5,22	7.940	61,15	1,63
Kota Mataram	70,43	15,28	9,05	13.399	76,37	0,58
Kota Bima	69,12	14,95	9,96	9.594	72,99	1,05
NUSA TENGGARA TIMUR	65,96	12,84	6,93	7.003	62,67	0,66
Sumba Barat	66,11	12,40	6,44	6.776	61,36	0,76
Sumba Timur	63,88	12,04	6,31	8.883	62,54	0,81
Kupang	63,17	13,47	6,88	7.085	62,04	0,60
Timor Tengah Selatan	65,55	12,52	6,26	6.118	59,90	0,83

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Timor Tengah Utara	66,09	13,26	6,87	5.799	60,96	0,92
Belu	63,01	11,80	7,05	7.083	60,54	1,38
Alor	60,23	11,41	7,75	6.346	58,50	0,88
Lembata	65,85	11,86	7,51	6.888	62,16	1,16
Flores Timur	64,28	11,90	6,98	7.150	61,24	1,35
Sikka	66,10	11,54	6,54	7.618	61,81	0,73
Ende	64,37	13,73	7,37	8.679	65,54	0,45
Ngada	67,32	12,32	7,60	8.085	65,10	0,72
Manggarai	65,48	11,60	6,81	6.875	60,87	1,31
Rote Nda	62,86	12,22	6,45	5.946	58,32	0,86
Manggarai Barat	65,98	10,41	6,81	7.012	60,04	0,68
Sumba Tengah	67,65	11,65	5,12	5.821	57,91	0,54
Sumba Barat Daya	67,08	12,79	6,29	5.933	60,53	1,06
Nageko	66,25	11,61	7,33	7.906	63,33	0,98
Manggarai Timur	67,27	10,30	6,43	5.246	56,83	0,46
Sabu Raijua	58,38	12,71	5,56	4.781	53,28	1,45
Malaka	64,15	12,01	6,08	5.563	57,51	1,00
Kota Kupang	68,34	15,75	11,43	12.856	77,95	0,49
KALIMANTAN BARAT	69,87	12,25	6,93	8.279	65,59	1,08
Sambas	67,94	11,70	6,13	9.195	64,14	1,36
Bengkayang	72,99	11,14	5,98	8.489	64,65	0,38
Landak	72,07	12,03	7,06	6.670	64,12	0,84
Pontianak	70,28	11,91	6,45	7.238	63,37	0,94
Sanggau	70,58	10,67	6,74	7.622	63,05	1,60
Ketapang	70,51	10,95	6,56	8.350	64,03	1,19
Sintang	71,05	10,84	6,70	8.224	64,18	1,56
Kapuas Hulu	71,94	11,83	7,00	6.640	63,73	1,32
Sekadau	70,90	11,23	6,55	6.795	62,34	0,57
Melawai	72,38	10,78	6,42	7.841	63,78	1,42
Kayong Utara	67,33	11,74	5,37	6.950	60,09	2,69
Kubu Raya	69,74	12,55	6,56	7.994	65,02	0,77
Kota Pontianak	72,11	14,48	9,77	13.737	77,52	1,16
Kota Singkawang	71,04	12,84	7,28	10.982	70,03	0,27
KALIMANTAN TENGAH	69,54	12,22	8,03	9.809	68,53	1,13
Kotawaringin Barat	70,07	12,13	8,01	11.979	70,60	0,66
Kotawaringin Timur	69,51	12,05	7,70	10.525	68,61	0,24
Kapuas	68,40	11,64	6,94	9.894	66,07	1,20
Barito Selatan	66,48	11,99	8,59	10.570	68,27	2,50
Barito Utara	71,01	11,50	8,33	8.534	67,38	1,63
Sukamara	71,24	11,55	7,81	7.709	65,80	2,10

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Lamandau	69,12	12,43	7,68	9.999	68,30	1,14
Seruyan	68,88	11,56	7,45	8.026	64,77	2,01
Katingan	65,28	12,03	8,62	9.599	66,81	1,55
Pulang Pisau	67,64	12,16	7,59	8.639	65,76	1,17
Gunung Mas	69,89	11,44	8,93	10.044	69,24	1,63
Barito Timur	67,71	12,31	9,02	10.570	69,71	0,85
Murung Raya	69,21	11,69	7,36	9.328	66,46	0,54
Kota Palangka Raya	72,97	14,90	10,74	12.629	78,62	0,15
KALIMANTAN SELATAN	67,80	12,21	7,76	10.891	68,38	1,11
Tanah Laut	68,62	11,25	7,29	10.753	66,99	0,74
Kota Baru	68,49	11,41	6,99	10.645	66,61	1,30
Banjar	65,97	11,16	6,99	12.185	66,39	1,03
Barito Kuala	64,94	11,72	6,81	9.062	63,53	1,55
Tapin	69,47	11,21	7,43	10.905	67,67	1,00
Hulu Sungai Selatan	64,14	11,83	7,67	11.161	66,31	1,63
Hulu Sungai Tengah	64,83	11,94	7,52	11.142	66,56	1,83
Hulu Sungai Utara	62,49	12,78	6,73	8.298	62,49	1,90
Tabalong	69,74	12,32	8,24	10.171	69,35	1,44
Tanah Bumbu	69,19	11,42	7,38	10.781	67,58	0,96
Balangan	66,95	11,48	6,46	10.736	65,34	1,40
Kota Banjarmasin	70,32	13,76	9,90	12.834	75,41	0,62
Kota Banjar Baru	71,36	14,75	10,75	12.467	77,56	0,33
KALIMANTAN TIMUR	73,65	13,18	9,15	11.229	74,17	0,48
Pasir	71,98	12,65	8,12	9.900	70,30	0,62
Kutai Barat	72,19	12,30	8,02	9.380	69,34	0,61
Kutai	71,60	13,25	8,68	10.250	71,78	0,83
Kutai Timur	72,39	12,43	8,69	9.704	70,76	0,52
Berau	71,31	13,17	8,62	11.572	72,72	0,64
Penajam Paser Utara	70,53	12,02	7,59	10.913	69,26	0,95
Mahakam Ulu	71,13	12,03	7,36	7.162	64,89	0,88
Kota Balikpapan	73,95	13,46	10,44	13.705	78,18	0,33
Kota Samarinda	73,65	14,17	10,31	13.825	78,69	0,38
Kota Bontang	73,69	12,77	10,38	15.980	78,78	0,25
KALIMANTAN UTARA	72,16	12,54	8,36	8.354	68,76	0,18
Malinau	71,03	13,23	8,29	9.415	70,15	0,22
Bulongan	72,21	12,56	8,29	8.877	69,37	0,17
Tana Tidung	70,81	12,16	7,85	6.807	64,92	0,35
Nunukan	70,83	12,41	7,22	6.199	63,35	0,35
Kota Tarakan	73,52	13,41	9,91	10.642	74,70	0,14
SULAWESI UTARA	70,99	12,43	8,88	9.729	70,39	0,62

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Bolaang Mongondow	68,42	10,94	7,14	9.369	65,03	0,78
Minahasa	70,35	13,53	9,54	11.405	73,59	1,14
Kep.Sangihe Talaud	69,17	11,45	7,50	10.536	67,56	1,10
Kepulauan Talaud	69,33	11,86	8,82	8.008	66,92	0,55
Minahasa Selatan	69,10	11,44	8,70	10.674	69,18	1,19
Minahasa Utara	70,79	12,12	9,23	10.410	71,09	0,78
Bolaang Mongondow Utara	66,84	11,85	7,52	8.212	64,46	0,34
Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,59	11,06	8,34	7.537	65,00	1,01
Minahasa Tenggara	69,48	11,50	8,38	9.679	68,05	0,28
Bolaang Mongondow Selatan	63,97	12,20	7,70	8.242	63,72	0,24
Bolaang Mongondow Timur	67,21	11,45	7,38	8.025	63,81	1,10
Kota Manado	71,28	13,83	11,02	12.933	77,32	0,07
Kota Bitung	70,45	11,77	9,28	11.513	71,64	1,06
Kota Tomohon	70,95	14,14	10,22	10.469	74,36	1,09
Kota Kotamobago	69,64	12,33	9,75	9.743	70,70	0,34
SULAWESI TENGAH	67,26	12,72	7,97	8.768	66,76	0,49
Banggai Kepulauan	64,35	12,71	7,73	7.161	62,97	1,02
Banggai	69,93	12,33	7,72	8.895	67,44	0,48
Morowali	68,06	12,63	8,38	10.245	69,12	1,78
Poso	70,09	13,15	8,52	7.971	68,13	0,71
Donggala	65,79	12,42	7,81	7.407	63,82	0,42
Toli-Toli	63,95	12,67	7,72	7.156	62,72	1,30
Buol	66,86	13,04	8,32	7.475	65,61	0,30
Parigi Moutong	63,17	11,84	6,72	9.150	62,79	0,94
Tojo Una-Una	63,95	11,31	7,65	7.171	61,33	0,29
Sigi	68,66	12,30	8,13	7.376	65,35	1,10
Banggai Laut	63,48	12,58	7,82	7.406	62,90	1,25
Morowali Utara	68,29	11,69	8,15	8.422	66,00	0,29
Kota Palu	69,93	15,52	11,24	14.545	79,63	0,64
SULAWESI SELATAN	69,80	12,99	7,64	9.992	69,15	0,96
Selayar	67,70	12,29	7,16	7.793	64,32	1,05
Bulukumba	66,73	12,32	6,68	9.777	65,58	0,52
Bantaeng	69,77	11,67	6,16	10.467	66,20	0,65
Jeneponto	65,49	11,70	5,64	8.489	61,61	0,26
Takalar	66,20	11,61	6,57	9.423	64,07	0,86
Gowa	69,88	12,74	7,24	8.578	66,87	1,13
Sinjai	66,46	12,34	7,05	8.433	64,48	1,02
Maros	68,55	12,67	7,19	9.468	67,13	0,72
Pangkajene Kepulauan	65,67	12,38	7,32	10.517	66,65	0,75

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Barro	68,03	13,53	7,60	9.811	68,64	1,03
Bone	66,01	12,41	6,55	7.930	63,11	1,64
Soppeng	68,52	11,81	7,05	8.835	65,33	0,92
Wajo	66,23	13,07	6,37	11.047	66,90	0,61
Sidenreng Rappang	68,57	12,88	7,32	11.004	69,00	1,26
Pinrang	68,43	13,17	7,47	10.791	69,24	0,48
Enrekang	70,31	13,30	8,05	9.818	70,03	0,94
Luwu	69,44	12,88	7,74	9.160	68,11	1,15
Tana Toraja	72,41	13,23	7,91	6.273	65,75	1,04
Luwu Utara	67,40	12,11	7,38	10.697	67,44	0,80
Luwu Timur	69,64	12,36	7,87	11.926	70,43	0,98
Toraja Utara	72,80	12,95	7,71	7.033	66,76	0,92
Kota Makasar	71,47	14,76	10,77	15.669	79,94	0,75
Kota Pare Pare	70,59	14,44	10,01	12.817	76,31	0,85
Kota Palopo	70,20	15,02	10,25	12.005	76,27	0,82
SULAWESI TENGGARA	70,44	13,07	8,18	8.697	68,75	1,00
Buton	67,17	12,81	6,82	6.829	62,78	0,76
Muna	69,76	12,89	7,33	7.742	65,99	1,38
Konawe/Kab Kendari	69,45	12,95	8,59	9.471	69,56	1,28
Kolaka	69,90	11,91	8,18	11.942	70,47	0,39
Konawe Selatan	69,87	11,90	7,70	8.386	66,32	1,11
Bombana	67,62	11,79	7,51	7.392	63,65	0,42
Wakatobi	69,49	12,82	7,69	8.484	67,22	0,40
Kolaka Utara	69,49	11,64	7,48	9.535	66,90	1,72
Buton Utara	70,36	12,27	7,92	6.998	65,23	0,89
Konawe Utara	68,59	11,65	8,24	8.619	66,44	0,63
Kolaka Timur	71,51	11,06	6,39	7.157	62,74	0,98
Konawe Kepulauan	67,86	10,46	8,71	6.093	61,72	0,67
Muna Barat	69,76	11,62	6,23	7.063	62,29	0,59
Buton Tengah	67,17	12,30	6,79	6.759	62,13	0,70
Buton Selatan	67,17	12,53	6,55	6.715	62,00	0,80
Kota Kendari	72,94	16,04	11,66	13.558	81,43	0,15
Kota Bau-Bau	70,43	14,77	9,80	9.852	73,59	0,63
GORONTALO	67,12	12,70	7,05	9.035	65,86	1,05
Boalemo	67,49	12,07	6,23	7.817	62,86	1,09
Gorontalo	66,63	11,99	6,63	8.398	63,63	1,17
Pokuwato	62,43	12,03	6,62	9.146	62,50	1,23
Bone Bolango	67,60	12,76	7,73	8.900	66,83	1,20
Gorontalo Utara	64,99	11,96	6,61	8.178	62,55	1,01
Kota Gorontalo	71,69	14,18	10,29	11.269	75,62	0,87

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
SULAWESI BARAT	64,22	12,22	6,94	8.260	62,96	1,17
Majene	60,51	13,52	7,74	9.227	64,40	1,03
Polewali Mamasa	61,54	12,83	6,77	7.331	60,87	1,30
Mamasa	70,38	11,31	6,92	7.102	63,17	0,51
Mamuju	66,38	12,95	6,94	8.557	65,09	0,59
Mamuju Utara	64,93	11,21	7,30	10.150	64,69	1,01
Mamuju Tengah	67,20	11,36	6,86	7.404	62,22	1,21
MALUKU	65,31	13,56	9,16	8.026	67,05	0,48
Maluku Tenggara Barat	62,80	11,82	8,98	5.697	60,26	0,76
Maluku Tenggara	64,28	12,07	9,05	6.851	63,35	0,97
Maluku Tengah	65,79	13,56	8,89	9.578	68,85	0,22
Buru	65,60	12,25	7,43	9.615	65,75	0,93
Kepulauan Aru	61,97	11,18	8,13	6.941	60,50	0,99
Seram Bagian Barat	60,50	12,84	8,42	7.921	63,02	1,01
Seram Bagian Timur	58,10	11,74	7,30	8.615	60,27	1,30
Maluku Barat Daya	61,13	11,55	7,61	6.189	58,64	0,95
Buru Selatan	65,46	11,82	6,95	7.026	61,48	1,21
Kota Ambon	69,56	15,89	11,63	13.318	79,30	0,27
Kota Tual	64,06	13,86	9,67	6.683	65,20	0,37
MALUKU UTARA	67,44	13,10	8,37	7.423	65,91	1,11
Halmahera Barat	65,35	12,61	7,77	6.889	62,97	1,46
Halmahera Tengah	62,40	12,29	7,85	7.359	62,07	0,94
Kepulauan Sula	62,39	11,83	7,95	6.545	60,50	0,53
Halmahera Selatan	65,03	11,91	7,15	6.791	61,26	1,53
Halmahera Utara	68,77	12,69	8,06	6.957	65,04	1,34
Halmahera Timur	67,49	12,09	7,57	7.410	63,99	1,16
Pulau Morotai	65,98	11,59	6,84	5.809	59,27	1,60
Pulau Taliabu	61,08	11,48	7,41	6.158	58,26	1,65
Kota Ternate	70,07	15,05	11,12	12.529	77,64	0,63
Kota Tidore Kepulauan	68,43	13,27	8,91	7.631	67,45	1,02
PAPUA BARAT	65,19	12,06	7,01	7.064	61,73	0,75
Fak-Fak	67,72	13,26	8,12	6.796	64,92	0,30
Kaimana	63,59	11,23	7,65	7.341	61,33	0,42
Teluk Wondama	58,66	10,33	6,52	7.317	56,64	0,67
Teluk Bintuni	59,12	11,30	7,45	9.129	61,09	1,13
Manokwari	67,69	13,38	7,75	11.328	69,91	0,80
Sorong Selatan	65,35	11,71	6,84	5.550	58,60	0,63
Sorong	65,25	12,60	7,46	6.457	61,86	1,02
Raja Ampat	64,06	11,44	7,39	7.191	61,23	0,62
Tambrauw	59,02	10,80	4,61	4.431	49,77	0,75

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran *) per Kapita (ribu rupiah per tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Maybrat	64,65	12,21	6,22	4.576	55,78	0,77
Manokwari Selatan	66,68	12,19	6,21	4.578	56,59	2,30
Pegunungan Arfak	66,49	11,06	4,86	4.570	53,73	0,07
Kota Sorong	69,04	13,99	10,87	12.590	75,91	0,17
PAPUA	65,09	9,95	5,99	6.469	57,25	0,88
Merauke	66,50	12,47	8,24	9.953	67,75	0,63
Jayawijaya	58,29	10,82	4,59	7.068	54,18	1,51
Jayapura	66,32	13,79	9,48	9.622	70,04	0,71
Nabire	67,44	10,62	9,47	8.725	66,49	0,36
Yapen Waropen	68,67	11,51	8,80	7.320	65,28	0,61
Biak Namfor	67,86	13,44	9,83	9.603	70,85	0,75
Paniai	65,45	10,31	3,76	6.161	54,20	0,51
Puncak Jaya	64,17	5,97	3,19	4.979	44,87	1,22
Mimika	71,89	10,78	9,38	10.952	70,89	0,70
Boven Digoel	58,24	10,96	7,72	7.717	59,02	1,40
Mappi	64,02	10,42	5,97	5.780	56,11	0,67
Asmat	55,50	7,57	4,38	5.533	46,62	1,53
Yahukimo	65,06	7,48	3,98	4.109	46,63	0,58
Pegunungan Bintang	63,78	4,85	2,06	5.176	40,91	3,12
Tolikara	64,86	7,68	3,06	4.518	46,38	0,47
Sarmi	65,69	10,91	8,07	6.379	60,99	0,85
Keerom	66,09	11,55	6,85	8.609	63,43	1,12
Waropen	65,73	12,34	8,55	6.070	62,35	0,62
Supiori	65,25	12,69	8,12	5.180	60,09	0,66
Membramo Raya	56,57	10,65	4,61	4.324	48,29	0,86
Nduga	53,60	2,17	0,64	3.625	25,47	0,37
Lanny Jaya	64,86	7,45	2,75	3.965	44,18	2,08
Mamberamo Tengah	62,72	7,65	2,49	4.051	43,55	0,83
Yalimo	64,86	7,71	2,08	4.321	44,32	0,25
Puncak	65,08	4,47	1,61	5.118	39,41	3,59
Dogiyai	64,86	9,58	4,88	5.120	52,78	1,01
Intan Jaya	64,98	6,28	2,48	5.015	44,35	1,93
Deiyai	64,47	9,76	2,96	4.320	48,28	0,34
Kota Jayapura	69,97	14,16	11,11	14.249	78,05	0,24
INDONESIA	70,78	12,55	7,84	10.150	69,55	0,93

Lampiran 3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Provinsi, 2011-2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45
SUMATERA UTARA	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51
SUMATERA BARAT	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98
RIAU	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84
JAMBI	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89
SUMATERA SELATAN	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46
BENGKULU	65,96	66,61	67,50	68,06	68,59
LAMPUNG	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95
KEP. BANGKA BELITUNG	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05
KEPULAUAN RIAU	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75
DKI JAKARTA	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99
JAWA BARAT	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
JAWA TENGAH	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
D I YOGYAKARTA	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59
JAWA TIMUR	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95
BANTEN	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27
BALI	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27
NUSA TENGGARA BARAT	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19
NUSA TENGGARA TIMUR	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67
KALIMANTAN BARAT	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59
KALIMANTAN TENGAH	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
KALIMANTAN SELATAN	65,89	66,68	67,17	67,63	68,38
KALIMANTAN TIMUR	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17
KALIMANTAN UTARA			67,99	68,64	68,76
SULAWESI UTARA	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39
SULAWESI TENGAH	64,27	65,00	65,79	66,43	66,76
SULAWESI SELATAN	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15
SULAWESI TENGGARA	66,52	67,07	67,55	68,07	68,75
GORONTALO	63,48	64,16	64,70	65,17	65,86
SULAWESI BARAT	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96
MALUKU	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05
MALUKU UTARA	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91
PAPUA BARAT	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73
PAPUA	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25
INDONESIA	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Lampiran 4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	67,45	67,81	68,30	68,81	69,45
Simeulue	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16
Aceh Singkil	63,13	64,23	64,87	65,27	66,05
Aceh Selatan	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28
Aceh Tenggara	64,27	64,99	65,55	65,90	66,77
Aceh Timur	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55
Aceh Tengah	70,00	70,18	70,51	70,96	71,51
Aceh Barat	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41
Aceh Besar	69,94	70,10	70,61	71,06	71,70
Pidie	66,95	67,30	67,59	67,87	68,68
Bireuen	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77
Aceh Utara	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85
Aceh Barat Daya	61,75	62,15	62,62	63,08	63,77
Gayo Lues	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67
Aceh Tamiang	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03
Nagan Raya	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73
Aceh Jaya	65,17	66,42	66,92	67,30	67,53
Bener Meriah	68,24	69,14	69,74	70,00	70,62
Pidie Jaya	68,69	68,90	69,26	69,89	70,49
Kota Banda Aceh	80,87	81,30	81,84	82,22	83,25
Kota Sabang	70,15	70,84	71,07	71,50	72,51
Kota Langsa	72,15	72,75	73,40	73,81	74,74
Kota Lhokseumawe	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11
Kota Subulussalam	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32
SUMATERA UTARA	67,34	67,74	68,36	68,87	69,51
Nias	55,55	56,50	57,43	57,98	58,85
Mandailing Natal	61,60	62,26	62,91	63,42	63,99
Tapanuli Selatan	65,14	65,95	66,75	67,22	67,63
Tapanuli Tengah	65,16	65,43	65,64	66,16	67,06
Tapanuli Utara	69,24	69,83	70,50	70,70	71,32
Toba Samosir	71,39	71,89	72,36	72,79	73,40
Labuhan Batu	67,88	68,64	69,45	70,06	70,23
Asahan	65,87	66,23	66,58	67,51	68,40
Simalungun	69,03	69,79	70,28	70,89	71,24
Dairi	66,62	66,95	67,15	67,91	69,00
Karo	71,12	71,40	71,62	71,84	72,69
Deli Serdang	70,25	70,88	71,39	71,98	72,79
Langkat	65,77	66,18	67,17	68,00	68,53
Nias Selatan	55,50	55,97	56,78	57,78	58,74

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Humbang Hasundutan	64,06	64,54	64,92	65,59	66,03
Pakpak Barat	63,11	63,88	64,73	65,06	65,53
Samosir	65,81	66,31	66,80	67,80	68,43
Serdang Bedagai	65,28	66,14	67,11	67,78	68,01
Batu Bara	63,95	64,45	65,06	65,50	66,02
Padang Lawas Utara	65,22	65,65	66,13	66,50	67,35
Padang Lawas	63,28	64,05	64,62	65,50	65,99
Labuhan Batu Selatan	65,77	67,06	67,78	68,59	69,67
Labuhan Batu Utara	67,37	67,84	68,28	69,15	69,69
Nias Utara	57,53	57,87	58,29	59,18	59,88
Nias Barat	55,43	56,20	56,58	57,54	58,25
Kota Sibolga	69,17	69,71	70,45	71,01	71,64
Kota Tanjung Balai	64,13	64,89	65,40	66,05	66,74
Kota Pematang Siantar	73,61	74,51	75,05	75,83	76,34
Kota Tebing Tinggi	70,84	71,34	71,85	72,13	72,81
Kota Medan	77,54	77,78	78,00	78,26	78,87
Kota Binjai	70,85	71,54	72,02	72,55	73,81
Kota Padang Sidempuan	71,08	71,38	71,68	71,88	72,80
Kota Gunung Sitoli	63,71	64,34	65,25	65,91	66,41
SUMATERA BARAT	67,81	68,36	68,91	69,36	69,98
Kepulauan Mentawai	55,90	56,10	56,33	56,73	57,41
Pesisir Selatan	65,80	66,49	67,31	67,75	68,07
Solok	65,28	65,62	66,15	66,44	67,12
Sawah Lunto/Sijunjung	62,92	63,70	64,48	64,95	65,30
Tanah Datar	66,92	67,29	68,12	68,51	69,49
Padang Pariaman	65,89	66,20	67,15	67,56	68,04
Agam	66,94	67,95	68,73	69,32	69,84
Limapuluh Koto	65,20	65,87	66,30	66,78	67,65
Pasaman	61,57	62,26	62,91	63,33	64,01
Solok Selatan	64,81	65,12	65,86	66,29	67,09
Dharmas Raya	67,40	67,76	68,71	69,27	69,84
Pasaman Barat	62,55	63,33	63,92	64,56	65,26
Kota Padang	78,68	79,00	79,23	79,83	80,36
Kota Solok	74,68	75,02	75,54	76,20	76,83
Kota Sawah Lunto	67,97	68,59	69,07	69,61	69,87
Kota Padang Panjang	73,76	74,22	74,54	75,05	75,98
Kota Bukit Tinggi	76,30	76,92	77,67	78,02	78,72
Kota Payakumbuh	75,39	75,89	76,34	76,49	77,42
Kota Pariaman	73,07	73,47	74,51	74,66	74,98
RIAU	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84
Kuantan Sengingi	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32
Indragiri Hulu	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00
Indragiri Hilir	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Pelalawan	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82
Siak	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17
Kampar	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28
Rokan Hulu	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29
Bengkalis	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29
Rokan Hilir	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81
Kepulauan Meranti	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25
Kota Pekanbaru	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32
Kota Dumai	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20
JAMBI	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89
Kerinci	65,85	66,71	67,49	67,96	68,89
Merangin	64,40	65,31	65,82	66,21	67,15
Sarolangun	65,20	66,16	67,13	67,67	68,10
Batanghari	66,32	66,97	67,24	67,68	68,05
Muara Jambi	63,39	64,17	65,14	65,71	66,66
Tanjung Jabung Timur	57,77	58,63	59,41	59,88	61,12
Tanjung Jabung Barat	61,98	62,86	63,54	64,04	65,03
Tebo	64,45	65,23	65,91	66,63	67,29
Bungo	66,70	67,20	67,54	67,93	68,34
Kota Jambi	72,96	73,78	74,21	74,86	75,58
Kota Sungai Penuh	70,55	71,23	72,09	72,48	73,03
SUMATERA SELATAN	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46
Ogan Komering Ulu	64,62	65,09	65,51	66,21	67,18
Ogan Komering Ilir	61,68	62,29	63,52	63,87	64,73
Muara Enim (Liot)	62,82	63,34	64,34	65,02	65,82
Lahat	62,93	63,66	64,15	64,52	65,25
Musi Rawas	60,63	61,37	62,23	63,19	64,11
Musi Banyuasin	62,56	63,27	64,18	64,93	65,76
Banyuasin	61,04	61,69	62,42	63,21	64,15
Ogan Komering Ulu Selatan	59,74	60,63	61,58	61,94	62,57
Ogan Komering Ulu Timur	64,27	65,18	66,09	66,74	67,17
Ogan Ilir	62,47	63,03	63,64	64,49	65,35
Empat Lawang	61,86	62,30	62,74	63,17	63,55
Penukal Abab Lematang Ilir			59,69	59,89	60,83
Musi Rawas Utara			60,56	61,34	62,32
Kota Palembang	74,08	74,74	75,49	76,02	76,29
Kota Prabumulih	70,32	70,95	71,87	72,20	73,19
Kota Pagar Alam	62,71	63,33	64,14	64,75	65,37
Kota Lubuk Linggau	71,62	72,04	72,55	72,84	73,17
BENGGULU	65,96	66,61	67,50	68,06	68,59
Bengkulu Selatan	66,50	66,77	67,61	68,28	68,57
Rejang Lebong	64,92	65,51	66,11	66,55	67,51
Bengkulu Utara	64,61	65,47	66,67	67,27	67,46

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kaur	61,85	62,32	63,17	63,75	64,47
Seluma	61,01	61,55	62,10	62,94	63,41
Mukomuko	63,71	64,16	64,79	65,31	65,77
Lebong	62,43	62,84	63,15	63,90	64,72
Kepahiang	63,44	63,86	64,44	65,22	65,45
Bengkulu Tengah	62,54	63,12	63,71	64,10	64,68
Kota Bengkulu	75,31	75,71	76,16	76,49	77,16
LAMPUNG	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95
Lampung Barat	61,92	62,51	63,21	63,54	64,54
Tanggamus	60,63	61,14	61,89	62,67	63,66
Lampung Selatan	61,95	62,68	63,35	63,75	65,22
Lampung Timur	64,10	65,10	66,07	66,42	67,10
Lampung Tengah	64,71	65,60	66,57	67,07	67,61
Lampung Utara	62,67	62,93	64,00	64,89	65,20
Way Kanan	62,04	62,79	63,92	64,32	65,18
Tulang Bawang	63,67	64,11	64,91	65,83	66,08
Pesawaran	59,44	59,98	60,94	61,70	62,70
Pringsewu	64,86	65,37	66,14	66,58	67,55
Mesuji	57,32	57,67	58,16	58,71	59,79
Tulang Bawang Barat	60,13	60,77	61,46	62,46	63,01
Pesisir Barat			58,95	59,76	60,55
Kota Bandar Lampung	72,04	72,88	73,93	74,34	74,81
Kota Metro	72,23	72,86	74,27	74,98	75,10
KEP. BANGKA BELITUNG	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05
Bangka	67,37	67,99	69,34	69,79	70,03
Belitung	67,17	67,87	69,27	69,56	70,29
Bangka Barat	64,00	64,92	65,85	66,43	67,23
Bangka Tengah	66,09	66,88	67,67	68,09	68,66
Bangka Selatan	60,53	61,17	62,96	63,54	63,89
Belitung Timur	65,86	66,59	67,71	68,10	68,83
Kota Pangkal Pinang	75,02	75,69	76,14	76,28	76,61
KEPULAUAN RIAU	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75
Karimun	66,82	67,67	68,52	68,72	69,21
Bintan	70,47	71,01	71,31	71,65	71,92
Natuna	67,76	68,80	69,39	70,06	70,87
Lingga	58,51	59,38	60,13	60,75	61,28
Kepulauan Anambas	63,71	64,32	64,86	65,12	65,86
Kota Batam	77,82	78,39	78,65	79,13	79,34
Kota Tanjung Pinang	74,86	75,91	76,70	77,29	77,57
DKI JAKARTA	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99
Kep. Seribu	65,79	66,92	67,62	68,48	68,84
Kota Jakarta Selatan	81,22	81,72	82,72	82,94	83,37
Kota Jakarta Timur	78,82	79,52	79,88	80,40	80,73

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Jakarta Pusat	77,97	78,44	78,81	79,03	79,69
Kota Jakarta Barat	77,41	78,05	78,79	79,38	79,72
Kota Jakarta Utara	76,12	76,89	77,16	77,29	78,30
JAWA BARAT	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50
Bogor	64,78	65,66	66,74	67,36	67,77
Sukabumi	61,14	62,27	63,63	64,07	64,44
Cianjur	59,38	60,28	61,68	62,08	62,42
Bandung	67,78	68,13	68,58	69,06	70,05
Garut	60,55	61,04	61,67	62,23	63,21
Tasikmalaya	61,05	61,69	62,40	62,79	63,17
Ciamis	65,48	66,29	67,20	67,64	68,02
Kuningan	65,04	65,60	66,16	66,63	67,19
Cirebon	64,17	64,48	65,06	65,53	66,07
Majalengka	62,67	63,13	63,71	64,07	64,75
Sumedang	66,16	67,36	68,47	68,76	69,29
Indramayu	61,47	62,09	62,98	63,55	64,36
Subang	64,21	64,86	65,48	65,80	66,52
Purwakarta	65,51	66,30	67,09	67,32	67,84
Karawang	65,21	65,97	66,61	67,08	67,66
Bekasi	68,66	69,38	70,09	70,51	71,19
Bandung Barat	62,36	63,17	63,93	64,27	65,23
Pangandaran			64,73	65,29	65,62
Kota Bogor	71,72	72,25	72,86	73,10	73,65
Kota Sukabumi	68,67	69,74	70,81	71,19	71,84
Kota Bandung	78,13	78,30	78,55	78,98	79,67
Kota Cirebon	71,49	71,97	72,27	72,93	73,34
Kota Bekasi	77,48	77,71	78,63	78,84	79,63
Kota Depok	76,96	77,28	78,27	78,58	79,11
Kota Cimahi	74,41	74,99	75,85	76,06	76,42
Kota Tasikmalaya	67,18	67,84	68,63	69,04	69,99
Kota Banjar	67,15	67,53	68,01	68,34	69,31
JAWA TENGAH	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
Cilacap	64,73	65,72	66,80	67,25	67,77
Banyumas	67,45	68,06	68,55	69,25	69,89
Purbalingga	64,33	64,94	65,53	66,23	67,03
Banjarnegara	61,58	62,29	62,84	63,15	64,73
Kebumen	64,05	64,47	64,86	65,67	66,87
Purworejo	69,11	69,40	69,77	70,12	70,37
Wonosobo	63,07	64,18	64,57	65,20	65,70
Magelang	64,16	64,75	65,86	66,35	67,13
Boyolali	69,14	69,51	69,81	70,34	71,74
Klaten	71,16	71,71	72,42	73,19	73,81
Sukoharjo	72,34	72,81	73,22	73,76	74,53

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Wonogiri	64,75	65,75	66,40	66,77	67,76
Karanganyar	71,00	72,26	73,33	73,89	74,26
Sragen	68,12	68,91	69,95	70,52	71,10
Grobogan	65,41	66,39	67,43	67,77	68,05
Blora	63,88	64,70	65,37	65,84	66,22
Rembang	65,36	66,03	66,84	67,40	68,18
Pati	65,71	66,13	66,47	66,99	68,51
Kudus	69,89	70,57	71,58	72,00	72,72
Jepara	67,63	68,45	69,11	69,61	70,02
Demak	66,84	67,55	68,38	68,95	69,75
Semarang	70,35	70,88	71,29	71,65	71,89
Temanggung	64,14	64,91	65,52	65,97	67,07
Kendal	66,96	67,55	67,98	68,46	69,57
Batang	62,59	63,09	63,60	64,07	65,46
Pekalongan	64,72	65,33	66,26	66,98	67,40
Pemalang	59,66	60,78	61,81	62,35	63,70
Tegal	61,97	62,67	63,50	64,10	65,04
Brebes	60,51	60,92	61,87	62,55	63,18
Kota Magelang	74,47	75,00	75,29	75,79	76,39
Kota Surakarta	78,00	78,44	78,89	79,34	80,14
Kota Salatiga	78,76	79,10	79,37	79,98	80,96
Kota Semarang	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23
Kota Pekalongan	69,54	69,95	70,82	71,53	72,69
Kota Tegal	70,03	70,68	71,44	72,20	72,96
D I YOGYAKARTA	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59
Kulon Progo	69,53	69,74	70,14	70,68	71,52
Bantul	75,79	76,13	76,78	77,11	77,99
Gunung Kidul	64,83	65,69	66,31	67,03	67,41
Sleman	80,04	80,10	80,26	80,73	81,20
Kota Yogyakarta	82,98	83,29	83,61	83,78	84,56
JAWA TIMUR	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95
Pacitan	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92
Ponorogo	65,28	66,16	67,03	67,40	68,16
Trenggalek	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25
Tulungagung	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07
Blitar	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13
Kediri	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91
Malang	63,97	64,71	65,20	65,59	66,63
Lumajang	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02
Jember	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04
Banyuwangi	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08
Bondowoso	60,46	62,24	63,21	63,43	63,95
Situbondo	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Probolinggo	60,30	61,33	62,61	63,04	63,83
Pasuruan	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04
Sidoarjo	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43
Mojokerto	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85
Jombang	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59
Nganjuk	66,58	68,07	68,98	69,59	69,90
Madiun	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39
Magetan	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39
Ngawi	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32
Bojonegoro	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17
Tuban	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52
Lamongan	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84
Gresik	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57
Bangkalan	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49
Sampang	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18
Pamekasan	60,42	61,21	62,27	62,66	63,10
Sumenep	58,70	60,08	60,84	61,43	62,38
Kota Kediri	72,93	73,66	74,18	74,62	75,67
Kota Blitar	73,08	73,53	74,53	75,26	76,00
Kota Malang	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05
Kota Probolinggo	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01
Kota Pasuruan	70,41	72,01	72,89	73,23	73,78
Kota Mojokerto	73,47	74,20	74,91	75,04	75,54
Kota Madiun	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48
Kota Surabaya	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47
Kota Batu	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62
BANTEN	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27
Pandeglang	59,92	60,48	61,35	62,06	62,72
Lebak	59,82	60,22	61,13	61,64	62,03
Tangerang	68,45	68,83	69,28	69,57	70,05
Serang	61,97	62,97	63,57	63,97	64,61
Kota Tangerang	74,15	74,57	75,04	75,87	76,08
Kota Cilegon	69,26	70,07	70,99	71,57	71,81
Kota Serang	68,69	69,43	69,69	70,26	70,51
Kota Tangerang Selatan	76,99	77,68	78,65	79,17	79,38
BALI	70,87	71,62	72,09	72,48	73,27
Jembrana	67,53	67,94	68,39	68,67	69,66
Tabanan	71,35	71,69	72,31	72,68	73,54
Badung	76,66	77,26	77,63	77,98	78,86
Gianyar	72,50	73,36	74,00	74,29	75,03
Klungkung	67,01	67,64	68,08	68,30	68,98
Bangli	63,87	64,53	65,47	65,75	66,24
Karangasem	61,60	62,95	63,70	64,01	64,68

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Buleleng	67,73	68,29	68,83	69,16	70,03
Kota Denpasar	79,77	80,45	81,32	81,65	82,24
NUSA TENGGARA BARAT	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19
Lombok Barat	61,64	62,24	62,91	63,52	64,62
Lombok Tengah	59,77	60,57	61,25	61,88	62,74
Lombok Timur	59,84	60,73	61,43	62,07	62,83
Sumbawa	61,50	61,96	62,44	62,88	63,91
Dompu	61,84	62,60	63,16	63,53	64,56
Bima	60,62	61,05	62,08	62,61	63,48
Sumbawa Barat	65,94	66,45	66,86	67,19	68,38
Lombok Utara	57,13	58,19	59,20	60,17	61,15
Kota Mataram	73,50	74,22	75,22	75,93	76,37
Kota Bima	70,57	71,21	71,72	72,23	72,99
NUSA TENGGARA TIMUR	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67
Sumba Barat	59,33	59,98	60,55	60,90	61,36
Sumba Timur	60,43	60,89	61,44	62,04	62,54
Kupang	59,74	60,34	61,07	61,68	62,04
Timor Tengah Selatan	56,82	57,94	58,76	59,41	59,90
Timor Tengah Utara	57,87	59,04	59,56	60,41	60,96
Belu	56,63	57,58	59,12	59,72	60,54
Alor	56,01	56,47	57,52	58,00	58,50
Lembata	58,76	59,51	60,56	61,45	62,16
Flores Timur	58,15	58,93	59,80	60,42	61,24
Sikka	59,62	60,12	60,84	61,36	61,81
Ende	62,78	63,93	64,64	65,25	65,54
Ngada	62,80	63,57	64,43	64,64	65,10
Manggarai	58,02	58,92	59,49	60,08	60,87
Rote Nda	55,78	56,56	57,28	57,82	58,32
Manggarai Barat	57,75	58,13	59,02	59,64	60,04
Sumba Tengah	56,21	56,66	57,25	57,60	57,91
Sumba Barat Daya	57,35	58,22	59,26	59,90	60,53
Nageko	61,05	61,60	62,24	62,71	63,33
Manggarai Timur	54,97	55,28	55,74	56,58	56,83
Sabu Raijua	49,16	50,30	51,55	52,51	53,28
Malaka			56,14	56,94	57,51
Kota Kupang	75,74	76,38	77,24	77,58	77,95
KALIMANTAN BARAT	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59
Sambas	60,57	61,53	62,47	63,28	64,14
Bengkayang	62,94	63,42	63,99	64,40	64,65
Landak	61,67	62,38	62,72	63,59	64,12
Pontianak	59,95	60,75	62,09	62,78	63,37
Sanggau	60,96	61,39	61,72	62,06	63,05
Ketapang	61,47	62,04	62,85	63,27	64,03

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Sintang	60,80	61,66	62,64	63,19	64,18
Kapuas Hulu	60,83	61,85	62,63	62,90	63,73
Sekadau	59,76	60,14	61,02	61,98	62,34
Melawai	61,18	61,58	62,27	62,89	63,78
Kayong Utara	56,58	57,53	57,92	58,52	60,09
Kubu Raya	62,56	63,42	63,94	64,52	65,02
Kota Pontianak	75,08	75,55	75,98	76,63	77,52
Kota Singkawang	67,50	68,54	69,13	69,84	70,03
KALIMANTAN TENGAH	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
Kotawaringin Barat	68,53	68,63	69,51	70,14	70,60
Kotawaringin Timur	65,60	66,61	67,95	68,45	68,61
Kapuas	64,01	64,38	64,82	65,29	66,07
Barito Selatan	65,10	65,76	66,20	66,61	68,27
Barito Utara	64,36	64,72	65,12	66,30	67,38
Sukamara	62,86	63,52	63,92	64,44	65,80
Lamandau	65,99	66,49	67,23	67,53	68,30
Seruyan	62,16	62,39	62,81	63,49	64,77
Katingan	64,54	64,87	65,29	65,79	66,81
Pulang Pisau	64,06	64,28	64,76	65,00	65,76
Gunung Mas	66,85	67,30	67,75	68,13	69,24
Barito Timur	67,31	67,97	68,82	69,12	69,71
Murung Raya	64,39	64,85	65,62	66,10	66,46
Kota Palangka Raya	76,98	77,40	78,02	78,50	78,62
KALIMANTAN SELATAN	65,89	66,68	67,17	67,63	68,38
Tanah Laut	64,35	65,16	66,11	66,50	66,99
Kota Baru	64,27	64,87	65,41	65,76	66,61
Banjar	64,75	65,04	65,36	65,71	66,39
Barito Kuala	60,93	61,62	62,12	62,56	63,53
Tapin	65,41	65,92	66,48	66,99	67,67
Hulu Sungai Selatan	63,44	64,03	64,59	65,25	66,31
Hulu Sungai Tengah	63,90	64,34	64,63	65,37	66,56
Hulu Sungai Utara	59,24	60,12	60,77	61,32	62,49
Tabalong	66,60	67,36	68,08	68,36	69,35
Tanah Bumbu	65,59	66,13	66,51	66,94	67,58
Balangan	63,28	63,69	64,03	64,44	65,34
Kota Banjarmasin	72,01	73,45	74,59	74,94	75,41
Kota Banjar Baru	76,23	76,67	77,10	77,30	77,56
KALIMANTAN TIMUR	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17
Pasir	67,11	68,18	69,61	69,87	70,30
Kutai Barat	66,92	67,14	68,13	68,91	69,34
Kutai	68,47	69,12	70,71	71,20	71,78
Kutai Timur	67,73	68,71	69,79	70,39	70,76
Berau	70,43	70,77	72,02	72,26	72,72

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Penajam Paser Utara	66,92	67,17	68,07	68,60	69,26
Mahakam Ulu			63,81	64,32	64,89
Kota Balikpapan	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18
Kota Samarinda	77,05	77,34	77,84	78,39	78,69
Kota Bontang	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78
KALIMANTAN UTARA			67,99	68,64	68,76
Malinau	68,15	68,88	69,84	70,00	70,15
Bulongan	67,63	68,16	68,66	69,25	69,37
Tana Tidung	61,92	62,91	63,79	64,70	64,92
Nunukan	60,64	61,18	62,18	63,13	63,35
Kota Tarakan	71,60	72,53	73,58	74,60	74,70
SULAWESI UTARA	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39
Bolaang Mongondow	63,16	63,78	64,16	64,53	65,03
Minahasa	70,82	71,43	71,94	72,76	73,59
Kep.Sangihe Talaud	65,34	65,87	66,15	66,82	67,56
Kepulauan Talaud	64,86	65,51	66,14	66,56	66,92
Minahasa Selatan	66,61	67,26	67,68	68,36	69,18
Minahasa Utara	69,62	70,00	70,19	70,54	71,09
Bolaang Mongondow Utara	62,11	62,88	63,67	64,24	64,46
Kep. Siau Tagulandang Biaro	62,45	63,35	63,91	64,35	65,00
Minahasa Tenggara	66,07	67,10	67,34	67,86	68,05
Bolaang Mongondow Selatan	60,47	61,48	62,84	63,57	63,72
Bolaang Mongondow Timur	60,93	61,93	62,64	63,12	63,81
Kota Manado	75,47	76,15	76,56	77,27	77,32
Kota Bitung	69,31	69,89	70,35	70,88	71,64
Kota Tomohon	71,85	72,50	72,99	73,56	74,36
Kota Kotamobago	68,57	69,31	69,86	70,46	70,70
SULAWESI TENGAH	64,27	65,00	65,79	66,43	66,76
Banggai Kepulauan	60,54	61,09	61,74	62,33	62,97
Banggai	64,63	65,44	66,39	67,11	67,44
Morowali	66,03	66,48	66,86	67,91	69,12
Poso	65,59	66,20	66,94	67,65	68,13
Donggala	60,15	61,33	63,38	63,55	63,82
Toli-Toli	59,12	60,05	61,44	61,91	62,72
Buol	63,03	63,98	64,50	65,41	65,61
Parigi Moutong	60,36	61,13	61,98	62,20	62,79
Tojo Una-Una	58,87	59,55	60,32	61,15	61,33
Sigi	61,76	62,88	64,10	64,64	65,35
Banggai Laut			61,86	62,12	62,90
Morowali Utara			65,01	65,81	66,00
Kota Palu	78,10	78,36	78,65	79,12	79,63
SULAWESI SELATAN	66,65	67,26	67,92	68,49	69,15
Selayar	62,53	62,87	63,16	63,66	64,32

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Bulukumba	63,36	63,82	64,27	65,24	65,58
Bantaeng	63,07	63,99	64,88	65,77	66,20
Jeneponto	58,95	59,62	60,55	61,45	61,61
Takalar	60,83	61,66	62,58	63,53	64,07
Gowa	64,42	64,65	65,45	66,12	66,87
Sinjai	62,13	62,74	63,47	63,83	64,48
Maros	64,95	65,50	66,06	66,65	67,13
Pangkajene Kepulauan	63,60	64,30	65,24	66,16	66,65
Barru	65,73	66,07	67,02	67,94	68,64
Bone	60,21	60,77	61,40	62,09	63,11
Soppeng	63,80	64,05	64,43	64,74	65,33
Wajo	64,00	64,88	65,79	66,49	66,90
Sidenreng Rappang	65,88	66,19	67,15	68,14	69,00
Pinrang	66,96	67,64	68,14	68,92	69,24
Enrekang	67,03	67,74	68,39	69,37	70,03
Luwu	64,71	65,43	66,39	67,34	68,11
Tana Toraja	63,22	63,96	64,55	65,08	65,75
Luwu Utara	65,57	65,99	66,40	66,90	67,44
Luwu Timur	68,94	69,34	69,53	69,75	70,43
Toraja Utara	64,48	64,89	65,65	66,15	66,76
Kota Makasar	77,82	78,47	78,98	79,35	79,94
Kota Pare Pare	74,20	74,67	75,10	75,66	76,31
Kota Palopo	74,02	74,54	75,02	75,65	76,27
SULAWESI TENGGARA	66,52	67,07	67,55	68,07	68,75
Buton	60,12	61,38	61,83	62,31	62,78
Muna	63,08	63,76	64,67	65,09	65,99
Konawe/Kab Kendari	67,16	67,51	68,23	68,68	69,56
Kolaka	68,27	68,86	69,55	70,20	70,47
Konawe Selatan	63,65	64,05	65,02	65,60	66,32
Bombana	60,84	61,82	62,82	63,38	63,65
Wakatobi	64,67	65,24	66,50	66,95	67,22
Kolaka Utara	63,98	64,49	65,35	65,76	66,90
Buton Utara	61,58	62,69	64,20	64,65	65,23
Konawe Utara	64,25	64,87	65,54	66,03	66,44
Kolaka Timur			61,78	62,13	62,74
Konawe Kepulauan			61,15	61,31	61,72
Muna Barat				61,92	62,29
Buton Tengah				61,69	62,13
Buton Selatan				61,51	62,00
Kota Kendari	79,43	79,97	80,91	81,30	81,43
Kota Bau-Bau	71,11	71,65	72,55	73,13	73,59
GORONTALO	63,48	64,16	64,70	65,17	65,86
Boalemo	60,52	61,11	61,71	62,18	62,86

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Gorontalo	61,04	61,87	62,22	62,90	63,63
Pokuwato	59,85	60,48	61,38	61,74	62,50
Bone Bolango	64,44	65,13	65,82	66,03	66,83
Gorontalo Utara	59,95	60,71	61,60	61,92	62,55
Kota Gorontalo	73,56	74,06	74,43	74,97	75,62
SULAWESI BARAT	60,63	61,01	61,53	62,24	62,96
Majene	62,56	63,06	63,32	63,74	64,40
Polewali Mamasa	58,26	58,62	59,27	60,09	60,87
Mamasa	61,45	61,95	62,57	62,85	63,17
Mamuju	62,28	63,24	64,17	64,71	65,09
Mamuju Utara	62,23	63,00	63,76	64,04	64,69
Mamuju Tengah			61,05	61,48	62,22
MALUKU	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05
Maluku Tenggara Barat	57,69	58,56	59,34	59,81	60,26
Maluku Tenggara	60,96	61,75	62,11	62,74	63,35
Maluku Tengah	66,64	67,30	67,89	68,69	68,85
Buru	62,50	63,50	64,31	65,15	65,75
Kepulauan Aru	58,60	59,17	59,62	59,91	60,50
Seram Bagian Barat	60,59	61,47	61,79	62,39	63,02
Seram Bagian Timur	58,07	58,47	58,88	59,50	60,27
Maluku Barat Daya	56,10	56,74	57,34	58,09	58,64
Buru Selatan	57,98	58,91	59,89	60,74	61,48
Kota Ambon	76,70	77,49	78,16	79,09	79,30
Kota Tual	62,69	63,56	64,16	64,95	65,20
MALUKU UTARA	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91
Halmahera Barat	60,33	60,71	61,47	62,06	62,97
Halmahera Tengah	59,34	59,94	60,89	61,49	62,07
Kepulauan Sula	57,98	58,83	59,77	60,18	60,50
Halmahera Selatan	58,86	59,50	59,92	60,34	61,26
Halmahera Utara	62,31	62,94	63,81	64,18	65,04
Halmahera Timur	60,77	61,73	62,71	63,26	63,99
Pulau Morotai	56,63	57,16	57,97	58,34	59,27
Pulau Taliabu			56,86	57,31	58,26
Kota Ternate	75,52	75,81	76,69	77,15	77,64
Kota Tidore Kepulauan	64,80	65,42	66,25	66,76	67,45
PAPUA BARAT	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73
Fak-Fak	61,94	62,56	64,29	64,73	64,92
Kaimana	57,87	58,99	60,36	61,07	61,33
Teluk Wondama	53,74	54,69	55,65	56,27	56,64
Teluk Bintuni	57,87	58,84	59,73	60,40	61,09
Manokwari	67,28	67,86	68,81	69,35	69,91
Sorong Selatan	56,01	56,87	57,73	58,24	58,60
Sorong	58,56	59,18	60,86	61,23	61,86

Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Raja Ampat	58,37	59,06	60,36	60,86	61,23
Tambrauw	45,97	47,18	48,69	49,40	49,77
Maybrat	53,29	54,13	54,93	55,36	55,78
Manokwari Selatan			54,95	55,32	56,59
Pegunungan Arfak			53,36	53,69	53,73
Kota Sorong	72,80	73,89	74,96	75,78	75,91
PAPUA	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25
Merauke	66,03	66,28	66,88	67,33	67,75
Jayawijaya	51,66	52,27	52,94	53,37	54,18
Jayapura	68,04	68,85	69,21	69,55	70,04
Nabire	64,96	65,28	65,45	66,25	66,49
Yapen Waropen	63,82	64,11	64,34	64,89	65,28
Biak Namfor	68,80	69,05	69,35	70,32	70,85
Paniai	53,02	53,34	53,70	53,93	54,20
Puncak Jaya	40,36	41,85	43,36	44,32	44,87
Mimika	68,74	68,95	69,50	70,40	70,89
Boven Digoel	56,89	57,45	57,96	58,21	59,02
Mappi	54,61	55,09	55,51	55,74	56,11
Asmat	44,58	45,08	45,54	45,91	46,62
Yahukimo	41,72	43,82	45,63	46,36	46,63
Pegunungan Bintang	36,61	37,82	38,94	39,68	40,91
Tolikara	44,41	44,86	45,68	46,16	46,38
Sarmi	57,96	59,03	59,51	60,48	60,99
Keerom	60,65	61,13	62,49	62,73	63,43
Waropen	60,94	61,32	61,68	61,97	62,35
Supiori	58,31	58,86	59,40	59,70	60,09
Membramo Raya	45,82	46,62	47,28	47,88	48,29
Nduga	21,12	23,07	24,42	25,38	25,47
Lanny Jaya	41,90	42,53	43,05	43,28	44,18
Mamberamo Tengah	40,17	41,39	42,43	43,19	43,55
Yalimo	40,45	41,84	43,33	44,21	44,32
Puncak	35,08	36,85	37,73	38,05	39,41
Dogiyai	48,48	50,59	51,46	52,25	52,78
Intan Jaya	40,07	41,89	42,69	43,51	44,35
Deiyai	46,12	46,94	47,74	48,12	48,28
Kota Jayapura	76,97	77,25	77,46	77,86	78,05
INDONESIA	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Lampiran 5. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN, 1990-2014

Rank	Negara	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014
11	Singapura	71,77	81,89	89,71	90,30	90,55	90,91	91,18
31	Brunei Darussalam	78,21	81,90	84,32	84,67	85,24	85,25	85,56
62	Malaysia	64,12	72,30	76,95	77,25	77,41	77,67	77,92
93	Thailand	57,19	64,78	71,58	72,09	72,35	72,44	72,58
110	Indonesia	53,07	60,64	66,46	67,11	67,80	68,11	68,38
115	Filipina	58,58	62,25	65,44	65,26	65,75	66,35	66,82
116	Viet Nam	47,53	57,49	65,35	65,69	66,01	66,28	66,57
141	Kamboja	39,74	46,18	53,93	55,19	56,18	56,99	57,50
143	Laos	36,42	41,86	53,58	54,09	54,60	55,02	55,48
148	Myanmar	35,25	42,54	52,04	52,37	52,75	53,14	53,56

Sumber: Human Development Report 2014

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 6. Kabupaten/Kota dengan Kategori Tinggi, 2015

Kabupaten/Kota (1)	Provinsi (2)	Kabupaten/Kota (3)	Provinsi (4)
Aceh Tengah	Aceh	Kota Pekalongan	Jawa Tengah
Aceh Besar	Aceh	Kota Tegal	Jawa Tengah
Bener Meriah	Aceh	Kulon Progo	DI Yogyakarta
Pidie Jaya	Aceh	Bantul	DI Yogyakarta
Kota Sabang	Aceh	Tulungagung	Jawa Timur
Kota Langsa	Aceh	Sidoarjo	Jawa Timur
Kota Lhokseumawe	Aceh	Mojokerto	Jawa Timur
Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Magetan	Jawa Timur
Toba Samosir	Sumatera Utara	Gresik	Jawa Timur
Labuhan Batu	Sumatera Utara	Kota Kediri	Jawa Timur
Simalungun	Sumatera Utara	Kota Blitar	Jawa Timur
Karo	Sumatera Utara	Kota Probolinggo	Jawa Timur
Deli Serdang	Sumatera Utara	Kota Pasuruan	Jawa Timur
Kota Sibolga	Sumatera Utara	Kota Mojokerto	Jawa Timur
Kota Pematang Siantar	Sumatera Utara	Kota Madiun	Jawa Timur
Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	Kota Surabaya	Jawa Timur
Kota Medan	Sumatera Utara	Kota Batu	Jawa Timur
Kota Binjai	Sumatera Utara	Tangerang	Banten
Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	Kota Tangerang	Banten
Kota Solok	Sumatera Barat	Kota Cilegon	Banten
Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	Kota Serang	Banten
Kota Bukit Tinggi	Sumatera Barat	Kota Tangerang Selatan	Banten
Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	Tabanan	Bali
Kota Pariaman	Sumatera Barat	Badung	Bali
Siak	Riau	Gianyar	Bali
Kampar	Riau	Buleleng	Bali
Bengkalis	Riau	Kota Mataram	NTB
Kota Pekanbaru	Riau	Kota Bima	NTB
Kota Dumai	Riau	Kota Kupang	NTB
Kota Jambi	Jambi	Kota Pontianak	Kalimantan Barat
Kota Sungai Penuh	Jambi	Kota Singkawang	Kalimantan Barat
Kota Palembang	Sumatera Selatan	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	Provinsi	Kabupaten/Kota	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
Kota Bengkulu	Bengkulu	Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan
Kota Bandar Lampung	Lampung	Pasir	Kalimantan Timur
Kota Metro	Lampung	Kutai	Kalimantan Timur
Bangka	Kep. Bangka Belitung	Kutai Timur	Kalimantan Timur
Belitung	Kep. Bangka Belitung	Berau	Kalimantan Timur
Kota Pangkal Pinang	Kep. Bangka Belitung	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
Bintan	Kep. Riau	Kota Samarinda	Kalimantan Timur
Natuna	Kep. Riau	Kota Bontang	Kalimantan Timur
Kota Batam	Kep. Riau	Malinau	Kalimantan Utara
Kota Tanjung Pinang	Kep. Riau	Kota Tarakan	Kalimantan Utara
Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	Minahasa	Sulawesi Utara
Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	Minahasa Utara	Sulawesi Utara
Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kota Manado	Sulawesi Utara
Bandung	Jawa Barat	Kota Bitung	Sulawesi Utara
Bekasi	Jawa Barat	Kota Tomohon	Sulawesi Utara
Kota Bogor	Jawa Barat	Kota Kotamobago	Sulawesi Utara
Kota Sukabumi	Jawa Barat	Kota Palu	Sulawesi Tengah
Kota Bandung	Jawa Barat	Enrekang	Sulawesi Selatan
Kota Cirebon	Jawa Barat	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
Kota Bekasi	Jawa Barat	Kota Makasar	Sulawesi Selatan
Kota Depok	Jawa Barat	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan
Kota Cimahi	Jawa Barat	Kota Palopo	Sulawesi Selatan
Purworejo	Jawa Tengah	Kolaka	Sulawesi Tenggara
Boyolali	Jawa Tengah	Kota Bau-Bau	Sulawesi Tenggara
Klaten	Jawa Tengah	Kota Gorontalo	Gorontalo
Sukoharjo	Jawa Tengah	Kota Ambon	Maluku
Karanganyar	Jawa Tengah	Kota Ternate	Maluku
Sragen	Jawa Tengah	Kota Sorong	Maluku Utara
Kudus	Jawa Tengah	Jayapura	Papua
Jepara	Jawa Tengah	Biak Namfor	Papua
Semarang	Jawa Tengah	Mimika	Papua
Kota Magelang	Jawa Tengah	Kota Jayapura	Papua



CATATAN TEKNIS

<http://www.bpk.go.id>



Catatan Teknis

Konsep Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi – sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan Hidup saat Lahir

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcasing power parity*). Dalam penghitungan standar hidup layak digunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (1)$$

Keterangan:

- PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
- p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
- p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
- m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel L1. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel L1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Penyusunan Indeks IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 384195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Email : bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

